

KINERJA

JURNAL BISNIS DAN EKONOMI

**Aspek Lingkungan dalam Pertumbuhan Kota di Wilayah Aglomerasi Perkotaan
Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Amin Pujiati

Keterkaitan *Job Insecurity* dengan *Social Exchange Model*

Anna Partina dan Mugi Harsono

Land Conversion and Farmers Preference

Catur Sugiyanto, Budiono Sri Handoko dan Dwi Nugroho

**Indikator-Indikator Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia
(Modifikasi Model Pengukuran Doamekpor)**

Muhammad Iqbal dan Abdul Halim

**Determinan Kepercayaan dalam Hubungan
Business-to-Business di Pasar Swalayan Modern**

Tri Hendro Sigit Prakosa

***Effects of Tri Hita Karana Tradition and Gross Regional Domestic Income
on The Economic Growth of Badung Regency, Gianyar,
and Denpasar City of Bali Province 1985-2010***

I Ketut Nama dan Purwiyanta

**Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank Merger Publik
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Yossi Diantimala dan Chairul Raziki

ASPEK LINGKUNGAN DALAM PERTUMBUHAN KOTA DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN SEMARANG DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Amin Pujiati
Universitas Negeri Semarang
Email : apuji06@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to estimate factors which influence the city growth at Urban Agglomeration of Semarang and Daerah Istimewa Yogyakarta. It uses district-level data and supplied by the Indonesian Central Bureau of Statistics during 2000 – 2010. The tools of analysis regression using panel data with Generalized Least Square (GLS) method.

The regression result shows that income per capita has no effect on the city growth. Industrialization, population, education, government expenditure and environment index have positive and significant effect on the city growth while the agriculture variable has negative impact on the city growth.

Keywords : Urban agglomeration, city growth, environment index.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dunia dan proses urbanisasi sampai saat ini selalu menunjukkan peningkatan. Proyeksi populasi global pada tahun 2030 akan naik sebesar 7,94 – 8,33 milyar. Sementara proyeksi penduduk perkotaan pada tahun 2030 sebesar 4,72 – 5 milyar atau terjadi kenaikan sebesar 48,6 – 57,8 % (Zhang, 2008). Bahkan diperkirakan pada akhir abad 21, penduduk dunia akan berjumlah 8-15 milyar orang. Jumlah ini pertumbuhan mayoritas akan cenderung di serap di kota-kota (Knight and Riggs, 2010).

Kota di satu sisi memberikan kemudahan proses produksi dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan kota. Kota juga menyediakan fasilitas kota serta variasi barang dan jasa bagi penduduk, yang memungkinkan penduduk kota memiliki utilitas yang lebih tinggi. Semakin tinggi utilitas yang dapat dicapai suatu kota, akan semakin cepat pertumbuhan kota (Bradley and Gans, 1998 ; Rappaport, 2007). Faktor amenities atau fasilitas kota akan menjadi daya tarik (faktor permintaan) yang menyebabkan berkembangnya kota. Faktor tersebut dapat berupa pemerintahan kota yang baik, fasilitas publik yang baik, tersedianya tempat rekreasi dan tidak ada pencemaran kota. Hal ini didukung oleh Oleyar (2008), penduduk perkotaan lebih memilih lingkungan yang dekat dengan taman sebagai tempat tinggal, yang bisa menyediakan area terbuka untuk melakukan aktivitas aktif (berjalan, jogging, olahraga, dan bersepeda).

Di sisi lain, pertumbuhan kota juga sering menimbulkan eksternalitas negatif, yang seringkali diasosiasikan dengan polusi lingkungan sebagai kausalitas kumulatif yang negatif menurut versi Myrdal dan Pred (Kuncoro, 2002:32). Menurut Fan and Qi (2010) ada korelasi positif antara urbanisasi yang diukur dengan jumlah penduduk kota dengan kerusakan lingkungan. Hal senada, menurut Cracolici et.al., (2010) ada hubungan antara aspek ekonomi dan non ekonomi dalam menjelaskan performance negara. Performance suatu negara tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi (termasuk sosial) saja tapi perlu dilihat dari aspek lainnya yaitu lingkungan. Negara yang masuk dalam kategori performance baik yaitu yang memiliki aspek ekonomi sosial tinggi dan aspek lingkungan tinggi secara bersamaan hanya sedikit.

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN, termasuk negara yang mempunyai tingkat persentase penduduk yang tinggal di perkotaan tinggi. Pada Tabel 1 di negara – negara ASEAN selama empat dasawarsa terakhir, tingkat urbanisasi yang diukur dengan persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan meningkat hampir dua kali lipat . Pada tahun 1950 tingkat urbanisasi di negara-negara ASEAN sebesar 15,4 % yang lebih rendah dibanding negara-negara Asia lainnya yaitu 29,1 % . Pada tahun 2000 tingkat urbanisasi negara-negara ASEAN meningkat menjadi 39,6 % sementara, tingkat urbanisasi di negara-negara Asia sebesar 47,1 % . Berdasarkan proyeksi tahun 2030 tingkat urbanisasi negara-negara ASEAN sebesar 60,7 % atau hampir sama dengan tingkat urbanisasi dunia sebesar 60,8 % (Kuncoro, 2010 :157).

Tabel 1.
Urbanisasi di Negara ASEAN, 1950 – 2030

| Negara | Tingkat Urbanisasi (%) | | | | |
|------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1950 | 1975 | 2000 | 2015* | 2030* |
| Brunai Darusalam | 26,8 | 62,0 | 73,9 | 82,8 | 87,0 |
| Kamboja | 10,2 | 10,3 | 16,9 | 26,1 | 36,9 |
| Timor Leste | 10,0 | 8,9 | 7,4 | 9,5 | 15,2 |
| Indonesia | 12,4 | 19,3 | 42,0 | 57,8 | 67,7 |
| Laos | 7,2 | 11,1 | 19,3 | 27,4 | 38,2 |
| Malaysia | 20,4 | 37,7 | 61,8 | 71,0 | 77,6 |
| Mynmar | 16,2 | 23,9 | 28,0 | 37,6 | 49,1 |
| Filipina | 27,1 | 35,6 | 58,0 | 69,2 | 76,1 |
| Singapura | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Thailand | 16,5 | 23,8 | 31,1 | 36,7 | 47,0 |
| Viatnam | 11,6 | 18,9 | 24,3 | 32,4 | 43,2 |
| Total | 15,4 | 23,4 | 39,6 | 51,2 | 60,7 |

*Angka proyeksi. Sumber : Kuncoro (2010 :157).

Pertumbuhan penduduk di Indonesia cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Indonesia sebagian besar terdistribusi di Pulau Jawa yaitu sebesar 57,49 % dan diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,31 % . Provinsi yang ada di Pulau Jawa semuanya persentase penduduk perkotaannya tinggi, masing-masing Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (100 %), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 70,2 % , Banten (67,2), Jawa Barat (66,2 %), Jawa Timur (56,5 %), Jawa Tengah (56,2 %). Tingginya persentase penduduk perkotaan jika dikaitkan dengan masalah lingkungan terdapat korelasi antara keduanya. Berdasarkan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berdasarkan Provinsi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (2009), Provinsi di Pulau Jawa (tanpa Banten) angka IKLH dibawah IKLH Indonesia artinya kualitas lingkungan hidup Provinsi di Pulau Jawa jelek (Tabel. 2).

Tabel 2.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2009

| No. | Provinsi | IKLH |
|-----|-------------|-------|
| 1. | DKI Jakarta | 41,73 |
| 2. | Jawa Barat | 49,69 |
| 3. | Jawa Tengah | 55,4 |
| 4. | DIY | 53,52 |
| 5. | Jawa Timur | 59,01 |
| | Indonesia | 59,79 |

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 2009.

Aspek Lingkungan dalam Pertumbuhan Kota di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Semarang dan DIY (Amin Pujiati)

Kajian tentang pertumbuhan kota sudah banyak dilakukan, baik antar negara maupun antar waktu. Meskipun sudah banyak diteliti namun tetap menarik karena kenyataannya penduduk perkotaan semakin hari semakin bertambah yang tentunya masalah-masalah baru akan muncul sebagai konsekuensi bertambahnya penduduk. Berbicara tentang pertumbuhan kota akan berkaitan dengan banyak aspek seperti ekonomi, sosial, kebijakan, demografi, spasial dan lingkungan. Namun, kajian tentang pertumbuhan kota yang sudah dilakukan tidak melibatkan aspek lingkungan sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kota dalam model empirik secara langsung serta hanya mengkaji pengaruh pertumbuhan kota terhadap kerusakan lingkungan.

Fokus tulisan ini adalah bagaimana pengaruh variabel ekonomi, sosial, kebijakan, demografi, spasial dan lingkungan terhadap pertumbuhan kota di wilayah aglomerasi perkotaan Semarang dan DIY ?

2. STUDI TERKAIT/SEBELUMNYA

Cheshire and Magrini (2009) telah melakukan penelitian sumber-sumber pertumbuhan kota di 121 kota di 12 Negara Eropa. Data yang digunakan adalah data *cross section* tahun 1971, 1981 dan tahun 1991 dengan alat analisis regresi dan metode OLS. Pertumbuhan kota diukur dengan pertumbuhan GDP per kapita sedangkan variabel penjelas yang digunakan adalah variabel penduduk, kepadatan penduduk, , ukuran pelabuhan, pertanian, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, keuntungan integrasi, dummy kota inti (*core*) , dummy daerah pinggiran (*hinterland*) dan dummy daerah perbatasan (*peripherality*) , jumlah mahasiswa dan fasilitas (*Riset & Development = R&D*). Hasil penelitiannya perbedaan lokal potensi modal manusia dan fasilitas R&D mempengaruhi pertumbuhan kota. Administrasi dan pengaturan pemerintah kota yang sistematis mempengaruhi pertumbuhan kota. Integrasi ekonomi mempunyai dampak mempercepat pertumbuhan. Ada perbedaan pertumbuhan antar kategori kota, daerah pinggiran atau hinterland lebih cepat pertumbuhannya.

Salenussa (2009) melakukan penelitian pertumbuhan kota di empat kota di Maluku pada periode 1985 – 1995 dengan menggunakan panel data. Pertumbuhan kota diukur dengan indeks primacy yaitu jumlah penduduk perkotaan di satu kota di bagi dengan jumlah total penduduk perkotaan di empat kota terbesar di Maluku. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa populasi, pendapatan per kapita dan industrialisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kota. Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi daerah lain (*spillover*) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kota.

Sriwinarti (2005) melakukan penelitian di Indonesia pada periode tahun 1970 – 2002 dengan menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM) Pertumbuhan kota diproksi dengan indeks primacy yaitu rasio penduduk kota terbesar di Indonesia (Jakarta) dibagi total penduduk perkotaan di Indonesia. Variabel yang digunakan pertumbuhan kota (*indeks primacy/IP*), ukuran negara/*size of country* (GDP riil) , pembangunan ekonomi (GDP Per kapita), kepadatan penduduk (jumlah penduduk/km²/DENS), industrialisasi (rasio penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian/IND), keterbukaan (rasio ekspor/GDP/OPEN). Hasil penelitian menyebutkan bahwa GDP riil sebagai ukuran negara hanya berpengaruh pada jangka panjang dan berkorelasi negatif, demikian juga pembangunan ekonomi berpengaruh positif hanya dalam jangka panjang. Kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kota baik jangka pendek maupun jangka panjang. Industrialisasi dan keterbukaan berpengaruh positif hanya dalam jangka panjang, sementara dalam jangka pendek industrialisasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kota.

Moowaw and Alwosabi (2007) melakukan penelitian tentang hubungan antara *urban primacy, gigantism* dan perdagangan internasional di 30 negara Asia dan Amerika pada tahun 1975 – 1990 . Dalam studinya *urban primacy* diukur dengan rasio jumlah penduduk kota terbesar dengan jumlah kota terbesar kedua. Gigantism diartikan kenaikan *urban primacy* karena kebijakan perdagangan internasional. Alat analisis yang digunakan regresi. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perdagangan internasional mempunyai pengaruh positif terhadap *urban primacy* tetapi tidak berpengaruh terhadap *gigantism*. *Urban primacy* lebih kuat terjadi di negara yang perekonomiannya lebih terbuka.

Moowaw and Shatter (1996) melakukan studi tentang *urban percentage, metropolitan concentration, dan urban primacy* di 90 negara dunia yang terbagi menjadi 11 region. Alat analisis yang digunakan regresi dengan

metode OLS. *Urban percentage* diukur dengan sebagai persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. *Metropolitan concentration* diukur dengan persentase penduduk perkotaan di wilayah metropolitan (wilayah dengan penduduk lebih dari 100.000 orang) sedangkan *urban primacy* diukur dengan persentase penduduk wilayah perkotaan terbesar.

Hasil penelitiannya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi *urban percentage* : pembangunan ekonomi, industri, tingkat melek huruf, keterbukaan berpengaruh positif namun pertanian berpengaruh negatif. Faktor yang mempengaruhi *metropolitan concentration* : Pertanian, keterbukaan berpengaruh negatif sedangkan industri berpengaruh positif. Faktor yang mempengaruhi *urban primacy* : keterbukaan, populasi, melek huruf berpengaruh negatif.

Henderson (2002) melakukan penelitian di 320 negara berkembang di Sub Saharan Afrika, Latin Amerika, Asia tentang hubungan antara *primacy* dan pembangunan ekonomi. Alat analisis yang digunakan regresi OLS dengan panel data. Variabel penjelas yang digunakan *urban primacy*, pertanian, GNP per kapita, pengeluaran pemerintah, keterbukaan, kepadatan jalan, saluran telpon dan dummy waktu. Hasil penelitiannya GNP per kapita, pengeluaran pemerintah, keterbukaan, kepadatan jalan, saluran telpon signifikan positif terhadap *urban primacy* namun pertanian signifikan negatif. Semakin berjalannya waktu tingkat urbanisasi lebih tinggi .

Sarungu (1990) melakukan penelitian derajat urbanisasi di Indonesia. Unit analisis yang digunakan provinsi dan alat analisisnya regresi berganda dengan data panel. Variabel penjelas yang digunakan variabel ekonomi (pendapatan regional per kapita, kesempatan kerja pertanian, peranan sektor manufaktur provinsi secara nasional), variabel sosial (angka literasi, rasio wanita usia subur yang berpendidikan SLTA + dan angka kematian bayi), variabel demografis (angka fertilitas total, usia harapan hidup, angka migrasi masuk dan keluar antar provinsi dan variabel situasional (wilayah urbanisasi, wilayah kebijakan pembangunan, waktu) sebagai variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berpengaruh terhadap urbanisasi adalah pendapatan per kapita yang bersifat positif, kesempatan kerja pertanian yang bersifat negatif, peranan sektor manufaktur provinsi secara nasional yang bersifat negatif dan angka literasi bersifat positif. Variabel – variabel situasional menunjukkan semakin ke Barat wilayah Indonesia, derajat urbanisasi semakin tinggi, dan semakin berjalannya waktu juga menunjukkan derajat urbanisasi semakin tinggi.

Khatun (2009) melakukan penelitian di 43 Negara di Asia dan Afrika tentang variabel – variabel yang menyebabkan degradasi lingkungan dengan alat analisis *principal component analysis* (PCA). Variabel yang digunakan adalah GDP per kapita , tingkat fertilitas, konsumsi bahan bakar, persediaan air bersih , sanitasi dan listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat fertilitas yang tinggi menyebabkan pertumbuhan penduduk tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat degradasi lingkungan juga tinggi.

Zheng et. Al., (2010) melakukan penelitian di 35 kota di Cina periode 1997 – 2006 tentang faktor yang mempengaruhi lingkungan (polusi partikel dan SO₂). Alat analisis yang digunakan regresi panel data. Variabel penjelas yang digunakan adalah penduduk perkotaan, pendapatan per kapita, investasi asing, permintaan tenaga kerja industri dan curah hujan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk perkotaan signifikan positif terhadap lingkungan sedangkan investasi asing dan curah hujan signifikan negatif terhadap lingkungan. Hasil lain pendapatan per kapita dan permintaan tenaga kerja industri terbukti berpengaruh positif terhadap lingkungan.

Graves (1976) melakukan penelitian di 48 *standard metropolitan statistical areas* (SMSA) untuk menganalisis hubungan antara migrasi dan faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel lingkungan adalah variabel penting dalam menjelaskan perbedaan kota. Variabel lingkungan berdampak terhadap migrasi intra SMSA bukan migrasi inter SMSA.

Shapiro (2006) melakukan penelitian di 222 metropolitan area di Amerika Serikat tentang hubungan antara pertumbuhan kota yang diukur dengan pertumbuhan tenaga kerja dan kualitas hidup . Variabel kualitas hidup adalah jumlah restoran per kapita, tingkat kejahatan per kapita, angka putus sekolah dan jumlah hari diatas ambang polusi udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hidup memainkan peran yang penting bagi pertumbuhan kota.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di wilayah aglomerasi perkotaan di Semarang dan DIY yang merupakan wilayah aglomerasi di Pulau Jawa (BPS, 2000). Alasan pemilihan wilayah aglomerasi perkotaan Semarang dan DIY adalah wilayah aglomerasi di Pulau Jawa yang persentase penduduk perkotaannya tinggi namun indeks kualitas lingkungan hidup tinggi (DIY) dan Provinsi yang persentase penduduk perkotaannya rendah namun indeks kualitas lingkungan hidup tinggi (Jawa Tengah). Dikatakan tinggi jika nilainya di atas rata-rata, rendah jika nilainya di bawah rata-rata. Adapun unit analisis penelitian ini adalah kabupaten/kota sebagai *core* dan *zone* di masing-masing wilayah aglomerasi Semarang dan DIY yang berjumlah 14 kabupaten/kota. Kabupaten/kota dalam penelitian ini adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Temanggung, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magelang.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder berupa data panel. Data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah di wilayah aglomerasi perkotaan Semarang dan DIY. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2000 sampai dengan 2010 dan data *cross section* meliputi 14 kota/kabupaten di wilayah aglomerasi Semarang dan DIY. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pertumbuhan kota (PK) : Pertumbuhan penduduk perkotaan yang diukur dengan menggunakan indeks primacy (%)
- b) Pendapatan per kapita (PCAP) : Pertumbuhan Pendapatan per kapita berdasarkan harga konstan 2000 (%)
- c) Kesempatan kerja Pertanian (KP) : Persentase tenaga kerja sektor pertanian (%)
- d) Kesempatan kerja Industri (KI) : Persentase tenaga kerja sektor industri (%)
- e) Jumlah Penduduk (POP) : Ln Jumlah Penduduk (%)
- f) Pendidikan (EDU) : Persentase jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi (SMA+) (%)
- g) Pengeluaran Pemerintah (GOV) : Rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDRB (%)
- h) Dummy ukuran kota (DKOTA) : jika core =1, jika zone =0
- i) Indek Lingkungan (EI) yang terdiri dari rata-rata rasio ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah dan rasio lahan yang dapat diolah/ditanami terhadap luas wilayah (%).

3.3. Model Yang Digunakan

Model yang digunakan untuk meneliti pertumbuhan kota dalam penelitian ini mengacu model yang digunakan oleh Moowaw and Alsowabi (2004) dan Cheshire and Magrini (2009). Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \beta_7 X_{7it} + \beta_8 D_{1t} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

dimana : Y = Pertumbuhan kota
i = menunjukkan unit kabupaten/kota (1,...,14)
t = menunjukkan periode waktu (1,...,11)

$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8$ masing-masing Pendapatan per kapita, kesempatan kerja pertanian, kesempatan kerja industri, jumlah penduduk, pendidikan, pengeluaran pemerintah, indeks lingkungan dan dummy kota.

3.4. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan kota di wilayah aglomerasi perkotaan Semarang dan DIY adalah analisis regresi.

3.4.1. Teknik Penaksiran Model

Dalam penelitian ini akan digunakan data panel dalam upaya mengestimasi model yang ada. Ada dua pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis panel data. Pertama, pendekatan *Fixed Effects* yang menetapkan bahwa α_i adalah sebagai kelompok yang spesifik atau berbeda dalam *constant term* dalam model regresinya. Kedua, pendekatan *Random Effects*, meletakkan α_i sebagai gangguan spesifik kelompok, sama dengan ϵ_{it} kecuali untuk masing-masing kelompok, tetapi gambaran tunggal yang memasukkan regresi sama untuk tiap-tiap periode. Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi apakah *Fixed Effects* atau *Random Effects* atau keduanya memberikan hasil yang sama. Pilihan antara *Fixed Effects* dan *Random Effects* ditentukan dengan menggunakan *Hausman's Test*. Untuk pendekatan *Fixed Effects* menggunakan uji F statistik (Green, 2000 : 562). Jika ternyata hasil perhitungan uji $F_{hit} \geq F_{tab} (n-1, nT-n-K)$ ini berarti H_0 ditolak, artinya intersep untuk semua unit *cross sections* tidak sama. Dalam hal ini, akan digunakan *Fixed Effects* model untuk mengestimasi persamaan regresi.

Metode penaksiran model yang dipakai adalah *Generalized Least Square (GLS)*. Metode GLS dipilih dalam penelitian ini karena adanya nilai lebih yang dimiliki oleh GLS dibandingkan OLS dalam mengestimasi parameter regresi. Gujarati (2003:394) menyebutkan bahwa metode OLS yang umum tidak mengasumsikan bahwa varians variabel adalah heterogen, pada kenyataannya variasi data pada data pooling cenderung heterogen. Metode GLS sudah memperhitungkan heterogenitas yang terdapat pada variabel independent secara eksplisit sehingga metode ini mampu menghasilkan estimator yang memenuhi kriteria *best linear unbiased estimator (BLUE)*

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan pendeteksian atas nilai R^2 dan signifikansi dari variabel yang digunakan. *Rule of Thumb* mengatakan apabila didapatkan R^2 yang tinggi sementara terdapat sebagian besar atau semua variabel yang secara parsial tidak signifikan, maka diduga terjadi multikolinearitas pada model tersebut (Gujarati, 2003: 369). Lebih dari itu, multikolinearitas biasanya terjadi pada estimasi yang menggunakan data runtut waktu sehingga dengan mengkombinasikan data yang ada dengan data *cross section* mengakibatkan masalah multikolinearitas secara teknis dapat dikurangi.

Uji Heteroskedastisitas, masalah ini muncul bersumber dari variasi data *cross section* yang digunakan. Metode GLS yang pada intinya memberikan pembobotan kepada variasi data yang digunakan dengan kuadrat varians dari model sehingga dapat dikatakan dengan menggunakan GLS masalah heteroskedastisitas sudah dapat diatasi.

Uji Autokorelasi, yang paling sederhana adalah menggunakan uji *Durbin Watson (DW)*. Sebagai *rule of thumb* nilai DW hitung yang mendekati 2 dianggap menunjukkan bahwa model terbebas dari autokolinearitas atau jika $4 - d < d < 4 - d$ (Gujarati, 2003 : 469).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Regresi

4.1.1. Uji Spesifikasi Model

Untuk mengestimasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kota di wilayah aglomerasi perkotaan Semarang dan DIY, maka terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi model. Pertama, dilakukan Uji F yang pada dasarnya membandingkan antara model *common* yang mengasumsikan intersep untuk semua unit *cross section* sama dengan model *fixed effect* yang mengasumsikan intersep berbeda antar unit *cross section*. Dengan bantuan software Eviews 6 hasil uji signifikansi (Tabel 3), F hitung sebesar 19,038 sedangkan F table pada $\alpha = 0,05$ sebesar 1,91. Hasil ini menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka signifikan yang berarti model *Fixed Effect* tepat dipilih untuk mengestimasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kota.

**Tabel 3.
Hasil Uji Signifikansi Fixed Effect**

| Redundant Fixed Effects Tests | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|
| Pool: Untitled | | | |
| Test period fixed effects | | | |
| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
| Period F | 19.038063 | (10,135) | 0.0000 |

Sumber : Hasil estimasi (tidak dilampirkan).

Pemilihan model juga diperkuat oleh Hausman Test statistiknya (Tabel 4). Hasil χ^2_{hit} adalah sebesar 9,016 sedangkan nilai χ^2_{tab} pada regressor (K) = 8 pada signifikansi 95 % adalah 15,507. Hasil ini menunjukkan $\chi^2_{hit} < \chi^2_{tab}$, maka tidak signifikan yang berarti model *Fixed Effect* tepat dipilih untuk mengestimasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kota.

**Tabel 4.
Hasil Uji Hausman Test**

| Correlated Random Effects - Hausman Test | | | |
|---|-------------------|--------------|--------|
| Pool: Untitled | | | |
| Test cross-section random effects | | | |
| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
| Cross-section random | 9.016380 | 7 | 0.2515 |

Sumber : Hasil estimasi (tidak dilampirkan).

Selain itu dilihat dari *goodness of fit*, model *fixed effect* juga lebih baik dibandingkan model lainnya (*Common* dan *Random effects*) pada Tabel 5. Tabel 5 berikut ini menyajikan ringkasan hasil estimasi beberapa model dengan jumlah observasi 154 yang diolah dengan menggunakan Eviews 6. Model yang dipakai setelah melalui uji spesifikasi model adalah model *fixed effects* (kolom 2). Pada common model, ada tiga variabel independen yang digunakan dalam estimasi tidak signifikan yaitu pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah dan indeks lingkungan. Nilai R^2 maupun nilai Adj R^2 lebih rendah dibandingkan dengan model *fixed effect* meskipun nilai F hitung dan nilai DW lebih besar daripada model *fixed effect*. Model *random effect*, hasil estimasi menunjukkan sebagian besar variabel independen yang digunakan tidak signifikan termasuk dummy kota. Adapun variabel yang tidak signifikan adalah pendapatan per kapita, pertanian, industri, pengeluaran pemerintah dan indeks lingkungan. Sementara dilihat dari nilai nilai R^2 , adj R^2 , F hitung lebih kecil dibandingkan model *fixed effect*. Dengan pertimbangan teoritis dan statistik maka model *fixed effect* dipilih sebagai pendekatan model dalam penelitian ini.

Tabel 5.
Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kota di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Semarang dan DIY Tahun 2000 – 2010

| Dependen variabel : | Model | | |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Common | Fixed effects | Random effects |
| Pertumbuhan kota (PK) | | | |
| Konstanta (C) | -177,847 (12,000)* | -225,217 (15,437)* | -189,149 (1,783)* |
| Pendapatan Per kapita (PCAP) | -0,010 (0,797) | -0,007 (0,458) | 0,0184 (0,791) |
| Pertanian (AGR) | -0,076 (4,365)* | -0,072 (3,582)* | -0,022 (0,719) |
| Industri (IND) | 0,471 (9,954)* | 0,524 (12,751)* | 0,183 (0,177) |
| Penduduk (POP) | 13,404 (12,197)* | 16,170 (15,065)* | 14,893 (4,484)* |
| Pengeluaran Pengeluaran pemerintah (GOV) | -0,035 (1,700) | 0,159 (7,546)* | -0,064 (0,196) |
| Pendidikan (EDU) | 0,153 (6,543)* | 0,254 (8,990)* | 0,218 (2,281)** |
| Indeks Lingkungan (EI) | 4,750 (1,312) | 14,162 (5,238)* | -17,177 (0,337) |
| Dummy Kota (DKOTA) | 7,870 (3,624)* | 8,463 (3,869)* | 3,609 (0,618) |
| R ² | 0,764 | 0,829 | 0,193 |
| Adj R ² | 0,751 | 0,806 | 0,149 |
| F | 58,785 | 36,388 | 4,347 |
| DW | 1,980 | 1,875 | 2,263 |

Sumber : Hasil estimasi (tidak dilampirkan).

Catatan :

* signifikan $\alpha = 1\%$, ** signifikan $\alpha = 5\%$

Angka dalam kurung menunjukkan nilai t-statistik.

4.1.2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan pendeteksian atas nilai R² dan signifikansi dari variabel yang digunakan. *Rule of Thumb* mengatakan apabila didapatkan R² yang tinggi sementara terdapat sebagian besar atau semua variabel yang secara parsial tidak signifikan, maka diduga terjadi multikolinearitas pada model tersebut (Gujarati, 2003 : 369). Lebih dari itu, multikolinearitas biasanya terjadi pada estimasi yang menggunakan data runtut waktu. Dengan mengkombinasikan data *time series* dengan data *cross section* mengakibatkan masalah multikolinearitas secara teknis dapat dikurangi. Penelitian ini menggunakan data panel, jadi sebenarnya secara teknis sudah dapat dikatakan masalah multikolinearitas sudah tidak ada. Hal tersebut diperkuat dengan hasil estimasi model hanya satu variabel yang tidak signifikan (PCAP) dan nilai R² tinggi (0,829), sehingga dengan sendirinya model ini sudah terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas, masalah ini muncul bersumber terutama dari variasi data *cross section* yang digunakan. Metode *Generalized Least Squares* (GLS) yang pada intinya memberikan pembobotan kepada variasi data yang digunakan, dengan kuadrat varians dari model . Penelitian ini menggunakan pendekatan GLS sehingga masalah heteroskedastisitas sudah dapat diatasi.

Aspek Lingkungan dalam Pertumbuhan Kota di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Semarang dan DIY (Amin Pujiati)

Uji Autokorelasi, yang paling sederhana adalah menggunakan uji *Durbin Watson* (DW). Sebagai *rule of thumb* nilai DW hitung yang mendekati 2 dianggap menunjukkan bahwa model terbebas dari autokolinearitas atau jika $2 - d < 4 - d$ (Gujarati, 2003 : 469). Hasil estimasi penelitian ini nilai DW sebesar 1,875 nilai d_u (1,847) nilai d_l (1,622) yang berarti $1,847 < 1,875 < 2,153$. Dengan demikian penyimpangan asumsi autokorelasi sudah dapat dihilangkan.

4.2. Analisis dan Pembahasan

Pendapatan per kapita (PCAP) menunjukkan tanda negatif dan tidak signifikan secara statistik pada penelitian ini. Semakin besar pendapatan per kapita akan mendorong dan menyebabkan tumbuhnya wilayah-wilayah ekonomi baru. Kondisi ini menyebabkan tidak terkonsentrasi penduduk tinggal di kota besar tertentu, karena makin banyak pilihan bagi penduduk untuk bertempat tinggal dan mencari pekerjaan pada berbagai kota. Demikian juga jika kota sudah mencapai skala yang optimum, persaingan antar perusahaan dan industri lambat laun akan meningkatkan harga faktor produksi dan mengakibatkan relokasi aktifitas ekonomi ke daerah lain . Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Moomaw and Alwosabi (2007) dan Sriwinarti (2005).

Koefisien kesempatan kerja pertanian (AGR) menunjukkan tanda negatif dan signifikan pada derajat kepercayaan 1 persen. Nilai koefisien pertanian - 0,072 artinya jika ada peningkatan tenaga kerja pertanian sebesar 10 persen pertumbuhan kota turun sebesar 0,72 persen. Hal ini erat kaitannya dengan migrasi pekerja dari desa ke kota. Penduduk desa pada umumnya bekerja di sektor pertanian. Semakin banyak migrasi pekerja dari desa ke kota yang berarti semakin sedikit pekerja pertanian, maka semakin mendorong pertumbuhan kota dan sebaliknya jika penduduk desa tidak bermigrasi ke kota yang berarti tenaga kerja pertanian semakin banyak maka pertumbuhan kota akan menurun . Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Moomaw and Alwosabi (2004) dan Sarungu (1990).

Kesempatan kerja industri (IND) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Koefisien industri sebesar 0,527 pada tingkat kepercayaan 1 persen yang berarti apabila pertumbuhan tenaga kerja industri naik sebesar 1 persen akan menaikkan pertumbuhan kota sebesar 0,53 persen. Pertumbuhan perusahaan manufaktur mendorong terjadinya mobilitas barang, mobilitas jasa serta mobilitas faktor produksi termasuk tenaga kerja. Penduduk akan cenderung datang ke pusat kegiatan ekonomi di kota – kota besar karena mereka akan lebih mudah memperoleh kesempatan kerja . Dalam kondisi ini negara juga mendukung ekspansi industri dengan menyediakan infrastruktur di pusat – pusat perkotaan. Dengan demikian industrialisasi merupakan faktor pendorong bagi masyarakat untuk datang ke kota Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Henderson (2002) dan Salenussa (2009).

Jumlah penduduk (POP) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Angka koefisien jumlah penduduk sebesar 16,170 yang berarti apabila ada kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan kota sebesar 16,17 persen. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar ukuran kota. Besarnya ukuran kota mencerminkan besarnya ukuran pasar lokal yang dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa. Permintaan yang meningkat akan merangsang peningkatan produksi lokal barang dan jasa yang selanjutnya meningkatkan pendapatan rata-rata dan permintaan masyarakat. Munculnya usaha-usaha baru akan mendorong pertumbuhan kota melalui banyaknya orang yang datang ke pusat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan baik sebagai wiraswasta maupun pekerja. Perusahaan-perusahaan manufaktur cenderung memilih untuk berlokasi pada daerah yang padat dan banyak penduduknya untuk menikmati manfaat lokalisasi, yang diasosiasikan dengan ukuran industri tertentu, dan penghematan aglomerasi, yang dicerminkan oleh ukuran pasar pada suatu daerah, terutama daerah perkotaan. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Cheshire and Magrini (2009) dan Moomaw and Shatter (1996).

Pendidikan (EDU) menunjukkan tanda positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 1 persen. Koefisien pendidikan 0,253 artinya jika ada peningkatan pendidikan sebesar 1 persen pertumbuhan kota naik sebesar 0,25 persen. Teori pertumbuhan endogen (*Endogenous Growth Theory*) dari Romer (1990) berpendapat faktor utama pendorong pertumbuhan adalah peran penelitian dan pengembangan (*Research and Development = R&D*) dan

modal manusia. Teori pertumbuhan endogen ini digunakan sebagai dasar menjelaskan sumber pertumbuhan kota. Perbedaan lokal dalam modal manusia dan aktivitas R&D adalah faktor penting dalam menjelaskan tingkat perbedaan pertumbuhan ekonomi perkotaan. Tingkat pendidikan penduduk yang tinggi, tenaga kerja yang terampil dan semakin banyak jumlah R&D yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di daerah tertentu akan mendorong pertumbuhan kota lebih cepat. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk di kota tertentu, semakin mendorong pertumbuhan kota tersebut.

Koefisien pengeluaran pemerintah (GOV) menunjukkan tanda positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1 persen. Angka koefisien pengeluaran pemerintah sebesar 0,159 artinya adanya kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen akan menaikkan pertumbuhan kota sebesar 0,16 persen. Hasil penelitian ini konsisten dengan Tiebout Theory dari Tiebout (1956) yang menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyarakat lokal dengan pemerintah lokal. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah dan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka mereka akan keluar (*exit and voice*) dengan berpindah ke daerah yurisdiksi lain yang cocok dengan preferensi mereka. Besarnya pengeluaran pemerintah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Pertumbuhan kota akan meningkat jika fasilitas publik yang disediakan semakin banyak. Semakin besar pengeluaran pemerintah, semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan sehingga mempercepat pertumbuhan kota.

Hasil estimasi koefisien indeks lingkungan (EI) menunjukkan tanda yang positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 1 persen. Besarnya koefisien indeks lingkungan dalam penelitian ini 14,163 artinya apabila ada kenaikan indeks lingkungan sebesar 1 persen akan menaikkan pertumbuhan kota sebesar 14,16 persen. Semakin tinggi indeks lingkungan berarti kualitas hidup di kota semakin baik, sehingga penduduk akan cenderung melakukan migrasi. Angka koefisien indeks lingkungan dalam penelitian ini terbesar kedua setelah variabel penduduk, hal ini menunjukkan begitu pentingnya peranan lingkungan dalam pertumbuhan kota di wilayah aglomerasi perkotaan di Semarang dan DIY.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori skala kota yang optimum yang dikaji ulang oleh Fujita dan Thisse (1996) menggambarkan adanya kekuatan sentripetal (*centripetal forces*) yaitu kekuatan yang mendorong penduduk dan aktivitas bisnis keluar dari pusat kota atau perkotaan berpindah kearah pinggiran atau keluar kota dan daerah perkotaan. Dari aktivitas bisnis, apabila proses aglomerasi industri di perkotaan sudah mencapai skala ekonomis yang optimum, ekspansi setelah titik tersebut hanya akan menimbulkan dampak negatif di kota maupun daerah sekitarnya. Persaingan antar perusahaan dan industri lama kelamaan akan meningkatkan harga bahan baku dan faktor produksi seperti harga tanah, tenaga kerja dan modal. Hal ini menyebabkan relokasi aktivitas ekonomi ke daerah pinggiran kota atau kota-kota satelit di seputar pusat kota. Dari sisi penduduk kekuatan yang mendorong keluar dari pusat kota terutama kekuatan non pasar seperti bertempat tinggal di wilayah yang masih terdapat ruang terbuka hijau yang nyaman, sehat dan indah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Sarungu (2009), Oleyar (2008), Shapiro (2006) dan Graves (1976).

Hasil estimasi dummy kota (DKOTA) menunjukkan hasil positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 1 persen. Angka koefisien DKOTA positif dan signifikan berarti ada perbedaan pertumbuhan kota berdasarkan ukuran kota. Pertumbuhan kota kategori pusat kota (*core*) lebih besar/lebih cepat daripada pertumbuhan kota pinggiran (*zone*). Hal ini sesuai dengan teori Geografi Ekonomi Baru (*New Economic Geography = NEG*) dari Krugman (1991) bahwa dimensi spasial merupakan faktor penting dalam analisis ekonomi. Skala ekonomis yang lebih besar, biaya transaksi yang rendah, dan mobilitas tenaga kerja yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan kota.

5. KESIMPULAN

Hasil estimasi regresi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kota di wilayah aglomerasi perkotaan Semarang dan DIY adalah pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kota. Tenaga kerja pertanian berpengaruh negatif, sementara tenaga kerja industri, penduduk, pendidikan, pengeluaran pemerintah dan indeks lingkungan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kota. Aspek lingkungan memegang peranan penting dalam pertumbuhan kota yang ditunjukkan nilai koefisien indeks lingkungan yang besar setelah jumlah penduduk. Temuan lain dari studi ini mendukung teori geografi ekonomi baru yang menjelaskan dimensi spasial faktor yang penting dalam analisis ekonomi, yang ditunjukkan dengan hasil estimasi dummy kota positif dan signifikan.

Performance dan Keberlanjutan kota untuk terus tumbuh tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, sosial, politik tetapi variabel yang ikut berperan adalah aspek lingkungan, untuk itu pemerintah kota harus lebih memperhatikan dan lebih tegas menangani masalah lingkungan melalui berbagai program. Studi ini dapat dikembangkan dengan mengembangkan variabel lingkungan tidak hanya dari lingkungan alam misalnya lingkungan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik , (2000), *Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Karakteristik Tujuh Wilayah Aglomerasi Perkotaan di Indonesia 1990 – 1995*, Kerjasama BPS, ANU, UNFPA dan The Australian National University. -----2010 , *Statistik Indonesia (beberapa tahun)*, Jakarta : BPS.
- , (2011), *Statistik Indonesia*, www.datastatistik-indonesia.com/index2.php?option=com, diunduh tanggal 1 Agustus 2011.
- Bradley, Rebecca and Gans, (1998), Growth in Australian Cities, *Economic Record*, Vol.74 (226), pp. 266 -278.
- Cheshire P and S, Magrini, (2009), Urban Growth drivers in a Europe of Sticky People and Implicit Boundaries, *Journal of Economic Geography* ,Vol. 9, pp. 85 -115.
- Crocolici, et. al., (2010), The Measurement of Economic, Social and Environmental Performance of Countries : A Novel Approach, *Soc Indic Res* , Vol. 95, pp. 339 – 356.
- Fan, P and J. Qi, (2010), Assessing The Sustainability of Major Cities in China, *Sustainability Science*,Vol. 5, pp. 51 – 68.
- Fujita and Thisse, (1996), The Economics of Agglomeration, *Journal of Japanese and International Economics*, Vol. 10, pp. 339 – 378.
- Graves, (1976), Are Examination of Migration, Economic Opportunity, and The Quality of Life, *Journal of Regional Science*, Vol. 12 (1), pp. 107 – 112.
- Greene, W., (2000), *Econometric analysis*, New York : Macmillan.
- Gujarati, D., (2003), *Basic Econometrics*, New York : Mc Graw Hill, inc.
- Henderson, V., (2002), Urbanization in Developing Countries, *The World Bank Research Observer*, Vol. 17 (1), pp. 89 – 112.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, (2009), *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2009*, Jakarta : KLH.
- Khatun, T., (2009), Measuring Environmental Degradation by Using Principal Component Analysis, *Environment, Development and Sustainability*, Vol. 11, pp. 439 – 457.
- Knight, L and W, Riggs, (2010), Nourishing Urbanism : a case for a New Urban Paradigm, *International Journal of Agricultural Sustaibanblity*, Vol. 8 (1 &2), pp. 116 – 126.
- Krugman, P., (1996), Urban concentration : The role of increasing returns and transportation costs, *International Regional Science Review*, Vol. 19, pp. 5-30.
- , (1991), Increasing returns and economic geography, *Journal of Political Economy*, Vol. 99, pp. 483 – 499.

- Kuncoro, M., (2002), *Analisis Spasial dan Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN .
- , (2010), *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga.
- Moomaw, R. L., and M. A., Alwosabi, (2004), An Empirical analysis of competing explanations of urban primacy evidence from Asia and America, *Regional Science*, Vol. 38, pp. 149 -171.
- , (2007), Urban Primacy, Gigantism, and International Trade : Evidence from Asia and The Americas, *Journal of Economic Integration*, Vol. 22 (2), pp. 439 – 460.
- Moomaw, R. L., and A. M Shatter, (1996), Urbanization and Economic Development : A Bias Toward a Large City, *Journal of Urban Economics*, Vol. 40, pp. 13 – 37.
- Oleyar, M,D et. al., (2008), An Integrated Approach to Evaluating Urban Forest Functionality, *Urban Ecosyst*, Vol. 11, pp. 289 – 308.
- Rappaport, J., (2007), Moving to Nice Weather, *Regional Science and Urban Economics*, Vol. 37, pp. 375 – 398.
- Romer, (1990), Endogenous Technological Change, *Jurnal of Political Economy* , Vol. 98, pp. 71 – 102.
- Salenus, (2009), Beberapa Karakteristik Umum Pertumbuhan Empat Kota Besar di Maluku Sebelum Pemekaran (Tahun 1985 – 1995), *Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, Vol. III (1), pp. 39 – 50.
- Sarungu, J.J, (1990), *Pembangunan Sosial Ekonomi, Perubahan Demografi dan Urbanisasi : Suatu Telaah Empirik di Indonesia*, Tesis S2 (Tidak dipublikasikan), Jakarta, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- , (2009), *Ekonomi Urbanisasi dan Pertumbuhan Pusat Perkotaan : Konsep, Model dan Hasil Penelitian*, Surakarta : CV Lintang Trans Media.
- Shapiro, (2006), Smart Cities : Quality of Life, Productivity, and The Growth Effect of Human Capital, *Review of Economics and Statistics*, Vol. 88 (2), pp. 324 – 335.
- Sriwinarti, (2005), Dampak Pembangunan Ekonomi dan Keterbukaan Terhadap Pertumbuhan Kota di Indonesia Tahun 1970- 2002, *Jurnal Ekonomi pembangunan*, Vol. 10 (3), pp. 227 – 240.
- Tiebout, C., (1956), A Pure Theory of Local Expenditures, *Journal of Political Economy*, Vol. 64, pp. 416 – 424.
- Zhang, W., (2008), A Forecast Analysis on World Population, *Environment, Development and Sustainability*, Vol. 10, pp. 717 – 730.
- Zheng, S, et. al., (2010), Towards a System of Open Cities in China : Home Price, FDI Flows and Air Quality in 35 Major Cities, *Regional Science and Urban Economics*, Vol. 40, pp. 1-10.

KETERKAITAN JOB INSECURITY DENGAN SOCIAL EXCHANGE MODEL

Anna Partina
STIM YKPN Yogyakarta
Email : grace_annaone@yahoo.com

Mugi Harsono
PDIE Fakultas Ekonomi UNS
Email : mugih@uns.ac.id

Abstract

The comprehensif research about relationship between job insecurity and social exchange model has limited. Job insecurity just corelated by job attitude, economic condition, stress, well-being. This research connects job insecurity with social echange model (LMX, OCB and POS). Outsource employee in Yogyakarta as respondent in this reseach. The result shown that job insecurity is negatively related to LMX , OCB and POS, but LMX and POS not as mediating and moderating variabel relationship between job insecurity and OCB.

Keywords : job insecurity, social exchange model.

1. PENDAHULUAN

Perubahan kondisi ketenagakerjaan dunia telah dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dimana kondisi tersebut telah membawa negara, organisasi, pekerja untuk mencari fleksibilitas yang lebih pada pekerjaan. Konsekuensinya terjadi perubahan pada hubungan kerja yang standard. Perubahan ekonomi global meningkatkan persaingan dan ketidakpastian antar perusahaan dan meletakkan tekanan yang lebih besar untuk dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan menjadi lebih fleksibel dalam hubungan antara pekerja dengan organisasi (Kalleberg, 2000). Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat memicu tingginya pengangguran, khususnya di Eropa, perekonomian tidak mampu menghasilkan pekerjaan yang mencukupi untuk memberikan gaji pada pekerja dengan waktu kerja penuh. Adopsi pekerjaan non standar di fasilitasi oleh perbaikan tehnologi dalam hal komunikasi dan system informasi yang memudahkan orang menjadi spesialis pada bidangnya. Maka munculnya berbagai istilah kontrak kerja terkait dengan pekerjaan non-standar seperti : *part-time, temporary agency, contract company employee, short term employment, contingent worker, dan independent contracting* (Kalleberg, 2000).

Berkaitan dengan fenomena tersebut, berbagai penelitian telah dilakukan. Connelly & Daniel (2004) membedakan berbagai tipe pekerjaan *non-standard* dengan berbagai topik area dan pengaturan kerja. Pertumbuhan signifikan pada tingkat *contingent worker* (CW) yang menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja konvensional pada berbagai negara didunia. Di tahun 2008 secara global terdapat lebih dari sembilan setengah (9.5) juta pekerja yang disalurkan oleh agen di Indonesia. Mayoritas dari mereka berusia kurang dari tiga puluh (30) tahun (Tjandraningsih *dkk*, 2010).

Pola hubungan kerja ini telah menyebar dan memberikan dampak baik pada pola hubungan kerja maupun penelitian akademis dengan banyak kontradiksi. *Contingent worker* didefinisikan sebagai pekerjaan dimana seseorang tidak memiliki kontrak kerja jangka panjang secara eksplisit atau implicit (Polivka, 1996). Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa trend ini menciptakan pekerja *underclass*, upah rendah, tidak memperhatikan *Job Insecurity* , memiliki *training* yang terbatas dan tidak memiliki kemungkinan pengembangan (Connelly & Daniel, 2004).

Fenomena *contingent worker* di Indonesia yang lebih sering dikenal dengan istilah *outsourcing*, telah menjadi fenomena ketenagakerjaan. Munculnya pekerja *outsourcing* (alih daya) menjadi salah satu pemicu munculnya *job insecurity* di Indonesia. Menurut Data Bank Dunia yang dikutip oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Harian Bisnis Indonesia, 27/12/2010) di tahun 2010, terdapat 35% dari 33 juta pekerja formal di Indonesia atau sekitar 11,55 juta pekerja merupakan tenaga alih daya dan kontrak. Kondisi ini dianggap sangat rawan dan mengkhawatirkan karena akan merugikan kedua belah pihak baik pekerja maupun pemberi kerja. Karena pemberi kerja mengkhawatirkan kinerja perusahaan mereka sedangkan bagi pekerja sendiri tidak memiliki kepastian mengenai masa depannya. Jumlah pengangguran terbuka menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2010 tercatat sebanyak 8.59 juta orang dan pengangguran terselubung yang tercatat sebagai pekerja alih daya mendominasi jumlah tersebut.

Berbagai perubahan dalam struktur pasar yang telah terjadi sejak awal tahun 1980-an serta munculnya apa yang disebut dengan *contingen worker* di negara-negara Eropa (King, 2008) beberapa menyebutnya sebagai *non standard worker*, *contract worker* (Salmieri, 2009) telah membawa dampak pada hubungan jangka panjang pekerja dengan perusahaan, karir, struktur keluarga dan perasaan *job insecurity*. Dalam literatur mengenai *contingent work*, maka status kerja diidentifikasi sebagai salah satu faktor penentu dari *job insecurity* (De Witte, 2005). Lebih lanjut Bounocore, Mettallo & Salvatore (2008) menyatakan bahwa *job insecurity* memperburuk perjanjian kerja bagi pekerja sementara. Beberapa anteseden dari perubahan tentang *job insecurity* merefleksikan kecenderungan yang umum terjadi dan telah mempengaruhi pasar tenaga kerja di beberapa negara di Eropa. Meningkatnya fleksibilitas dalam kontrak kerja menjadi hal yang sangat penting. Fleksibilitas pekerja telah mempengaruhi industri dan kehidupan sosial.

Contingent worker ditemukan memiliki outcome yang kurang positif di tempat kerja seperti lebih sering sakit, memiliki *turnover* yang tinggi, tingkat keinginan berkontribusi yang rendah dibandingkan dengan pegawai tetap (Bounocore *et. al.*, 2005). Meningkatnya populasi *contingent worker* dalam perusahaan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan penelitian dalam bidang ini untuk menguji pengaruh *contingent worker* terhadap perilaku pekerja (Connelly *et. al.*, 2004; De Cyper *et. al.*, 2008 dalam Bounocore *et. al.*, 2008)

Mengingat perkembangan fenomena kerja tersebut telah mendorong munculnya *job insecurity* bagi pekerja maka penelitian mengenai *job insecurity* juga mengalami perkembangan. *Job insecurity* merujuk pada "perasaan kehilangan kekuasaan untuk tetap menjaga kesinambungan yang diinginkan dalam situasi kerja yang terancam (Greenhlagh & Rosenblat, 1984). Pada awalnya penelitian *job insecurity* seringkali diukur dengan konstruk fenomena unidimensional yang secara umum hanya memperhatikan kondisi kerja pada masa yang akan datang. Ashford *et. al.* (1989) menunjukkan bahwa *job insecurity* sering diukur dengan item tunggal, dengan skala yang tidak diketahui, atau pengukuran tanpa dasar teoritis yang jelas yang ternyata tidak mencukupi.

Jumlah penelitian mengenai *job insecurity* mengalami kenaikan pada tahun 1900-an. Menurut Mohr (2000), peningkatan penelitian tentang *job insecurity* merefleksikan meningkatnya perusahaan yang menggunakan strategi *downsizing* di negara barat. Berkembangnya isu *job insecurity* dikaitkan dengan meningkatnya pengangguran dan pengurangan pekerja dalam jumlah yang besar yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keefektifan organisasional dan kemampuan untuk bersaing.

Penelitian tentang *Job Insecurity* telah dikaitkan dengan berbagai konsekuensi negatif seperti pengaruhnya terhadap kesehatan mental dan fisik yang hasilnya sampai dengan sekarang masih kontradiktif (Ashford *et al.* 1989; Mohr 2000; Hellgren *et al.* 1999; Rugulies 2008; Ferrie *et al.* 2002); depresi (Meltzer, Bebbington & Brugha, 2010); kepercayaan terhadap organisasi (Ashford *et. al.* 1989), menurunnya loyalitas terhadap organisasi (Loseby; 1992 dalam Rosenblatt, Talmud dan Ruvio, 1999), menurunnya persepsi terhadap dukungan organisasi (Rosenblatt & Ruvio, 1996); komitmen organisasi, *resistance to change* dan *intention to leave* (Ashford *et. al.* 1989; Ruvio & Rosenblatt, 1996). Selain itu perkembangan penelitian tentang *job insecurity* juga dikaitkan dengan faktor demografis seperti variabel seperti umur, socio-economic (Feijoo, 2004); *gender* (Rosenblatt, Talmud dan Ruvio, 1999; Cohvwen & Invenson, 2009); kondisi keluarga (Barling *et. al.*, 1999).

Penelitian di Indonesia sudah dimulai dan sebagian besar masih terkait dengan berbagai konsekuensi *job*

insecurity dan sikap kerja. Setianingrum, Harlina & Achmad (2008) dalam penelitiannya menguji hubungan antara *job insecurity* dengan komitmen kontinuan. Hasil menunjukkan adanya hubungan positif antara *job insecurity* dengan komitmen kontinuan. Sahid (2008) dalam penelitiannya menguji hubungan antara *job insecurity* dengan persepsi terhadap pemutusan hubungan kerja. Wening (2005) menguji pengaruh *job insecurity* pada perbankan yang mengalami restrukturisasi, hasil menunjukkan komitmen organisasi memberikan efek mediasi negatif pada hubungan antara kepuasan kerja dengan intensi *turnover*, artinya pengaruh kepuasan kerja terhadap keinginan seseorang untuk *turnover* tidak secara langsung terjadi, namun melalui komitmen organisasi.

Sejauh yang teramati, hingga saat ini penelitian yang mengkaitkan antara *job insecurity* dengan *social exchange model* secara spesifik belum ditemukan. *Social Exchange Theory* (SET) mewakili teori yang paling banyak digunakan dalam literatur dalam ilmu sosial dan berpendapat bahwa tindakan pekerja yang tergantung pada reaksi dari pihak yang lain (Blau, 1964). SET merupakan teori yang paling tepat untuk menjelaskan mengenai *Organizational Citizenship Behaviour* (Organ, 1990) dan hubungan antara *Perceived Organizational Support* dan *Leader Member Exchange* (Wayne et. al., 1997) dan *Psychological Contract* (Barling J & Cooper C, 2008).

2. STUDI TERKAIT DAN HIPOTESA

2.1. Studi Terkait dan Hipotesa

2.1.1. Hubungan Job Insecurity dengan OCB

Pekerja yang menginginkan keamanan terhadap pekerjaannya di masa yang akan datang maka adanya ketidakamanan kerja (*Job Insecurity*) akan meningkatkan OCB-O dan menurunkan OCB-I (Wong et. al, 2005). Literatur yang ada menunjukkan adanya pengaruh negative dari perasaan *job insecurity* terhadap *extra-role behavior* (Jeurissa, 2009; Reisel, Chia, Maloles & Slacum, 2007 pada De Bree, 2010). Salah satu *extra role* tersebut adalah OCB (Feather & Rauter, 2004; Podsakoff, McKenzie, Paine & Bachrach, 2000; Wong, Wong, Ngo & Lui, 2005 pada De Bree, 2010) yang menyatakan bahwa *Job Insecurity* berpengaruh terhadap OCB. Feather & Rauter (2004) menemukan peningkatan *Job Insecurity* dan OCB pada pekerja kontrak. Brockner, Grover, Reed and Devit (1992) menyatakan bahwa pekerja yang takut akan kehilangan pekerjaannya akan memberikan tenaga lebih untuk menunjukkan bahwa dia masih berkualitas. Menurut SET, kinerja OCB akan menurun pada saat organisasi melanggar kewajiban untuk menyediakan keamanan kerja. Hasil *Job Insecurity* dan OCB masih diperdebatkan, hasil masih beragam (Wong et. al. 2005).

H1 : *Job Insecurity* berhubungan negatif dengan OCB

2.1.2. Hubungan Job Insecurity dengan LMX dan OCB

Wong, Ngo & Wong (2002) dalam penelitiannya mengenai tingkat kepercayaan supervisor terhadap organisasi dihubungkan dengan *job insecurity* dan *subordinate-supervisor guanxi* (hubungan antar pribadi) untuk menentukan tingkat *turnover* dan OCB. Hasil menunjukkan bahwa pekerja yang mengalami *job insecurity* akan secara positif terkait dengan tingkat kepercayaan terhadap organisasi dan tingkat *subordinate-supervisor guanxi* yang dimiliki karyawan berhubungan dengan kepercayaan kepada supervisor.

Penelitian yang mendukung usulan tentang kualitas pertukaran pada perilaku sikap atasan dan bawahan menemukan bahwa kualitas LMX yang tinggi dikarakteristikan dengan meningkatnya atensi dan dukungan pemimpin (Dansereau, Graen & Haga, 1973 pada Maurer & Shore, 2002). Bawahan dengan LMX tinggi akan menginvestasikan waktu lebih dalam pekerjaan dan memiliki sikap yang lebih baik terhadap pekerjaan dibandingkan dengan bawahan dengan LMX rendah.

Dari meta analisis yang dilakukan mengindikasikan bahwa kualitas LMX berhubungan positif dengan kompetensi, kepuasan, komitmen dan kejelasan peran serta berhubungan negatif dengan *role conflict*, *turn over intention* (Gerstner & Day, 1997 pada Polly, 2002). LMX dan OCB menjadi dasar bagi era baru dalam mengelola tenaga kerja yang beragam pada dunia global. Dipercayai bahwa hubungan LMX memberikan pengaruh penting terhadap kinerja perilaku (termasuk OCB).

Konsekuensinya, *subordinate* akan termotivasi untuk menjaga hubungan yang menyenangkan. Seseorang yang menerima manfaat dari orang lain mungkin secara tidak langsung akan cenderung untuk memberi balasan atau merasa memiliki kewajiban untuk membalas dan interaksi ini dikenal dengan timbal balik positif. Bentuk interaksi ini juga dapat diaplikasikan dalam konteks hubungan antara LMX dan OCB, karena ketika pemimpin percaya pada *subordinate* dan memberikan keuntungan tertentu kepadanya dalam arti memberikan otoritas yang lebih, dukungan yang lebih dan sebagainya, konsekuensinya *subordinate* akan mengembangkan perasaan dimana dia berharap untuk memberikan timbal balik pada pemimpin. Maka perilakunya bisa melebihi kontrak formal pekerja, yang dikenal dengan OCB. Sehingga LMX secara signifikan mempengaruhi tingkat OCB antar pekerja sebagai LMX kualitas tinggi yang akan memotivasi pekerja untuk melakukan peran lebih tanpa imbalan formal dari organisasi.

Shore, Bommer, and Tetrick (2002), menyatakan bahwa meningkatnya kualitas hubungan akan meningkatkan perilaku OCB. Literatur hubungan LMX dan *Job Insecurity* sangat jarang, sejumlah penelitian lebih menekankan pada POS yang ditemukan memiliki hubungan dengan LMX dan *supervisor support* (Rhoades & Eisenberger, 2002). Ada keterbatasan dalam riset akademis tentang hubungan topik LMX dengan *Job Insecurity*. Perlu penelitian lanjut hubungan *Job Insecurity* dengan LMX (Stacey –Lee Bolon, 2010). Pada berbagai penelitian menunjukkan bahwa LMX berhubungan dengan kinerja, OCB dan apa yang dilakukan oleh supervisor (Polly, 2002).

H2a : *Job Insecurity* berhubungan negatif dengan LMX

H2b : LMX memediasi hubungan antara *Job Insecurity* dengan OCB

H2c : LMX memoderasi hubungan antara *Job Insecurity* dengan OCB

2.1.3. Hubungan Job Insecurity dan POS dan OCB

Berdasarkan SET, tingginya POS akan mendorong pekerja untuk membalas melalui keterlibatan mereka dalam perilaku fungsional yang bernilai bagi organisasi. Berdasarkan evaluasi dari perilaku-perilaku sebelumnya maka pekerja percaya bahwa organisasi akan terus memperlakukan dengan baik di masa depan.

POS telah lama dikonsepsikan dalam SET (Eisenberger *et. al.*, 1986). Wayne *et. al.*, (1997) menyebutkan bahwa *social exchange relationship* merujuk pada kualitas pekerja terhadap pertukaran dengan organisasi dan supervisor. Bentuk hubungan ini dimanifestasikan melalui POS (*Perceived Organization Support*) dan supervisor dimanifestasikan melalui LMX (*Leader Member Exchange*). POS merujuk pada tingkat kepercayaan karyawan bahwa organisasi akan menghargai kontribusi mereka dan memperhatikan kesejahteraan mereka yang pada gilirannya akan mewajibkan karyawan untuk membalas dengan memberikan tindakan yang nilainya setara (Khanzani & Materson, 2011).

Tingginya POS yang diberikan kepada karyawan menunjukkan bahwa organisasi memperhatikan kesejahteraan karyawan dan melindungi mereka serta menyediakan material dan dukungan emosional ketika karyawan menghadapi situasi yang menekan. Sebaliknya individu dengan POS rendah percaya bahwa organisasi mengabaikan kepentingan terbaik mereka dan akan mengambil keuntungan dari mereka dan jika mungkin akan menggantikan mereka (Eisenberger *et al.*, 1986). Rosenblatt, Talmud dan Ruvio (1999) menekankan perspektif gender pada *job insecurity*. Bagi laki-laki *job insecurity* akan berpengaruh pada komitmen organisasi, keinginan untuk keluar dan *resistance to change*, sedangkan bagi wanita akan mempengaruhi seluruh sikap kerja termasuk persepsi tentang kinerja dan dukungan organisasi. POS telah terbukti berhubungan dengan pengukuran *Job Insecurity* (Hoffmann & Morgenson, 1999). Riset yang dilakukan oleh Rhoades and Eisenberger (2002), menemukan bahwa *Job Insecurity* berhubungan erat dengan POS.

Penelitian Hutchen (1997) menguji hubungan antara POS dengan komitmen afektif, *organizational dependability* menghasilkan bahwa POS berhubungan positif dengan inovasi karyawan, kehadiran, kinerja dan berhubungan negatif dengan *turn over intention*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa POS berhubungan dengan OCB, OCB mewakili *extra-role behaviour* (Wayne *et. al.*, 1997). POS merupakan prediktor bagi OCB-O, *turnover intention*, komitmen (Cropanzano & Mitchell, 2005).

Keterkaitan Job Insecurity dengan Social Exchange Model (Anna Partina dan Mugi Harsono)

Job insecurity juga dikaitkan dengan menurunnya kepercayaan terhadap organisasi (Ashford *et. al.*, 1989), menurunnya loyalitas terhadap organisasi (Loseby; 1992 pada Rosenblatt, Talmud dan Ruvio, 1999), menurunnya persepsi terhadap dukungan organisasi (Rosenblatt & Ruvio, 1996). *Job Insecurity* juga mempengaruhi komitmen organisasi, *resistance to change* dan kepercayaan. Dari penelitian Ashford *et al.* 1989, Turnley & Feldman, 2000 dan JIWI, 1999 menunjukkan bahwa ketidak pastian kondisi organisasi dan *job insecurity* akan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap organisasi.

Dukungan organisasi, yang dinotasikan dengan POS, terbukti berhubungan dengan pengukuran *Job Insecurity* (Hofmann & Morgeson, 1999). POS telah terbukti berhubungan dengan pengukuran *Job Insecurity* (Hoffmann & Morgenson, 1999). Riset yang dilakukan oleh Rhoades and Eisenberger (2002), menemukan bahwa *Job Insecurity* berhubungan erat dengan POS . Menurut Wayne *et. al.*, (1997) POS terbukti memprediksi OCB, *turnover* dan komitmen organisasi

H3a : *Job Insecurity* berhubungan negatif dengan POS

H3b : POS memediasi hubungan antara *Job Insecurity* dengan OCB

H3c : POS memoderasi hubungan antara *Job Insecurity* dengan OCB

2.2. Definisi Operasional dan Pengukuran

2.2.1. Job Insecurity (JI)

Job insecurity dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh De Witte (2000), yang mengukur tentang perasaan kehilangan kekuasaan untuk menjaga kesinambungan yang diinginkan dalam situasi kerja yang terancam. Terdiri dari 4 pertanyaan dengan skala likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju) dengan pertanyaan seperti saya takut akan kehilangan pekerjaan saya.

2.2.2. Perceived Organizational Support (POS)

Pertukaran (*exchange*) antara organisasi dan karyawan di fokuskan pada POS yang didefinisikan sebagai kepercayaan terkait dengan sejauhmana organisasi menilai kontribusi karyawan dan memperhatikan kesejahteraannya (Eisenberger *et. al.*, 1986). *Perceived Organizational Support* dikembangkan oleh Eisenberger, Cummings, Armeli dan Lynch (1997).

Untuk penelitian ini digunakan *short version of Survey of Perceived Organizational Support* (SPOS) untuk menilai tingkat kontribusi organisasi yang dirasakan dan perhatiannya terhadap kesejahteraan. SPOS terdiri dari 8 item dari 36 item yang memiliki nilai *loaded* yang tinggi pada factor POS yang dilaporkan oleh Eisenberger et al, (1986) dan di aplikasi secara luas pada berbagai organisasi.

2.2.3. Leader Member Exchange (LMX)

Pertukaran antara karyawan dan supervisor difokuskan pada teori LMX (Dansereau, Graen & Haga, 1974 pada Polly, 2002). Hubungan kepemimpinan yang menguntungkan di karakteristik dengan tingginya kepercayaan, interkasi, dukungan dan imbalan baik secara formal maupun informal (Dienesch & Liden, 1986).

Pengukuran LMX menggunakan LMX7 yang dikembangkan oleh G. B. Graen & Uhl-Bien, (1995). LMX ini akan diukur hanya pada pendapat dari *subordinate* terhadap pemimpinnya (*leader*). Terdiri dari 7 pertanyaan dengan skala 5.

2.2.4. Organizational Citizenship Behaviour (OCB)

Konsep OCB (Organ, 1989) adalah perilaku individual yang secara tidak langsung atau eksplisit dimana tindakan tersebut diakui secara resmi dalam sistem *reward* yang formal dan secara agregat menawarkan efisiensi dan efektivitas fungsi organisasi. OCB yang digunakan dikembangkan oleh William dan Anderson (1991), terdiri dari 9 pertanyaan sehingga seluruh.

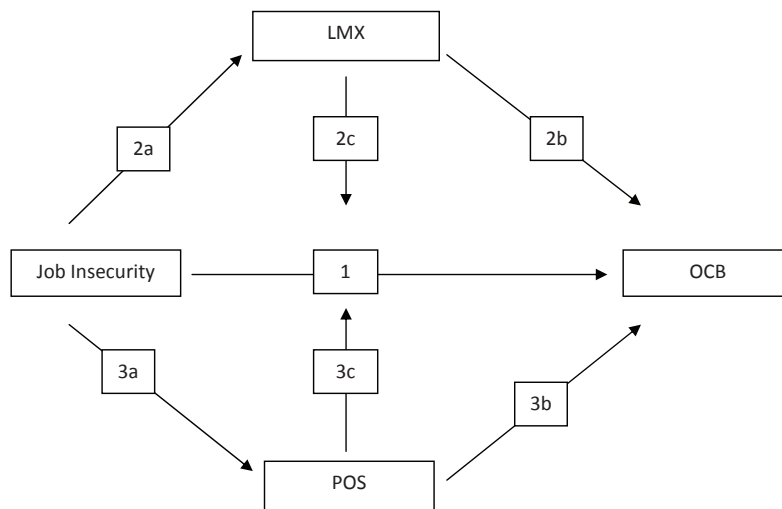
3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua *outsourcing* di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Alasan pemilihan lokasi penelitian karena praktik pekerja kontrak telah menjadi hal yang lazim, bahkan menurut harian Joglo Semar (15 Oktober 2011), pemerintah kota Yogyakarta akan menambah jumlah pekerja *outsourcing* lebih dari 400 orang untuk tenaga teknis.

3.2. Model Penelitian

Kerangka pikir pada penelitian ini adalah :



Gambar 2.
Kerangka Pikir Penelitian

3.3. METODE ANALISIS DATA

3.3.1. Teknik Koleksi Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik survei sampel yang bertujuan untuk mendapatkan data opini individu melalui metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertutup kepada responden. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan bantuan kuesioner dengan pernyataan tertutup yang menggunakan skala likert. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling method*. Sampel harus memenuhi kriteria berupa responden yang bekerja sebagai tenaga kerja *outsourse*.

3.3.2. Pengujian Instrumen

3.3.2.1. Pengujian Validitas

Pada tahap awal penelitian, peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen penelitian. Validitas merupakan suatu taraf sejauh mana suatu instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini dilakukan pengujian validitas dengan *confirmatory factor analysis* pada model pengukuran (*measurement model*). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian validitas konstruk dengan *confirmatory factor analysis*. Peneliti menentukan *faktor loading* 0,5 sesuai dengan yang disarankan Hair *et al.* (2006) yang menyatakan bahwa *faktor loading* $\pm 0,3$ adalah tingkat minimal (*the minimal level*), $\pm 0,5$ adalah signifikan secara praktek (*practically significant*) untuk jumlah sampel 100 atau lebih.

3.3.2.2. Pengujian Reliabilitas

Langkah pengujian selanjutnya adalah pengujian kelengkapan statistik yang kedua, yaitu reliabilitas. Reliabilitas skala menunjukkan konsistensi internal (*internal consistency*) dari skala tersebut untuk mengukur variabel laten. Skala yang reliabel memiliki item yang mengukur konstruk yang unidimensional dan berubah bersama secara statistic.

3.4. Teknik Analisis Data

Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berjenjang (*Hierarchical Regression Analysis*). Analisa regresi berjenjang merupakan metode statistic untuk menguji hipotesis dimana terdapat *moderator effect* pada hubungan antara variable *independen* dan *dependen* dipengaruhi oleh independen dan dependen dipengaruhi oleh variable independen lainnya (Hair *et. al.* 2006). Ketika variable moderator (sebagai variabel independen ke 2) merubah bentuk hubungan antara dependen dan independen variabel.

Dalam analisis regresi berjenjang terdapat pola hubungan yaitu : efek utama (*main effect*), efek interaksi 2 variabel (*two ways interaction effect*) dan efek interaksi tiga variable (*three way interaction effect*). Persamaan dasar pada analisis ini adalah :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2$$

b_0 = intercept
 b_1X_1 = linear effect dari X_1
 b_2X_2 = linear effect dari X_2
 $b_3X_1X_2$ = moderator effect dari X_2 dan X_1

Sehingga persamaan dalam penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned} (1) \text{ LMX} &= \alpha + \beta 1\text{JI} + \varepsilon \\ \text{OCB} &= \alpha + \beta 1\text{JI} + \varepsilon \\ \text{OCB} &= \alpha + \beta 1\text{JI} + \beta 2\text{LMX} + \varepsilon \\ (2) \text{ POS} &= \alpha + \beta 1\text{JI} + \varepsilon \\ \text{OCB} &= \alpha + \beta 1\text{JI} + \varepsilon \\ \text{OCB} &= \alpha + \beta 1\text{JI} + \beta 2\text{POS} + \varepsilon \\ (3) \text{ LMX} &= \alpha + \beta 1\text{OCB} + \varepsilon \\ \text{OCB} &= \alpha + \beta 1\text{JI} + \varepsilon \\ \text{OCB} &= \alpha + \beta 1\text{JI} * \beta \text{LMX} + \varepsilon \\ (4) \text{ POS} &= \alpha + \beta 1\text{JI} + \varepsilon \\ \text{OCB} &= \alpha + \beta 1\text{JI} + \varepsilon \\ \text{OCB} &= \alpha + \beta 1\text{JI} * \beta 2\text{POS} + \varepsilon \end{aligned}$$

Model 1 menguji peran mediasi dari LMX dalam hubungan antara *Job insecurity* dengan OCB. Model 2 menguji peran mediasi dari POS dalam hubungan antara *Job insecurity* dengan OCB. Sedangkan Model 3 menguji peran pemoderasi dari LMX dalam hubungannya antara *Job Insecurity* dengan OCB dan model ke 4 menguji peran pemoderasi dari POS dalam hubungannya dengan *Job Insecurity* dengan OCB.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2012 sampai dengan Februari 2012. Jumlah kuesioner yang disebarkan ada 250 eksemplar, dari jumlah tersebut kuesioner yang kembali berjumlah 170 eksemplar. Dari 170 data yang kembali tidak semua dapat digunakan karena ada beberapa data yang tidak diisi dengan lengkap sehingga untuk proses pengujian pada penelitian ini hanya sebanyak 155 (*respon rate* 62%). Rincian responden terlihat pada table berikut :

Tabel 1.
Profil Responden

| Variabel | Kategori | Jumlah | Persen |
|--------------------|-------------------------|--------|--------|
| Jenis Kelamin | Pria | 95 | 61 |
| | Wanita | 60 | 39 |
| Umur | 20 – 25 | 88 | 57 |
| | 26 – 30 | 67 | 43 |
| Tingkat Pendidikan | SMP | 1 | 0.6 |
| | SMA | 67 | 43.4 |
| | Perguruan Tinggi | 87 | 56 |
| Pekerjaan | Customer Service | 46 | 30 |
| | Office Boy | 9 | 6 |
| | Security | 12 | 8 |
| | Marketing/Sales | 14 | 9 |
| | Administrasi | 9 | 6 |
| | Mekanik | 3 | 2 |
| | Lain (driver,kasir,dll) | 62 | 39 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian.

4.2. Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas konstruk dilakukan dengan *confirmatory factor analysis*. Hasil uji validitas terlihat pada Tabel 2 :

Tabel 2.
Factor Loading Instrumen Pengukuran

| Konstruk | Butir | | Factor Loading | |
|----------------------------------|--------|------|----------------|---------|
| | Jumlah | Kode | Sebelum | Sesudah |
| Leader Member Exchange | 7 | LMX1 | 0,418 | |
| | | LMX2 | 0,297 | |
| | | LMX3 | 0,592 | 0,582 |
| | | LMX4 | 0,531 | 0,416 |
| | | LMX5 | 0,389 | |
| | | LMX6 | 0,611 | 0,609 |
| | | LMX7 | 0,714 | 0,847 |
| Perceived Organizational Support | 8 | POS1 | 0,731 | 0,791 |
| | | POS2 | 0,782 | 0,816 |
| | | POS3 | 0,186 | |
| | | POS4 | 0,271 | |
| | | POS5 | 0,356 | 0,293 |
| | | POS6 | 0,371 | 0,318 |
| | | POS7 | 0,371 | |
| | | POS8 | 0,383 | 0,292 |

**Keterkaitan Job Insecurity dengan Social Exchange Model
(Anna Partina dan Mugi Harsono)**

| | | | | |
|----------------|---|-------|-------|-------|
| OCB | | OCB8 | 0,603 | 0,546 |
| | | OCB9 | 0,514 | 0,516 |
| | | OCB10 | 0,677 | 0,835 |
| | | OCB11 | 0,541 | 0,592 |
| | | OCB12 | 0,463 | |
| | | OCB13 | 0,261 | |
| | | OCB14 | 0,527 | |
| | | OCB15 | 0,554 | 0,443 |
| | | OCB16 | 0,605 | |
| Job Insecurity | 4 | J1 | 1,000 | |
| | | J2 | 1,000 | |
| | | J3 | 0,555 | |
| | | J4 | 0,312 | |

Sumber: Pengolahan Data pada Lampiran 3.

Hasil analisis Goodness of fit indices tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3.
Goodnes of fit indices Instrumen Penelitian

1. LMX

| Goodness of fit Index | Awal | Setelah item lmx 12,13,14,16 dihilangkan | Keterangan | |
|-----------------------|--------|--|-------------|---------|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| Chi square | 48,312 | 1,158 | Besar | Kecil |
| Probabilitas | 0,00 | 0,560 | Kurang baik | Baik |
| RMSEA | 0,819 | 0,000 | Baik | Baik |
| GFI | 0,910 | 0,996 | Baik | Baik |
| AGFI | 0,819 | 0,981 | Kurang baik | Baik |
| CFI | 0,809 | 1,000 | Kurang baik | Baik |

2. POS

| Goodness of fit Index | Awal | Setelah item POS 3,4,7 dihilangkan | Keterangan | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|-------------|---------|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| Chi square | 124,954 | 17,198 | Besar | Kecil |
| Probabilitas | 0,000 | 0,004 | Kurang baik | Baik |
| RMSEA | 0,185 | 0,125 | Baik | Baik |
| GFI | 0,829 | 0,956 | Kurang baik | Baik |
| AGFI | 0,692 | 0,869 | Kurang baik | Baik |
| CFI | 0,559 | 0,902 | Kurang baik | Baik |

3. OCB

| Goodness of fit Index | Awal | Setelah item ocb 13,7,5,1,3,11,9,12 dihilangkan | Keterangan | |
|-----------------------|---------|---|-------------|---------|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| Chi square | 123,873 | 11,019 | Besar | Kecil |
| Probabilitas | 0,000 | 0,510 | Kurang baik | Baik |
| RMSEA | 0,153 | 0,088 | Baik | Baik |
| GFI | 0,708 | 0,958 | Kurang baik | Baik |
| AGFI | 0,769 | 0,974 | Kurang baik | Baik |
| CFI | 0,708 | 0,958 | Kurang baik | Baik |

4. JI

| Goodness of fit Index | Awal | Keterangan |
|-----------------------|-------|------------|
| | | Sebelum |
| RMSEA | 0,000 | Baik |
| GFI | 1,000 | Baik |
| AGFI | 0,996 | Baik |
| CFI | 1,00 | Baik |

Hasil analisa AVE dan *construct validity* terlihat pada Tabel 4. berikut :

Tabel 4.
AVE dan Construct Validity

| Konstruk | AVE | CR |
|----------|-------|-------|
| LMX | 0,400 | 0,715 |
| POS | 0,383 | 0,714 |
| OCB | 0,362 | 0,729 |
| JI | 0,579 | 0,785 |

Konstruk laten yang mempunyai reliabilitas yang tinggi memiliki nilai 0,70 keatas, hasil perhitungan menunjukkan semua konstruk bernilai lebih dari 0,70 berarti seluruh konstruk valid dan reliabel.

4.3. Hierarchical Regresion Analysis

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis 1, 2a dan 3a, sedangkan variable LMX dan POS sebagai variable pemediasi hubungan antara *Job Insecurity* dengan OCB dan variable LMX dan POS sebagai variable pemoderasi hubungan antara *Job Insecurity* dan OCB (hipotesis 2b, 2c, 3b dan 3c) diuji dengan *hierarchical regresion*. Hasil analisa menunjukkan :

Tabel 5.
Korelasi Antar Variabel

| Variabel | OCB | POS | LMX | JI |
|----------|--------|----------|----------|----------|
| OCB | 1 | 0,364 | 0,040 | -0,017 |
| POS | 0,132 | 1 | 0,364** | -0,189** |
| LMX | 0,040 | 0,364** | 1 | -0,264** |
| JI | -0,017 | -0,189** | -0,264** | 1 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Keterkaitan Job Insecurity dengan Social Exchange Model
(Anna Partina dan Mugi Harsono)**

Tabel 5. menunjukkan hubungan antar variable penelitian. Hasil menunjukkan bahwa hubungan antara JI dengan OCB negatif hal ini berarti mendukung H1 ($\beta = -0,017$). Sedangkan hipotesa 2a yang menyatakan adanya hubungan negative antara JI dengan LMX juga didukung ($\beta = -0,264$; $p = 0,01$). Hasil memberikan bukti adanya dukungan untuk hipotesis 3a yaitu adanya hubungan negative antara JI dengan POS ($\beta = -0,189$; $p = 0,01$).

Untuk menguji apakah variable LMX dan POS memediasi dan memoderasi hubungan antara JI dengan OCB maka dilakukan uji regresi bertingkat :

**Tabel 6.
Hierarchical Regression Analysis**

| Variabel | Standardized Coefficient | R | R ² | Adjusted R ² | F | ΔR^2 |
|---------------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------|--------|--------------|
| LMX sebagai mediating variable | | | | | | |
| JI – LMX | -0,264 | 0,264 | 0,070 | 0,064 | 11,505 | |
| JI – OCB | -0,017 | 0,017 | 0,000 | -0,006 | 0,043 | -0,070 |
| OCB – (JI+LMX) | -0,108 | 0,108 | 0,012 | 0,005 | 1,997 | 0,012 |
| POS sebagai mediating variable | | | | | | |
| JI – POS | -0,189 | 0,189 | 0,036 | 0,029 | 5,657 | |
| JI – OCB | -0,017 | 0,017 | 0,000 | -0,006 | 0,043 | -0,036 |
| OCB – (JI+POS) | 0,200 | 0,200 | 0,040 | 0,034 | 6,362 | 0,040 |
| LMX sebagai moderating variable | | | | | | |
| JI - LMX | -0,264 | 0,264 | 0,070 | 0,064 | 11,505 | |
| JI – OCB | -0,017 | 0,017 | 0,000 | -0,006 | 0,043 | -0,070 |
| OCB – (JI*LMX) | -0,077 | 0,077 | 0,006 | 0,000 | 0,916 | 0,006 |
| POS sebagai moderating variable | | | | | | |
| JI - POS | -0,189 | 0,189 | 0,036 | 0,029 | 5,657 | |
| JI – OCB | -0,017 | 0,017 | 0,000 | -0,006 | 0,043 | -0,036 |
| OCB – (JI*POS) | 0,142 | 0,142 | 0,020 | 0,014 | 3,217 | 0,020 |

Tabel 6. menunjukkan sebagai berikut :

LMX sebagai variable mediating. Tahap pertama besarnya $R^2 = 0,264$ ($F = 11,505$; $p = 0,001$). Berarti JI secara signifikan menjelaskan varians LMX secara signifikan sebesar 0,264. Tahap kedua menunjukkan $\Delta R^2 = -0,070$ ($F \text{ change} = 0,043$; $p = 0,836$) yang berarti JI tidak secara signifikan menjelaskan varians OCB. Tahap ketiga dengan menambahkan interaksi antara JI dan LMX, hasil menunjukkan $\Delta R^2 = 0,012$ ($F \text{ change} = 1,797$; $p = 0,182$ dan $b = -0,108$; $p = 0,182$). Meski ada tambahan penjelasan varians OCB sebesar 0,012 tetapi interaction effect tidak signifikan, sehingga LMX tidak memediasi hubungan antara JI dengan OCB.

POS sebagai variable pemediasi. Tahap pertama besarnya $R^2 = 0,189$ ($F = 5,659$; $p = 0,019$). Berarti JI tidak secara signifikan menjelaskan varians LMX. Tahap kedua menunjukkan $\Delta R^2 = -0,036$ ($F \text{ change} = 0,043$; $p = 0,836$) yang berarti JI tidak secara signifikan menjelaskan varians OCB. Tahap ketiga dengan menambahkan interaksi antara JI dan POS, hasil menunjukkan $\Delta R^2 = 0,040$ ($F \text{ change} = 6,362$; $p = 0,013$ dan $b = 0,200$; $p = 0,013$). Meski ada tambahan penjelasan varians OCB sebesar 0,040 tetapi interaction effect tidak signifikan, sehingga POS tidak memediasi hubungan antara JI dengan OCB.

LMX sebagai variable pemoderasi. Tahap pertama besarnya $R^2 = 0,264$ ($F = 11,505$; $p = 0,001$). Berarti JI secara signifikan menjelaskan varians LMX secara signifikan sebesar 0,264. Tahap kedua menunjukkan $\Delta R^2 = -0,070$ ($F \text{ change} = 0,043$; $p = 0,836$) yang berarti JI tidak secara signifikan menjelaskan varians OCB. Tahap ketiga dengan menambahkan interaksi antara JI dan LMX, hasil menunjukkan $\Delta R^2 = 0,006$ ($F \text{ change} = 0,916$; $p = 0,340$ dan $b = -0,077$; $p = 0,340$). Meski ada tambahan penjelasan varians OCB sebesar 0,006 tetapi interaction

effect tidak signifikan, sehingga LMX tidak memoderasi hubungan antara JI dengan OCB.

POS sebagai variable pemoderasi. Tahap pertama besarnya $R^2 = 0,189$ ($F = 5,659$; $p = 0,019$). Berarti JI tidak secara signifikan menjelaskan varians LMX. Tahap kedua menunjukkan $\Delta R^2 = -0,036$ ($F \text{ change} = 0,043$; $p = 0,836$) yang berarti JI tidak secara signifikan menjelaskan varians OCB. Tahap ketiga dengan menambahkan interaksi antara JI dan POS, hasil menunjukkan $\Delta R^2 = 0,020$ ($F \text{ change} = 3,127$; $p = 0,0079$ dan $b = 0,142$; $p = 0,079$). Meski ada tambahan penjelasan varians OCB sebesar 0,020 tetapi *interaction effect* tidak signifikan, sehingga POS tidak memoderasi hubungan antara JI dengan OCB.

4.4. Pembahasan

Hasil analisa regresi yang memberikan dukungan pada hipotesa 1, 2a dan 3a dimana dihipotesakan adanya hubungan negative antara JI dan OCB, LMX dan POS. Hubungan antara JI dan OCB masih kontradiktif karena hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara JI dengan OCB (Feather & Rauter, 2004 ; Brocker, Grover, Reed and Devit, 1992). Sedangkan penelitian lain menunjukkan hubungan negatif antara JI dengan OCB (Jeurissa, 2009; Reisel, Chia, Maloles & Slacum, 2007 pada De Bree, 2010) dan menurut SET kinerja OCB akan menurun pada saat organisasi melanggar kewajiban untuk menyediakan keamanan kerja. Hasil *Job Insecurity* dan OCB masih diperdebatkan, hasil masih beragam (Wong Tim *et al.* 2005). Hasil penelitian mendukung bahwa JI berhubungan negative dengan OCB. Karyawan menurunkan *extra-role behaviournya* ketika merasakan ancaman terhadap kelangsungan pekerjaan pada masa yang akan datang.

Hipotesa 2a menyatakan bahwa JI berhubungan negative dengan LMX. Hipotesa ini didasarkan pada penelitian sebelumnya bahwa kepercayaan karyawan terhadap supervisor atau atasan sangat member pengaruh terhadap tingkat *turnover* dan OCB. Tetapi penelitian yang secara khusus mengkaitkan JI dengan LMX masih sangat terbatas (Rhoades & Eisenberger, 2002). Keterbatasan dalam riset akademis tentang hubungan topik LMX dengan *Job Insecurity* perlu ditindak lanjuti (Stacey –Lee Bolon, 2010). LMX menggambarkan tingkat kepercayaan bawahan dengan atasan (Setton, Bennet & Liden, 1996 ; Wayne *et al.*,1997), sehingga ketika *job insecurity* meningkat maka kepercayaan karyawan terhadap atasannya akan menurun. Pekerja dengan kualitas LMX yang tinggi akan melihat bahwa atasan adalah seorang yang kompeten mampu memotivasi dan dapat dipercaya (Graen & Scandura, 1997 ; Sparrow & Liden, 1997).

Hipotesa 2b dan 2c yang menyatakan bahwa LMX memediasi dan memoderasi hubungan antara JI dengan OCB, hasil analisa menunjukkan bahwa LMX ternyata tidak memediasi maupun memoderasi hubungan antara JI dengan OCB. Hal ini dikarena karena hubungan JI dengan LMX dari berbagai penelitian belum dapat dipastikan meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa LMX merupakan predictor bagi OCB (Polly, 2002; Wayne *et al.*, 1997)

Hipotesa 3a menyatakan adanya hubungan negative antara JI dengan POS didasarkan pada penelitian-penelitian dari Hoffmann & Morgenson, 1999; Rhoades and Eisenberger, 2002). POS dikonsepsikan dalam SET (Eisenberger *et al.*,1986). Wayne *et al.*, (1997) menyebutkan bahwa *social exchange relationship* merujuk pada kualitas pekerja terhadap pertukaran dengan organisasi dan supervisor. Bentuk hubungan ini dimanifestasikan melalui POS (*Perceived Organization Support*) dan supervisor dimanifestasikan melalui LMX (*Leader Member Exchange*).

POS merujuk pada tingkat kepercayaan karyawan bahwa organisasi akan menghargai kontribusi mereka dan memperhatikan kesejahteraan mereka yang pada gilirannya akan mewajibkan karyawan untuk membalas dengan memberikan tindakan yang nilainya setara (Khazani & Materson, 2011). Tingginya POS yang diberikan kepada karyawan menunjukkan bahwa organisasi memperhatikan kesejahteraan karyawan dan melindungi mereka serta menyediakan material dan dukungan emosional ketika karyawan menghadapi situasi yang menekan. Sebaliknya individu dengan POS rendah percaya bahwa organisasi mengabaikan kepentingan terbaik mereka dan akan mengambil keuntungan dari mereka dan jika mungkin akan menggantikan mereka (Eisenberger *et al.*, 1986).

POS telah terbukti berhubungan dengan pengukuran *Job Insecurity* (Hoffmann & Morgenson, 1999). Riset yang dilakukan oleh Rhoades and Eisenberger (2002), menemukan bahwa *Job Insecurity* berhubungan erat

dengan POS. Sehingga hasil penelitian mendukung konsep dan penelitian sebelumnya.

Hipotesis 3b dan 3c dimana POS memediasi dan memoderasi hubungan antara JI dengan OCB, hasil menunjukkan bahwa POS tidak mampu memediasi maupun memoderasi hubungan JI dengan OCB. Meski dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa POS merupakan prediktor bagi OCB-O, *turnover intention*, komitmen (Cropanzano & Mitchell, 2005). Tetapi dalam penelitian ini ternyata POS bukanlah prediktor bagi OCB seperti yang dinyatakan oleh Rhoades and Eisenberger (2002) bahwa *Job Insecurity* berhubungan erat dengan POS dan POS terbukti memprediksi OCB, *turnover* dan komitmen organisasi Wayne *et. al.*, (1997).

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengkaitkan antara *job insecurity* dengan *social exchange model*, dimana diprediksikan bahwa *Job insecurity* akan berhubungan negative dengan OCB, LMX dan POS, serta diharapkan variable POS dan LMX akan memediasi dan memoderasi hubungan antara *Job insecurity* dengan OCB. Dari hasil analisa regresi dan *hierarchical regression analysis* menunjukkan bahwa ada hubungan negative antara JI dengan OCB, LMX dan POS tetapi variable LMX dan POS tidak mampu menjadi variable pemediasi dan pemoderasi antara JI dan OCB.

Berbagai keterbatasan pada penelitian ini antara lain dari sisi responden sebagian besar responden adalah laki-laki (61%), menurut Rosenblatt, Talmud dan Ruvio (1999) pada penelitian mengenai konstruk *job insecurity multidimensional* menemukan pengaruh *job insecurity* kepada laki-laki dan wanita secara signifikan berbeda. Laki-laki lebih merasa tidak aman dan menekankan hal-hal *financial*, sementara untuk wanita lebih menekankan pada pekerjaan mereka. *Job insecurity* mempengaruhi sikap kerja secara berbeda antara laki-laki dan wanita, bagi laki-laki berkaitan dengan komitmen organisasional, *intention to leave* dan *resistance to change*. Sedangkan bagi wanita mempengaruhi seluruh aspek pekerjaan. Penelitian ini tidak menempatkan *gender* sebagai variable control sehingga dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian.

Perlu mempertimbangkan jumlah item pertanyaan dan menggunakan berbagai instrument penelitian yang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tanpa merubah kemampuannya mengukur berbagai variable penelitian yang digunakan. Penelitian ini juga belum mampu untuk menggambarkan fenomena *job insecurity* dengan jelas, karena keterbatasan metodologi, perlu penelitian yang bersifat longitudinal atau mix research untuk mampu menggambarkan fenomena *job insecurity* yang lebih baik.

Untuk penelitian berikutnya perlu memperluas definisi SET seperti pendapat Barling & Cooper (2008) yang menyatakan bahwa *psychological contract* merupakan bagian dari SET. SET menekankan bahwa satu pihak akan menerima manfaat dari tanggung jawab atau kewajiban dari pihak lain sebagai bagian dari hubungan timbal balik (Gouldner, 1960). Kewajiban ini melekat erat pada konsep *psychological contract*. Schein (1980) menyatakan bahwa *psychological contract* adalah penggambaran dari *exchange relationship* antara individu dengan organisasi. Berbagai variabel *job attitudes* dan *organizational outcomes* dapat memberi pengaruh terhadap hubungan variabel yang diteliti seperti komitmen, justice perception, kepuasan dan *turnover intention*. Selain itu untuk mempertajam pengukuran maka OCB dapat dipisahkan menjadi lebih detail berupa OCB-I dan OCB-O.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashford, Lee & Bobko, (1989), Content, Causes and Consequences of Job Insecurity : a Theory-Based Measure and Substantive Test, *Academy of Management Journal*, 32 (4), pp. 803 – 829.
- Barling, J & Cooper C., (2008), *Handbook of Organizational Behavior*. Sage.
- Beunders, E., (2010), *Together to A High Level : An Investigation of Individuals Citizenship Behaviour in A Rapidly Changing Environment*. Dissertation.
- Blau, P.M., (1964), *Exchange and Power in Social Life*. New York ; Wiley.
- Bolino M.C., Turnley W.H., and Neihoff B.P., *The Other Side of The Story : Reexamining Prevailing Assumptions*

- About Organizational Citizenship Behaviour, *Human Resource Management Review*, 24, pp. 229 – 246.
- Bounocore F, C. Mettalo, and D. Salvatore., Behavioral Consequences of Job Insecurity and Perceived Insider Status for Contingent Worker. Universita Degli di Napoli "Parthenope".
- Brocker, S., Graver, S., Reed.,T.F, and Dewitt. R.L., (1992), Layoff's Job Insecurity and Survivor's Work Effort : Evidence of An Interved – U Relationship, *Academy of Management Journal*, 35 (2), pp. 413 – 425.
- Chowwen, C., and I. Emilia, (2009), Job Insecurity and Motivation Among Women in Nigerian Consolidated Banks, *Gender in Management : An International Journal*, 24 (5), pp. 316 - 326.
- Connelly, C.E, and Daniel G. Gallagher, (2004), Emerging Trends in Contingent Work Research, *Journal of Management*, 30 (6), pp. 959–983.
- Cropanzano, R., and M.S. Mitchell, (2005), Social Exchange Theory : An Interdisiplinary Review, *Journal of Management*.
- De Bree , I., (2010), Job Insecurity and OCB : A Literature Review in Search of Their Relationship. Bachelor Tesis Organization and Strategy, June 2010.
- De Witte, H., (2005), Job Insecurity : Review of The International Literatur on Definitions, Prevalance, Antecedents and Consequences, *SA Journal of Industrial Psychology*, 31 (4), pp. 1 - 6.
- Dienesch, R.M., and Liden, R.C., (1986), LMX Model of Leadership : A Critique & Futher Development, *Academy Management Review*, (11), pp. 618 – 634.
- Eisenberger. R, R. Huntington, S. Hutchinson, and D. Sowa, (1986), Perceived Organizational Support. *Journal of Applied Psychology*, 71(3), pp. 500 – 507.
- Emerson, R.M., (1876), Social Exchange Theory, *Annual Review of Sociology*, Vol. 2, pp. 335 – 362.
- Ferrie J.E.,MJ Shipley., SA Stansfels., and M.G Marmot, (2002), Effect of Chronic Job Insecurity and Change in Job Insecurity on Self Reported Health, Minor Psychiatric Morbidity, Physiological Measures, and Health Related Behavior in British Civil Servants : The Whitehall II Study, *J Epidemical Community Health*, 56, pp. 450 – 454.
- Gallagher, T., (2008), A Quantitative Study of EVLN Respons to Psychological Contract Breach. *Edamba Summer Academy*, pp. 1-10.
- Gallagher, T., (2008), An Exploratory Study of The Antecedent of Psychological Contract Breach. *Disertation*.
- Ghozali, I., (2004), *Konsep dan Aplikasi Dengan Program Amos 16.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greenhalgh, L. & Rosenblatt G., (1984), Job Insecurity : Toward Conceptual Clarity, *Academy of Management Review*, 9 (3), pp. 438 – 448.
- Graen, G. B., and T.A. Scandura, (1987), Toward A Psychology of Dyadic Organizing, *Research in Organizational Behaviour*, 175, pp. 175 – 208.
- Hair, J. K., Anderson, R. F., tatham, R. L., and Black, W. C., (1998), *Multivariate Data Analyses*. Prentice Hall.
- Hellgren, J., M. Sverke, and K. Isaksson, (1999), A two dimensional approach to job insecurity : consequences for employee attitudes and well being, *Europen Journal of work and organizational psychology*, 8 (2), pp. 179 - 195.
- JIWIS (Job Insecurity and Work Intensification Survey), (1999).
- Kalleberg, Anne L., (2000), Non- Standard Employment Relations : Part-Time, Temporary and Contractwork, *Annual Review Social*, 26, pp. 341 – 365.
- Khanzani, S., and S.S. Materson, (2011), Who and What is Fair Matters : A Multifoci Social Exchange Model of Creativity, *Journal Organizational Behaviour*, (32), pp. 86 – 106.
- King, M. L., (2008), Job Insecurity at the International of labor Market and Welfare State Structure. *Disertation*.
- Liden, R.C., and Maslyn J.M., (1998), Multidimensionality of Leader Member Exchange : An Empirical Assessment Through Scale Development, *Journal of Management*, 24 (1), pp. 43 – 72.
- Loi. R, Hang-Yue Ngo, Ling-Ing Zhang, and Victor P. Lau, (2011), The Interaction Between LMX and Perceived Job Insecurity in Predicting Employee Altruism and Performance, *Journal of Occupational and Organizational Psychology*.

**Keterkaitan Job Insecurity dengan Social Exchange Model
(Anna Partina dan Mugi Harsono)**

- Maurer T.J and L.M. Shore, (2002), Perceived Beneficiary of Employee Development Activity : A Three – Dimensional Social Exchange Model, *Academy of Management Review*, 27 (3), pp. 432 – 444.
- Meltzer H., P. Bebington, T. Brugha, R. Jenkins, S. McManus, and S. Stansfeld, (2010), Job Insecurity, Socio-Economic Circumstances and Depression, *Psychological Medecine*, 40, pp. 1401 - 1407.
- Mohr, G.B., (2000), The changing significance of different stressors after the announcement of bankruptcy : a longitudinal investigation with spcial emphasis on job insecurity, *Journal of Organizational Behavior*, 13, pp. 339 – 356 .
- Moosa, S., (2010), Downsizing-An in – Depth Study, *Asia Pasific Journal of Social Science* : II (1), pp. 124 – 147.
- Ndonga B.N., (2002), Peter Blau’s Conception of Social Exchange Theory : A Critique, *The Eastern Afrika journal of Humanities & Science*, 1 (1), pp. 1 – 6.
- Novliadi, F., (2009), Hubungan Antara Perspesi Terhadap Organisasi Pembelajaran dengan Job Insecurity . *Thesis*.
- Organ, D. W., (1990), The motivational basis of organizational citizenship behavior, *Research in Organizational Behavior*, 12, pp. 43 – 72.
- Organ D.W., and M. Konovsky, (1989), Cognitive Versus Affective Determinants of Organizational Citizenship Behaviour, *Journal of Applied Psychology*, 74 (1), pp. 157 – 164.
- Pasewak, W.R., and Strawser, J.R., (1996), The Determinants and Outcomes Associated with Job Insecurity in A Professional Accounting Environment, *Behavioral Research in Accounting*, 8, pp. 127 - 139.
- Polivka, A. E., (1996), Contingent and Alternative Work Arrangements, Defined, *Monthly Labor Review*. October, pp. 3 – 9.
- Polly, L.M., (2002), Social Exchange and Customer Service : The Relationship Between Perceived Organizational Support, LMX, and Customer Service Behaviour. *Disertation*.
- Rhoades, L., and R. Eisenberger, (2002), Perceived Organizational Support : A Review of The Literature, *Journal of Applied Psychology*, Vol. 87 (4), pp. 698 – 714.
- Rosenblatt, Z., and A. Ruvio, (1996), A Test of A Multidimensional Model of Job Insecurity: The Case of Israeli teachers, *Journal of Organizational Behavior*, 17, pp. 587 - 605.
- Rosenblatt, Z.,I. Talmud, and A. Ruvio, (1999), A gender-based framework of the experience of job insecurity and its effect on work attitudes, *Europen Journal of work and organizational psychology*, 8 (2), pp. 197 – 218.
- Roskie, E., Luis-Guerin,C., and Fournier, C., (1993), Coping with job insecurity:how does personality make a difference? *Journal of Educational Administration*, 14, pp. 617 – 630.
- Rugulies, R., B Aust, H Brurr, and U Bultmann, (2008), Job Insecurity, Chance on Labour market and Decline in Self-Rated Health in a Representative Sampel of the Danish Workforce, *J Epidemic Community Health*, 62, pp. 245 – 250.
- Sahid,S., (2008), Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dengan Job Insecurity. *Skripsi. Tidak dipublikasikan*.
- Salmieri, L., (2009), Job Insecurity, Flexibility and Home Work Balance for Italian Couples in Non-Standard Class, *European Review*, 17 (1), pp. 93 – 120.
- Sekaran, U., (2003), *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach*. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc.
- Setianingrum, A., Harlina Nurtjahjanti dan Achamd Mujad Maskur, (2008), Hubungan antara job insecurity dengan komitmen kontinuan pada karyawan pelaksana produksi PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus, hlm., 1 -11.
- Stacey Lee Bolon, (2010), Leader Member Exchange as a Moderating Variabel in The Relationship Between Job Security and Well Being. *Disertation*.
- Sverke, M. & Hellgren, J., (2002), The nature of job insecurity: Understanding employment insecurity on the brink of a new millennium, *Applied Psychology : An International Review*, 51(1), pp. 23 – 42.
- Tjandraningsih. I, Rina Herawati, dan Suhadmadi, (2010), Diskriminatif dan Eksploitatif, Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh Di Sektor Industri Metal di Indonesia. Akatiga. Bandung.
- Turnley, W.H. & Feldman, D.C., (2000), Resistance to change-examining the effect of psychological contract

- violations; unmet expectation and job satisfaction as mediators, *Journal of Organizational Behaviour*, 21, pp. 25 – 42.
- Wagner, J., (1998), Downsizing Effect on Organizational Development Capabilities at an Electronic Utility, *Human Relation Management Sociology Research*. 15 (1), pp. 1 – 7.
- Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R. C., (1997), Perceived Organizational Support and Leader Member Exchange: A Social Exchange Perspective, *Academy of Management Journal*, 40, pp. 82–112.
- Wening, N., (2005), Pengaruh ketidak amanan kerja (*job insecurity*) sebagai dampak restrukturisasi terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi dan intense keluar survivor. *Kinerja*. 9 (2), pp. 135 – 147.
- Wong-Yui Tim, Hang-Yue Ngo, and Chi-Sum Wong, (2002), Affective Organizational Commitmen of Worker in Chinese Joint Venture, *Jurnal of Managerial Psychological*. 17 (7), pp. 580 – 598.
- Wong-Yui Tim, Chi Sum Wong, Hang-Yue Ngo and Samuel Lui Chi, (2003), The Social Exchange and Instrument Perpective Employee Response to Job Insecurity, *Chinese Management Review*, 6 (1), pp. 1 – 18.

LAND CONVERSION AND FARMERS PREFERENCE¹

Catur Sugiyanto
Professor, Faculty of Economics and Business, UGM

Budiono Sri Handoko
Lecturer, Faculty of Economics and Business, UGM

Dwi Nugroho
Alumni, Magister of Economic Development UGM and the Officer of Sleman Regency

Abstract

This paper reports the assessment of what factors determines farmer's decision to convert their farm land (rice field) into other uses, especially business and residential. We sampled 40 farmers in Sleman Regency, Yogyakarta as a case. In addition to their social characteristics, we asked them the willingness to accept for their land if someone else wants to buy and convert it into other uses (residential or business) and how much the compensation their asked if the regency of Sleman ask them to preserve it.

Based on the farmers expected return from their farming and their social characteristics, we found that farmers tend to preserve their land. This decision is supported when they have other sources of income, farm their own land, have larger size of land, and the further from the urban. Such information is useful to the Regency of Sleman once it needs to preserve its farming area to increase the water catchment and the reduce of the green house effect of converting the farm land (rice field) into residential or business. This is true to the fields close to the urban areas.

Keywords: *land conversion, future price, farming, and sustainable farm land.*

1. INTRODUCTION

Research on Agriculture Use Value has been done for years. Shi et al. (1997:94) for example, found that income from farming, capital gain and the impact of urban growth determine the farm land value in West Virginia. The expected future development of land was applied in Orange County, California, (Plantinga and Miller (2001:58). The value of land may be derived from the expected flow of income from farming and from non farming activities. The difference between the optimal value of the land and the income flow from farming is the Value Development Right. Livanis et al. (2005:3) developed further the VDR including the capital gain if land is converted into the urban. Hailu and Brown (2007:151) employed the Growth Equilibrium Model showed that the population growth, employment and per capita income from the neighboring farm land determine the farm land value in Maryland, Pennsylvania and West Virginia. Variation in the factors influence the land value and the method of estimating them indicate that there is no single factor and method that can be applied to any farm land. Research in this area is important to the fast growing region with high farm land conversion.

As experience in the other growing cities, Sleman regency also has a high land conversion rates. Between 2005 and 2008 the land conversion rate was 2 percent. The number of land conversion application was also ranked the highest in 2008 (204), with the wetland farm land size up to 81,762 meter square and 8,324 meter squares dry land.

¹ This paper is part of Nugroho's Master of Economic Development thesis at UGM 2010 with extensive comments from Sugiyanto's and Handoko's. As usual, we responsible for any errors and omission. Correspondence: caturugiyanto@yahoo.com

Undervaluing the land is the common factor determines the high conversion rate. The failure to internalize the externalities and the growth of the urban area raise the farmland conversion, (Hailu and Brown, 2007:149). Even if the government set the area be the land conservation area, incomplete information about compensation also keep the land conversion rate increasing. This paper reports the assessment of what factors determines farmer's decision to convert their farm land (rice field) into other uses, especially business and residential. We sampled 40 farmers in Sleman Regency, Yogyakarta as a case. In addition to their social characteristics, we asked them the willingness to accept for their land if someone else wants to buy and convert it into other uses (residential or business) and how much the compensation they ask if the Regency of Sleman ask them to preserve it.

In general the size of the land, the distance between the land and the closes road, education, age, share of income from farming, and the number of child determine the level of willingness to accept and the compensation. Moreover, based on their expected return from the farming and their social characteristics, we found that farmers tend to preserve their land. This decision is supported when they have other sources of income, they are getting older, have smaller number of child, and have higher education. Such information is useful to the Regency of Sleman once it needs to preserve its farming area to increase the water catchment and the reduce of the green house effect of converting the farm land (rice field) into residential or business. This is true to the fields close to the urban areas.

One difficulty the farmers experience are how to determine their expected income (returns) from their farming. This is because of their limited information on future prices. Moreover, the monopsonist practice in buying the paddy limit the option the farmers have in setting their selling prices that limit the value of income stream from their land.

We propose that should the Regency of Sleman and other need to preserve their farm -lands, they could do so by increasing the opportunity of young farmers generation to obtain better education and out of farm jobs. In short, providing better information about price to farmers and improve the competitive market of paddy can increase the farmers expected income and the likelihood to preserve their land.

This paper is outlined as follows. Next, we discuss the methodology followed by the data used for this research. Section four discusses the estimation results and the last section, section 5, concludes.

2. METHODOLOGY

One way to assess the acceptability of a program is the Random Utility Model. This model can be used to elicit the choice or decision of the land owner on what the highest value to their land to respond the land conversion program (discrete choice model Miller et al. 2008:4 also Lancaster 2008:). The decision made by the land owner will be the maximum, minimum, or any value of their land. In their model, the preference of individual (i) on choice a is written as:

$$U_a^i = V_a^i + \varepsilon_a^i$$

V_a^i = explicit characteristics of the farmers

ε_a^i = random factors.

The RUM model thus is:

$$V = X\beta + \varepsilon$$

V be factors determine the land owner decision to maximize their utility. These include land characteristics, social-demographic and also other personal characteristics.

Thus, the decision to conserve or not to conserve or acceptance to the program is model in a logistic function. (Miller et al. 2008:5 and Dorfman et al. 2009:125).

$$\ln[P_i / (1 - P_1)] = \alpha + \beta_1 Luas + \beta_2 Jarak + \beta_3 Usia + \beta_4 Edu + \beta_5 Porsi + \beta_6 Garap + \beta_7 Anak + \varepsilon$$

$$\ln[P_i / (1 - P_1)] = \alpha + \beta_1 Luas + \beta_2 Jarak + \beta_3 Usia + \beta_4 Edu + \beta_5 Porsi + \beta_6 Garap + \beta_7 Anak + \varepsilon$$

Where:

1. $\ln[P_i / (1 - P_1)]$ be the log odd ratio to accept the conservation program (1= accept the program, 0= not to join the program)
2. α constant be the minimum log odd ratio
3. *Luas* = be the land size (meter squares)
4. *Jarak* = distance between the farmland and the main road Yogyakarta-Godean (kilometer)
5. *Usia* = age (year)
6. *Edu* = education (Elementary=6, Secondary=9, High school=12, Diploma=15 and Bachelor=17)
7. *Porsi* = share of farm income to the total farm income
8. *Garap* = a dummy variable = 1 if the farmer farms his own land =0 if the farmer farms other people's land.
9. *Anak* = number of children in the family
10. *E* = random error

3. DATA

Primary sample data is used in this research. First, all of the famers in the farm land block are given an open question about their opinion on land conservation and the size of land. We then selected the first class land and plan to do a simple random sampling on these farmers having the first class land. But not all of the farmers can answer the question. We finally interview only farmers who can answer the question. We start with the head of the farmers group followed by the most experienced farmers. We visit farmers two times. At the first stage, we collect information necessary to estimate the value of their land. Then, we revisit them to ask their willingness to join the program.

The distribution of the selected farmers is as follows: in the block Bulak Kruwet there are 6 (six) farmers, block Bulak Sumberan 8 (eight) farmers. Block Bulak Ngentak Ponggok 8 (eight) person, Bulak Summersari 14 (fourteen) person, and Bulak Kaliurang 5 (five) persons. So that the total respondents is 40 (forty) persons. All of the farmers are in the sub reGENCY of Moyudan Kabupaten Sleman.

4. RESULTS AND DISCUSSION

As mentioned, the analysis consists of three stages: first, we estimate the optimum land value and the land value it self. Based on these calculation, we define the different is the value development right. Then, we ask farmers if they would joint the conservation program by using the value of development right as a base for compensation. Finally, we characterize who will accept the offer price, the value development right, as a base for compensation. The results are as follows.

First, we estimate the optimum land value. We use the average projected farm income of all 40 farmers. We found that the income share only 39 percent of the optimum land estimate by farmers. Thus, the 61 percent attributed to the non-agricultural use. The distance to the city opens the possibility of converting the farm land into residential and business.

As Plantinga and Miller (2001) mentioned, the *Non-Agriculture Use* also fall into the *Value Development Right*. In this research, we calculate the value development right is the different between the land value and the optimal land value. The optimal land value is the owner expected value based on the best alternative land use under the current information available to the farmer. In practice, such calculation is difficult task to farmers, therefore we use the offer price as if some one will buy the land. We assume that the buyer will use the land for non farming activities, but for residential of business. The estimated coefficients are as follows:

Table 1.
The Percentage Land Value per Block

| No | Block | The Average Land Value | The Average VDR | The Optimum Land value |
|----|------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Kruwet | 29 | 61 | 100 |
| 2 | Sumberan | 40 | 60 | 100 |
| 3 | Ngentak | 30 | 70 | 100 |
| 4 | Sumbersari | 48 | 52 | 100 |
| 5 | Kaliurang | 27 | 73 | 100 |

Source: author estimation based on the survey. These complete estimation can be obtained from the authors upon request.

The above value indicates that Summersari experiences the least threat from the urban growth because its land value is about the same as the VDR. The higher the VDR indicates that the farmer has high expectation (value) on non farming type of land use. Consequently, the higher the VDR the higher the compensation requested by farmer to conserve their farmland.

Second, the land value based on the *Agriculture Use Value* and the *Value Development Right* are used to offer the farmer would their join the land conservation program. In this case we use simple contingent valuation, offering a *discrete choice* to the farmer with *single bounded / take it or leave it* method whether to joint or not to joint the program. We ask the farmer three questions:

1. will the farmer joint the conservation program even if the income from farming is lesser than that of other income?
2. will the farmer joint the conservation program even if the income from farming is not as good as that of other income and the government compensation to those who joint.
3. those who joint the program, will he change his mind if the offering is set between the minimum and maximum VDR forever.

From the above scenarios then we ask the farmers if they would accept the offer price. All of the farmers agree to conserve their land but when it comes to the compensation they have different opinion. Those who decide to join the program means accept the offer price but those who refuse means asking higher price. From 40 farmers, 21 of them agree to accept the VDR as a base for compensation while the 19 farmers asking for higher price.

Finally, the Logistic model is used to estimate the probability (the odd ratio) of willingness to accept the program in relation the characteristics of the farmers. The summary of the estimated parameters are reported in the following table.

Table 2.
Estimated Parameters of the Farmers Willingness to Accept the Program

| No. | Variable | Coefficient | Std. Error | Z Statistic | Prob |
|-----|--------------------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 1 | Constant | 1,881507 | 5,696991 | 0,330263 | 0,7412 |
| 2 | Luas | 0,002137 | 0,001058 | 2,020695 | 0,0433 |
| 3 | Jarak | -0,000759 | 0,000489 | -1,55099 | 0,1209 |
| 4 | Usia | -0,042977 | 0,075173 | -0,57172 | 0,5675 |
| 5 | Edu | -0,029217 | 0,190776 | -0,15315 | 0,8783 |
| 6 | Porsi | -5,387334 | 2,155851 | -2,49894 | 0,0125 |
| 7 | Garap | 2,908922 | 1,581772 | 1,839027 | 0,0659 |
| 8 | Anak | -0,141493 | 0,328977 | -0,4301 | 0,6671 |
| | Mc.Fadden R ² | 0,499512 | | | |
| | LR | 27,64884 | | | 0,000255 |

Notes: To save some space we do not include the detail of the estimation results. These can be obtained from the author upon request.

We found that the size of the land (Luas), the proportion of farm income to the total (Porsi), and Garap which represent whether the owner or somebody else do the farm determine the likelihood of the farmer to joint the program. Other variables, distance (Jarak), farmers education (Edu), number of children (Anak), and the farmer's age (Usia) do not significantly influence the likelihood of the farmer to joint the program.

The higher the size of the land increases the probability for farmer to accept the program. The wider the land size the higher the land value that may increase the portion of the land value to its total. Therefore the value development right will be small that increase the probability of accepting the program since the alternative (the offer) is not so appealing. Also those who has small land size maybe the farming income is also a small portion to the total income. Selling the small land size for non farm type of use will benefit the most. We confirm that the higher the portion of the income from the farming (Porsi) the higher the compensation the farmer want, if they have to conserve. When farmer do the farming, they tend to keep them or will likely to conserve.

5. CONCLUSION

This paper reports the assessment of what factors determine farmer's decision to convert their farm land (rice field) into other uses, especially business and residential. In addition to their social characteristics, we asked them the willingness to accept for their land if someone else wants to but and convert it into other uses (residential or business) and how much the compensation their asked if the regency of Sleman ask them to preserve it.

Based on the farmers expected returns from their farming and their social characteristics, we found that farmers tend to preserve their land. This decision is supported when they have other sources of income, farm their own land, have larger size of land, and the further from the urban. Such information is useful to the Regency of Sleman once it needs to preserve its farming area to increase the water catchment and the reduce of the green house effect of converting the farm land (rice field) into residential or business. This is true to the fields close to the urban areas.

REFERENCES

- Aizaki, Hideo, Sato, Kazuo and Osari, Hiroshi, (2006), "Contingent Valuation Approach In Measuring The Multifunctionality Of Agriculture and Rural Areas In Japan", *Paddy Water Environ* 4: 217-222.
- BPS Sleman, (2009), "Sleman Dalam Angka 2009".
- BPS Yogyakarta, (2009), "Yogyakarta Dalam Angka 2009".
- BPS, (2009), "Statistik Nilai Tukar Petani Di Indonesia 2009".
- Chiueh, Ya Wen and Chen, Ming Chien, (2008), "Environmental Multifunctionality Of Paddy Fields In Taiwan An Application Of Contingent Valuation Method", *Paddy Water Environ* 6: 229-236.
- Dorfman, Jeffrey H., Barnett, Barry J., Bergstrom, John C., and Lavigno, Bethany, (2009), "Searching for Farmland Preservation Markets: Evidence from Southeastern US", *Land Use Policy* vol. 26, issue 1.121-129.
- Fisher, Jeffrey D. and Martin, Robert S., (1994), "Income Property Valuation", Real Estate Education Company.
- Hailu, Yohannes G. and Brown, Cheryl, (2007), "Regional Growth Impacts On Agricultural Development: A Spatial For Three States", *Agricultural and Resource Economic Review*, 149-163.
- Hanson, Steven D., (1999), "A Simple Framework For Determining The Fundamental Agricultural-Use Value of Michigan Farmland", Department Of Agricultural Economics Michigan State University.
- Irawan, Bambang, (2005), "Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatan dan Faktor Determinan", *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol. 23 No. 1.1-18.
- Jefferies, Rodney L., (2009), "A Brief History and Development of Real Value Valuation Models the For Decades", Farm Management And Property Department, Commerce Division Lincoln University New Zealand.
- Livanis, Grigorios, Moss, Charles B., Breneman, Vincent E., and Nehring, Richard F., (2005), "Urban Sprawl And Farmland Price", *International Agricultural Trade And Policy Center Florida Agricultural Experiment Station Journal Series* No. XXXX.

- Miller, D. Ashley, Bastian, Christopher T., McLeod, Donald M., Keske, Catherine M., and Hoag, Dana L., (2008), "Determinants Of Agricultural Landowners Willingness To Supply Open Space Through Conservation Easement", *American Agricultural Economics Annual Meeting*.
- Plantinga, Andrew J. and Miller, Douglas J., (2001), "Agricultural Land Values and the Value of Right to Future Land Development", *Land Economics* 77(1): 56 – 67.
- Shi, Yue Jin, Phipps, Timothy T., and Colyer, Dale, (1997), "Agricultural Land Values Under Urban Influences", *Land Economics* vol.73, no.1 pp.90-100.
- Sitivanides, Petros, Southard Jon, Torto, Raymond G., and Weathon, William C., (2001), "The Determinant of Appraisal-Based Capitalization Rates", Torto Weathon Research <http://www.tortoweathonresearch.com>.
- Sumaryanto, Friyatno and Irawan, (2006), "Konversi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian dan Dampak Negatifnya", Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor.
- Yokoyama, Shigeki, (1995), "Agricultural Diversification and Institutional Change: A Case Study of Tenancy Contract in Indonesia", *The Developing Economics*, XXXIII-4, 375-396.

INDIKATOR-INDIKATOR PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (MODIFIKASI MODEL PENGUKURAN DOAMEKPOR)

Muhammad Iqbal
Alumni Program Magister Sains Universitas Gadjah Mada

Abdul Halim
Universitas Gadjah Mada
Email: abhalim58@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to test Doemekpor's measurement model that has been modified in order to clarify the revenue and expenditure of local government in Indonesia. Doemekpor's previous research shows some indicators that explain the revenue and expenditure of local government in United State by using measurement model.

In accordance with Doamekpor's research, three construct have been used; they are General Revenue and General Expenditure (GRGE), Uncontrollable Revenue and Expenditure (UNC), and Miscellaneous Revenue and Expenditure (MISRE). Research sampel are 65 provinces/cities in Indonesia. Testing is conducted by using Partial Least Square (PLS).

Research result shows different output with the Doamekpor's research. Some valid and reliable indicators explain the three hypothesized construct include M1, M2, real time, transfer, and financing. However, when the correlation test with actual data of revenue and expenditure of local government done, only transfer and financing are correlated significantly with actual data of revenue and expenditure of local government.

Keywords : *measurement model, revenues and expenditure of local government, and PLS.*

1. LATAR BELAKANG

Reformasi organisasi sektor publik di hampir seluruh dunia yang berlangsung sejak lebih dari satu dasawarsa yang lalu tidak lantas meniadakan permasalahan di organisasi sektor publik, utamanya pemerintahan. Di organisasi pemerintahan permasalahan yang mencuat adalah masalah anggaran dan penganggaran. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penganggaran adalah kesulitan para pengambil kebijakan dan pegawai pemerintahan dalam melakukan proyeksi pendapatan dan belanja pemerintah. Indikator-indikator dalam melakukan proyeksi pendapatan dan belanja menjadi sebuah studi yang banyak menarik minat peneliti di bidang penganggaran. Hasilnya memang cukup beragam, dan terus menarik untuk diteliti.

Pada tahun 2007, Doamekpor melakukan sebuah studi terkait indikator-indikator pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Amerika Serikat. Doamekpor meneliti dan menguji indikator-indikator pendapatan dan belanja dengan membentuknya ke dalam sebuah model yang disebut Model Pengukuran (*Measurement Model*).

Penelitian Doamekpor merupakan lanjutan dari berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang menguji variabel-variabel yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.

Di Indonesia, permasalahan proyeksi pendapatan dan belanja juga masih menjadi permasalahan, sekalipun sistem penganggaran telah mengalami perbaikan. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang menguji variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan belanja pemerintah daerah secara simultan ke dalam sebuah model sebagaimana yang dilakukan oleh Doamekpor.

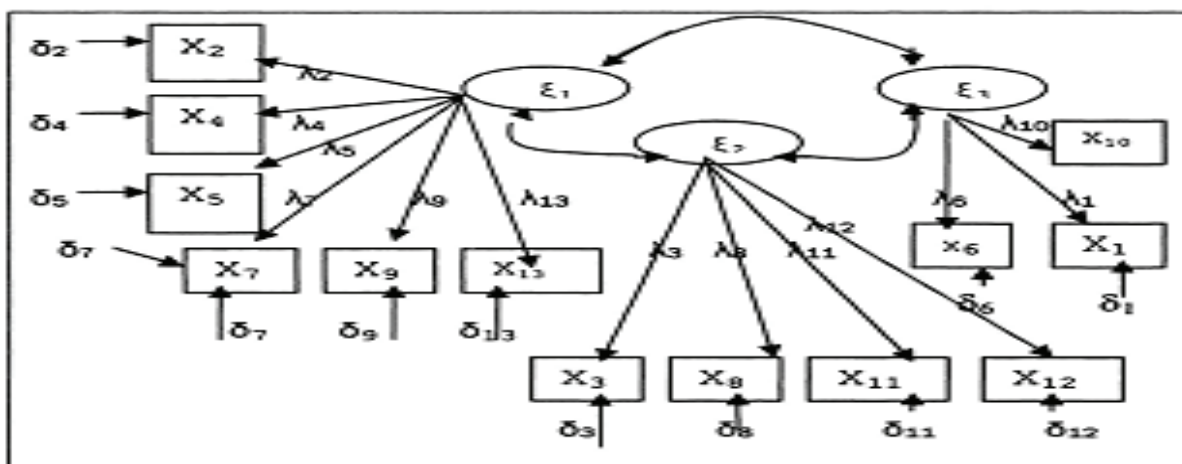
Tulisan ini, yang merupakan hasil penelitian, dengan sedikit melakukan modifikasi bermaksud menguji model pengukuran Doamekpor tersebut dalam menjelaskan pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Indonesia. Penggunaan kata modifikasi dikarenakan adanya perbedaan antara kondisi antara Amerika Serikat dan Indonesia, karena beberapa indikator dalam penelitian Doamekpor tidak terdapat di Indonesia atau karena adanya perbedaan pengukuran indikator antara kedua negara.

2. MODEL PENGUKURAN DOAMEKPOR

Model pengukuran Doamekpor membagi pendapatan dan belanja pemerintah ke dalam 3 konstruk, yaitu Pendapatan Umum dan Belanja Umum (*General Revenue and General Expenditure/ GRGE*), Pendapat dan belanja yang tidak dapat dikontrol (*Uncotrollable/ UNC*), dan Pendapatan dan belanja lain-lain (*Miscellaneous Revenue and Expenditure/ MISRE*). Masing-masing konstruk (variabel laten) terdiri beberapa variabel amatan yang diharapkan dapat menjelaskan masing-masing konstruk tersebut.

Sebagaimana dijelaskan di awal, studi Doamekpor didasarkan dari berbagai penelitian terdahulu. Tigabelas variabel amatan dalam penelitian Doamekpor merupakan rangkuman dari variabel-variabel yang diuji sebelumnya secara satu persatu oleh Case, Rosen, dan Hines (1993) serta Feenberg dan Rosen (1987) yang menemukan bahwa tingkat dan proyeksi pendapatan dan belanja pemerintah dipengaruhi oleh *fiscal stress* dan makro ekonomi.

Selanjutnya, terkait dengan pengaruh kekuatan politik, beberapa penelitian telah menguji apakah kompetisi partai dan ideologi politik dapat mempengaruhi peramalan pendapatan dan belanja pemerintah. Sebagai contoh, Bretschneider, Gorr, Grizzle, dan Klay (1989) dalam Sun (2005) menemukan bahwa ketika terdapat partai atau ideologi yang secara politik mendominasi dalam suatu negara maka akurasi peramalan pendapatan akan menurun. Penelitian yang sama, Jones et al (1997) menyatakan bahwa peningkatan akurasi proyeksi fiskal terjadi bila faktor input kelembagaan, politik, dan sosial dipertimbangkan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sapir dan Sekkat (2002) juga menemukan bahwa pemilu di Jerman berdampak pada variabel makroekonomi negara lainnya di eropa dan juga berdampak pada perilaku kebijakan anggaran dimana terjadi peningkatan defisit anggaran. Berikut ini gambar model pengukuran Doamekpor :



Sumber: Doamekpor (2007).

Gambar 1.
Model Pengukuran (*Measurement Model*) Doamekpor

Variabel-variabel amatan Model Doamekpor di atas adalah:

- X1 = Tingkat pertumbuhan per kapita transfer antar pemerintah
- X2 = Tingkat pertumbuhan per kapita agregat moneter 2
- X3 = *Real Time*
- X4 = Tingkat pertumbuhan per kapita agregat moneter 1
- X5 = Tingkat pertumbuhan per kapita *disposable income*
- X6 = Tingkat pertumbuhan per kapita utang jangka panjang
- X7 = Tingkat pengangguran nasional
- X8 = Inflasi
- X9 = Tingkat pertumbuhan populasi
- X10 = Obligasi jangka panjang pemerintah daerah
- X11 = Faktor lingkungan
- X12 = Politik
- X13 = Tingkat pekerja nasional.

3. PEMILIHAN SAMPEL DAN SUMBER DATA

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerbitkan laporan keuangannya selama periode penelitian (2007-2009).
 - Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki data lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.
- Berdasarkan data yang diperoleh, hanya 65 pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian karena hanya 65 pemerintah kabupaten/kota tersebut yang memiliki data sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

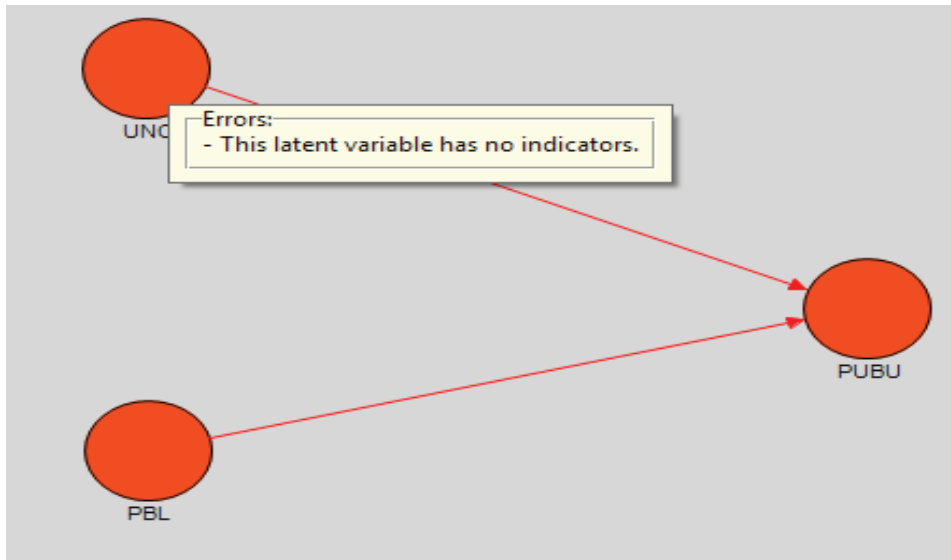
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistika (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan berbagai media baik cetak maupun internet. Data untuk variabel tingkat pertumbuhan populasi, tingkat pekerja, tingkat pengangguran, uang beredar (M1 dan M2), pendapatan regional perkapita, serta inflasi diperoleh dari BPS. Sementara dokumen APBD diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga dari DJPK untuk sebagai pelengkap, sementara variabel lain semisal politik dan lingkungan diperoleh dari berbagai publikasi melalui media baik cetak maupun internet.

4. PEMBAHASAN

Analisis atas data yang diperoleh menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Tahapan ini melalui beberapa prosedur antara lain:

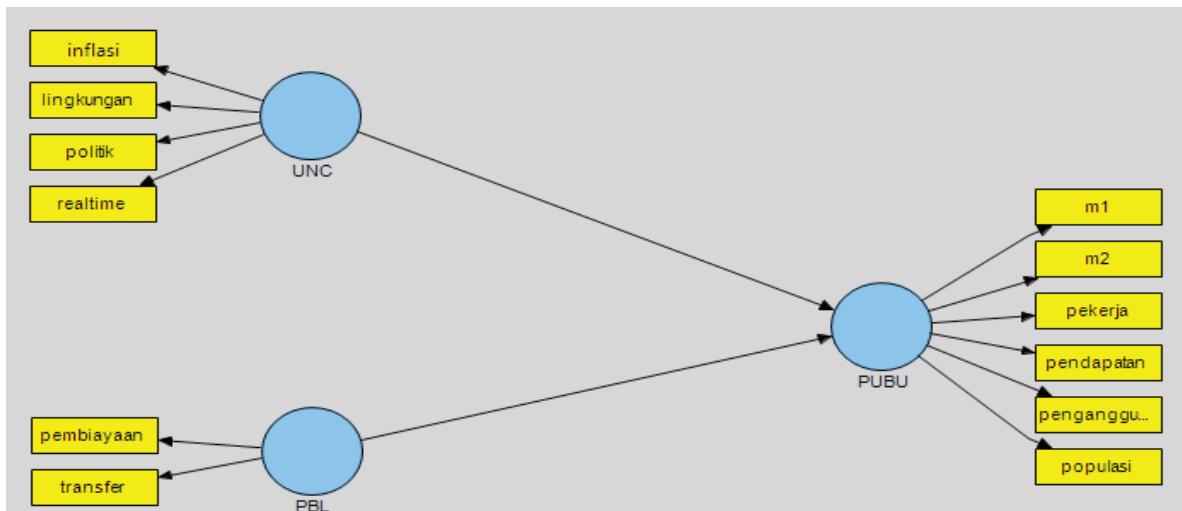
- 1) Merancang Model Struktural

Model struktural ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2.
Model Struktural

- 2) Merancang Model Pengukuran
Model pengukuran untuk analisis jalur ditunjukkan pada gambar 3 di bawah ini:



Gambar 3.
Model Pengukuran

- 3) Evaluasi Model Pengukuran
Hasil analisis iterasi algoritma PLS untuk model pengukuran ditunjukkan pada gambar dan tabel berikut ini:

Tabel 1.
Overview Iterasi Algoritma PLS

| | AVE | Composite Reliability | R Square | Cronbachs Alpha | Communality | Redundancy |
|------|----------|-----------------------|----------|-----------------|-------------|------------|
| PBL | 0.931403 | 0.964479 | | 0.928100 | 0.931403 | |
| PUBU | 0.336213 | 0.528564 | 0.927326 | 0.126244 | 0.336213 | 0.002536 |
| UNC | 0.334799 | 0.016766 | | -0.313119 | 0.446398 | |

a) Uji Validitas

➤ Validitas Konvergen

Pengujian validitas konvergen menggunakan *factor loading*, *AVE*, dan *communality* sebagai parameternya. Nilai loading yang ditunjukkan tabel di atas menunjukkan bahwa hanya indikator M1, M2, Pembiayaan, Realtime, dan Transfer yang memiliki nilai loading di atas 0,7. Pada langkah selanjutnya nanti, indikator-indikator yang memiliki nilai loading dibawah 0,7 akan di drop dari model sebelum dilakukan pengujian model struktural.

Berdasarkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dan *Communality*, model pengukuran juga masih belum memenuhi syarat validitas konvergen. Hal ini nampak dari masih terdapatnya konstruk yang memiliki nilai AVE lebih kecil dari 0,5. Nilai AVE yang diatas 0,5 hanya pada konstruk PBL, sementara konstruk UNC dan PUBU, masing-masing hanya memiliki nilai 0.334799 dan 0.336213. Begitu pula dengan nilai *communality*, hanya konstruk PBL yang memiliki nilai lebih besar dari 0,5, sedangkan kedua konstruk lainnya memiliki nilai lebih kecil dari 0,5.

➤ Validitas Diskriminan

Parameter yang digunakan dalam uji validitas diskriminan adalah nilai *cross loading*. Berikut *tabel cross loading*:

Tabel 2.
Cross Loading

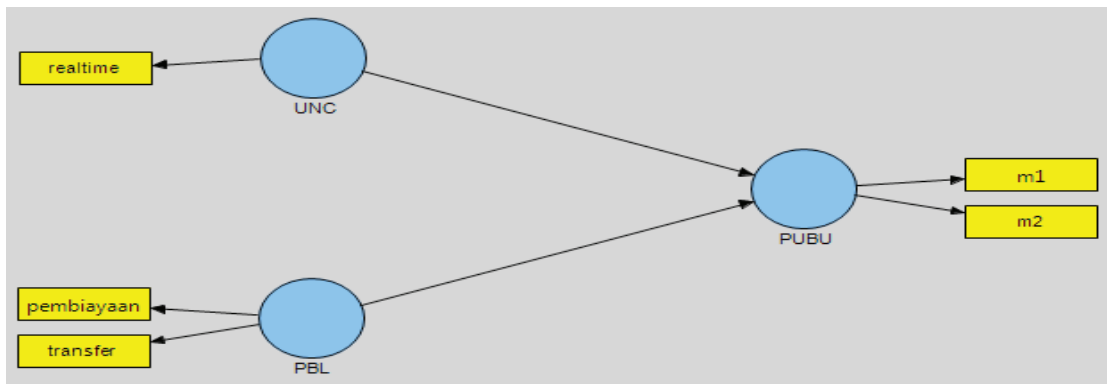
| | PBL | PUBU | UNC |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Inflasi | -0.073679 | -0.551755 | -0.710335 |
| Lingkungan | | | |
| m1 | 0.064358 | 0.950192 | 0.967416 |
| m2 | 0.065313 | 0.952286 | 0.910761 |
| Pekerja | -0.040680 | 0.302074 | 0.160634 |
| Pembiayaan | 0.975881 | 0.133525 | 0.089204 |
| Pendapatan | 0.381461 | 0.143267 | 0.097476 |
| pengangguran | 0.040680 | -0.302074 | -0.160634 |
| Politik | 0.140287 | -0.018487 | 0.009817 |
| Populasi | 0.860418 | 0.067389 | 0.052033 |
| Realtime | 0.065431 | 0.954196 | 0.913523 |
| Transfer | 0.954181 | 0.097409 | 0.060019 |

b) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam PLS menggunakan menggunakan dua metoda, yaitu *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability*. Berdasarkan tabel, nilai *cronbach's alpha* masing konstruk adalah 0,928100 untuk

konstruk PBL, 0,126244 untuk konstruk PUBU, dan -0,313119 untuk konstruk UNC. Sementara nilai *composite reliability* masing konstruk adalah 0,931403 untuk PBL, 0,336213 untuk PUBU, dan 0,446398 untuk UNC.

Berdasarkan nilai *loading* data tabel di atas, beberapa indikator yang didrop adalah inflasi (X7), lingkungan (X8), pekerja (X4), pendapatan (X3), pengangguran (X2), politik (X9), dan populasi (X1). Sementara yang bertahan dalam model adalah M1 (X5), M2 (X6), pembiayaan (X12), *real time* (X10), dan transfer (X11). Berikut ini gambar model pengukuran setelah beberapa variabel didrop:



Gambar 4.
Model Pengukuran Hasil Analisis

Hasil analisis dengan menggunakan iterasi logaritma PLS atas model di atas terlihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Overview Iterasi Algoritma PLS Setelah Drop

| | AVE | Composite Reliability | R Square | Cronbachs Alpha | Communality | Redundancy |
|------|----------|-----------------------|----------|-----------------|-------------|------------|
| PBL | 0.926376 | 0.961761 | | 0.928100 | 0.926376 | |
| PUBU | 0.934755 | 0.966277 | 0.947080 | 0.930514 | 0.934755 | 0.000483 |
| UNC | 1.000000 | 1.000000 | | 1.000000 | 1.000000 | |

Tabel di atas menunjukkan adanya perbaikan validitas dan reliabilitas setelah beberapa indikator yang memiliki nilai *loading* dibawah *rule of thumb* dikeluarkan dari model. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) ketiga konstruk tersebut telah memenuhi *rule of thumb*, yaitu di atas 0,5, begitupula dengan *communality* masing-masing konstruk. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan *cronbach's alpha* memperlihatkan bahwa masing-masing konstruk tidak ada lagi yang memiliki nilai dibawah 0,7. Pengujian *composite reliability* juga demikian, ketiganya masing-masing PUBU 0,966277, UNC 1, dan PBL 0.961761.

Jadi, secara umum model yang telah mengalami pendropan di atas telah memenuhi syarat uji validitas dan reliabilitas model pengukuran PLS. Hal ini juga mendukung bahwa konstruk-konstruk valid dan reliabel ditunjukkan oleh variabel-variabel amatan. Langkah selanjutnya adalah menguji model struktural.

4) Evaluasi Model Struktural

Proses evaluasi model struktural dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap *R Square* (R²). Nilai R² yang dihasilkan dari iterasi algoritma PLS ditunjukkan dalam tabel 3. Nilai R² pada tabel 3 di atas sebesar

Indikator-Indikator Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia
(Muhammad Iqbal dan Abdul Halim)

0,947080. Angka ini berarti bahwa model yang diajukan dapat menjelaskan konstruk PUBU sebesar 94,71 persen, selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Nilai koefisien jalur atau inner model ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.
Koefisien jalur (Path Coefficient; Mean, STDEV, T-Values)

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | Standard Error (STERR) | T Statistics (O/STERR) |
|-------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| PBL -> PUBU | 0.003774 | 0.001966 | 0.015340 | 0.015340 | 0.246047 |
| UNC -> PUBU | 0.972915 | 0.972831 | 0.002693 | 0.002693 | 361.262852 |

Data pada tabel di atas menunjukkan nilai koefisien jalur (*original sample*) pengaruh UNC terhadap PUBU sebesar 0,973 dan bernilai positif. Nilai *T-statistics* sebesar 361,262582 lebih besar dari nilai *T-Table* sebesar 1,96. Hal ini mendukung hipotesis bahwa UNC berpengaruh terhadap PUBU. Sementara, nilai koefisien jalur (*original sample*) pengaruh PBL terhadap PUBU sangat kecil, yaitu sebesar 0,003774 dan bernilai positif. Nilai *T-Statistics* sebesar 0,246047 jauh lebih kecil dibanding nilai *T-Table* yang bernilai 1,96. Hal ini menunjukkan PBL tidak didukung secara signifikan terhadap PUBU.

- 5) Uji Korelasi dengan Data Aktual Pendapatan dan Belanja
Hasil uji korelasi ditunjukkan oleh Tabel 5 dan 6 berikut ini:

Tabel 5.
Korelasi Konstruk PUBU dengan Data Aktual pendapatan dan Belanja Umum

| | | m1 | m2 | Realtime | PU | BU |
|----------|---------------------|--------|---------|----------|--------|--------|
| m1 | Pearson Correlation | 1 | .870** | .874** | .013 | .064 |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 | .853 | .376 |
| | N | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| m2 | Pearson Correlation | .870** | 1 | 1.000** | .017 | .070 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .818 | .331 |
| | N | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Realtime | Pearson Correlation | .874** | 1.000** | 1 | .017 | .070 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .818 | .331 |
| | N | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| PU | Pearson Correlation | .013 | .017 | .017 | 1 | .983** |
| | Sig. (2-tailed) | .853 | .818 | .818 | | .000 |
| | N | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| BU | Pearson Correlation | .064 | .070 | .070 | .983** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .376 | .331 | .331 | .000 | |
| | N | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |

Tabel 6
Korelasi Konstruk PBL dengan Data Aktual Pendapatan dan Belanja Lain-lain

| | | Transfer | Pembiayaan | Realtime | PL | BL |
|------------|---------------------|----------|------------|----------|--------|--------|
| Transfer | Pearson Correlation | 1 | .866** | .042 | .992** | .979** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .561 | .000 | .000 |
| | N | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Pembiayaan | Pearson Correlation | .866** | 1 | .079 | .851** | .901** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .273 | .000 | .000 |
| | N | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Realtime | Pearson Correlation | .042 | .079 | 1 | .045 | .034 |
| | Sig. (2-tailed) | .561 | .273 | | .528 | .633 |
| | N | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| PL | Pearson Correlation | .992** | .851** | .045 | 1 | .974** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .528 | | .000 |
| | N | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| BL | Pearson Correlation | .979** | .901** | .034 | .974** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .633 | .000 | |
| | N | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Data Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa variabel-variabel amatan yang menjelaskan konstruk PUBU (M1 dan M2) serta *Real time* tidak menunjukkan korelasi secara signifikan dengan data aktual pendapatan umum maupun dengan data aktual belanja umum. Sementara untuk korelasi variabel-variabel amatan pada konstruk PBL (transfer dan pembiayaan) serta *Real Time* dengan data aktual pendapatan lain-lain dan belanja lain ditunjukkan dalam tabel 6. Data dalam tabel menunjukkan transfer antar pemerintah berkorelasi dengan pendapatan lain-lain pada level signifikansi 1 persen, begitu pula jika dengan belanja lain-lain, menunjukkan adanya korelasi pada level signifikansi 1 persen. Sedangkan untuk variabel penerimaan pembiayaan, hasil analisis pada tabel 4.7 di atas menunjukkan adanya korelasi antara variabel ini dengan data aktual pendapatan lain-lain pada level 1 persen. Sama halnya jika dikorelasikan dengan data aktual belanja lain-lain, menunjukkan adanya korelasi pada level signifikansi 1 persen. Sementara, variabel *real time*, tidak menunjukkan adanya korelasi baik dengan pendapatan lain-lain maupun dengan belanja lain-lain.

Hasil studi ini menunjukkan adanya perbedaan dengan hasil penelitian Doamekpor (2007). Perbedaan hasil antara penelitian Doamekpor dengan penelitian ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, sebab kedua penelitian ini dilakukan di dua negara yang berbeda, baik secara ekonomi maupun dalam karakteristik penganggarannya. Berbeda dengan Amerika Serikat yang telah sejak lama menerapkan desentralisasi, Indonesia baru sejak satu dasawarsa lalu memulai pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi. Wajar saja bila pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan masih bergantung dari transfer pemerintah pusat maupun dari penerimaan pembiayaan yang diperoleh baik dari bagi hasil keuntungan perusahaan daerah maupun dari sumber lain.

Hasil ini juga sejalan dengan sejumlah penelitian terkait keuangan daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Maemunah (2006) misalnya, yang menemukan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap besarnya belanja pemerintah daerah. Demikian juga dengan penelitian Nugraeni (2011), hasilnya tidak berbeda dengan temuan Maemunah (2006) bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja daerah. Penelitian lainnya juga dilakukan Harianto dan Adi (2007) yang menemukan pengaruh

DAU terhadap belanja modal. Sayang, kontribusi DAU terhadap belanja modal masih kurang efektif, akibatnya pembangunan di daerah kurang merata.

Berbagai temuan tersebut mengindikasikan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan penerimaan pembiayaan dalam menjalankan kewajiban mereka melayani masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah:

- 1) Hasil penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa Model Pengukuran Doamekpor yang dimodifikasi terbukti valid dan reliabel menjelaskan pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Indonesia melalui pengujian dengan menggunakan *Partial Least Square*. Validitas dan reliabilitas dalam model pengukuran yang diajukan memenuhi kriteria ketika beberapa indikator yang nilai *loading*-nya rendah dikeluarkan dari model.
- 2) Hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa indikator-indikator yang valid dan reliabel menjelaskan ketiga konstruk yang dihipotesiskan. Indikator yang valid dan reliabel menjelaskan konstruk PUBU adalah indikator M1 dan M2, yang valid dan reliabel menjelaskan konstruk UNC adalah indikator *real time*. Sedangkan yang valid dan reliabel menjelaskan konstruk PBL adalah indikator transfer dan penerimaan pembiayaan.
- 3) Hasil pengujian model struktural memperlihatkan hanya UNC yang berpengaruh terhadap PUBU, sedangkan PBL tidak terbukti secara aktual mempengaruhi PUBU.
- 4) Uji korelasi menunjukkan hanya indikator transfer dan pembiayaan yang secara aktual signifikan berkorelasi dengan data aktual pendapatan dan belanja lain-lain. Sedangkan untuk M1, M2, dan *time* tidak terbukti secara statistik berkorelasi dengan data aktual pendapatan dan belanja umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Doamekpor, Francois, (2007), Indicators of Revenues and Expenditures of State and Local Governments: A Measurement Model Approach. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19 (1), pp. 1-32.
- Feenberg, D. R. & Rosen, H. S., (1987), Tax Structure and Public Sector Growth. *Journal of Public Economics*, 32, pp. 185-201.
- Ghozali, Imam, (2008), *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 2*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam, (2008), *Model Persamaan Struktural, Konsep & Aplikasi Dengan Program Amos 16.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hair, Joseph F., William C Black, Barry J Babin., & Rolph E Anderson, (2010), *Multivariate Data Analysis*. Pearson.
- Halim, Abdul, (2001), Anggaran Daerah dan Fiscal Stress. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16 No. 4, hlm. 346–357.
- Hanni, Umi, (2006), Sustainability Fiskal Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 4, No. 2, hlm. 19-37.
- Jogiyanto & Willy Abdillah. (2009). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris*. BPF. Yogyakarta
- Jones, Vernon Dale., Bretschneider, Stuart., & Gorr, Wilpen L., (1997), Organizational Pressure on Forecast Evaluation: Managerial, Political, and Procedural Influence. *Journal of Forecasting*, Vol. 16, pp. 241 – 254.
- Maemunah, (2006), *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap*

- Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Romarina, Arina & Akhmad Makhfatih, (2010), Faktor-Faktor Risiko Fiskal Dalam Penganggaran Daerah, *Jurnal BPPK*, Vol. 1, No. 2.
- Sapir, Andre & Sekkat, Khalid., (2002), *Political Cycles, Fiscal Deficits, and Output Spillovers in Europe*. *Public Choice* 111, pp. 195 – 205.
- Sugiyono, (2007), *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta Bandung.

DETERMINAN KEPERCAYAAN DALAM HUBUNGAN BUSINESS-TO-BUSINESS DI PASAR SWALAYAN MODERN

Tri Hendro Sigit Prakosa
STIE YKPN
Email: prakosa@yahoo.com

Abstract

This paper examines influence of several antecedents of trust through industrial relationship between the retail firms and their suppliers based on the previous works of Morgan and Hunt (1994) and Batt (2003). The theoretical model is tested on data collected from 93 supermarkets in Yogyakarta. The author finds that: (1) duration of the retail firms and their suppliers relationship does not have positive influence on the development of trust, (2) satisfaction, specific investment and communication have positive influence on the development of trust, and (3) opportunistic behavior is negatively influence the development of trust. The author also suggests for retail firms to build and develop supply chain information system that enables suppliers to access important data with specific limitations.

Keywords : retail; supplier; trust; partnership; duration; shared values; communication; opportunistic behavior; satisfaction; specific investment.

1. PENDAHULUAN

Tingginya persaingan dalam bisnis retail telah mendorong perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis tersebut untuk selalu menemukan metode atau cara yang lebih unggul dalam menghadapi persaingan. Beberapa perusahaan telah merespon persaingan tersebut dengan membangun hubungan kerjasama yang erat dengan para pelanggan dan pemasoknya (Dertouzos *et al.*, 1989). Salahsatu bentuknya adalah perusahaan menyertakan semua pemasok dan subpemasok ke dalam rantai pasokannya (Fernandez, 1995).

Hubungan *business-to-business* dalam bisnis dapat terwujud melalui kontrak (*relational contract*) dan hubungan kemitraan (*partnerships*). Perbedaan utama kontrak dengan kemitraan terletak pada hal berikut: kontrak digunakan untuk mencapai tujuan jangka pendek (saat ini) sehingga bergantung pada efisiensi *market exchange* untuk memaksimalkan laba transaksi, sedangkan kemitraan cenderung digunakan untuk tujuan jangka panjang dengan bergantung pada *relational exchange* untuk memaksimalkan laba transaksi secara terus-menerus (Ganessian, 1994).

Perusahaan menggunakan sistem kontrak dengan alasan keuntungan jangka pendek lebih bermanfaat pada saat tertentu, misalnya sewaktu perusahaan memiliki persediaan produk terbatas namun permintaan tinggi sehingga pengecer berusaha untuk menaikkan harga. Namun kenyataannya perusahaan menghadapi lima kekuatan persaingan seperti persaingan antar penjual terkait, pendatang baru yang potensial, produk substitusi, *bargaining power* pembeli dan *bargaining power* pemasok. Oleh karena itu, perusahaan perlu membina kerjasama jangka panjang dengan beberapa pemasok utama untuk mengurangi atau membagi risiko bisnis mereka.

Hubungan kemitraan menuntut kerjasama antarpihak yang saling menguntungkan. Membangun hubungan baik dengan pemasok memungkinkan perusahaan dengan cepat mengakses pasar dan memperoleh informasi yang lebih cepat serta handal. Selain itu, hubungan baik ini juga membantu pasokan barang secara kontinyu dan dapat dipercaya, meningkatkan kualitas dan kinerja produk, meningkatkan interaksi teknis dalam bentuk pertukaran informasi, adaptasi produk potensial dan bantuan atau dukungan teknis dari penjual, meningkatnya loyalitas dan kualitas hubungan kerja dalam jangka panjang, serta frekuensi pembelian yang lebih banyak sehingga memungkinkan adanya *referral* pemasok kepada pembeli yang lain (Low, 1996).

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) merupakan prinsip terpenting dalam membina hubungan jangka panjang. Untuk setiap proses pertukaran antarpihak, kepercayaan menjadi faktor penentu apabila proses tersebut mengandung dua faktor situasional, yaitu: risiko dan ketidaklengkapan informasi yang diterima pembeli (Hawes *et al.*, 1989). Hampir sebagian besar transaksi penjualan yang dilaksanakan antarperusahaan mengandung risiko dan ketidakpastian, oleh karena itu kepercayaan akan menjadi basis informasi penting untuk mereduksi ancaman atau bahaya akibat risiko atau ketidakpastian tersebut (Batt, 2003).

Dalam konteks hubungan jangka panjang antara pemasok dengan perusahaan retail, Sako (1992) membedakan kepercayaan dari sisi *contractual trust*, *competencetrust*, dan *goodwilltrust*. *Contractual trust* merupakan norma moral yang mewajibkan seseorang untuk berperilaku jujur dan mampu menjaga rahasia orang lain. *Competence trust* adalah harapan bahwa mitra dagang pebisnis dalam sebuah transaksi akan menjalankan fungsinya secara kompeten. *Goodwill trust* merupakan kesediaan mitra kerja dalam bisnis untuk melaksanakan sesuatu (dalam hal ini menyediakan barang atau jasa) yang melebihi harapan atau kepuasan pelanggannya. Seseorang yang mampu menerapkan *goodwill trust* dianggap sebagai pihak yang dapat diandalkan serta bijak sehingga tidak mungkin berbuat curang. Oleh karena itu kepercayaan merupakan komponen kritis dalam membentuk, membina, dan mempertahankan hubungan jangka panjang (Morgan dan Hunt, 1994).

Dyer *et al.* (1998) telah meneliti hubungan antara perusahaan dengan pemasoknya pada beberapa perusahaan otomotif di Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, dan hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan antara kedua belah pihak berperan dalam meningkatkan efisiensi biaya serta memperbaiki kualitas bahan baku. Selain itu pengalaman yang berharga dan menyenangkan dengan anggota sebuah jaringan bisnis dapat memunculkan kepercayaan kepada jaringan tersebut (Dwyer *et al.*, 1987) sehingga apabila terakumulasi akan menciptakan komunikasi yang lebih baik diantara berbagai pihak yang terlibat. Morgan dan Hunt (1994) menemukan bahwa akumulasi pengalaman berharga ini akan membentuk perilaku kooperatif yang kondusif untuk hubungan jangka panjang antarpihak dalam bisnis.

2.2. Penelitian Terdahulu

Minat penelitian terhadap kepercayaan mulai meningkat di awal tahun 1990an, ditandai dengan banyaknya publikasi ilmiah tentang kepercayaan dan debat-debat yang mengiringi publikasi tersebut. Dimulai dari penelitian Anderson dan Weitz di akhir tahun 1989, penelitian tentang kepercayaan terus berkembang dari waktu ke waktu, selain ruang lingkupnya juga meluas (dari hubungan penjual dan pembeli secara individual hingga konteks hubungan antarperusahaan). Konsep kepercayaan menjadi obyek perhatian khusus dalam penelitian pemasaran karena kepercayaan ini melibatkan minimal dua pihak: pihak yang memberi atau memunculkan kepercayaan (*trustor*) dan pihak yang menerima hasil atau mempercayai pihak lain (*trustee*). Kepercayaan menjadi kunci utama pembentukan *relationship marketing*, yang bermuara kepada seluruh aktivitas untuk membangun, mengembangkan serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dan adil bagi klien (Morgan dan Hunt, 1994). Tabel 1 berikut menyajikan rangkuman beberapa penelitian kepercayaan dalam lingkup hubungan antarperusahaan.

**Determinan Kepercayaan dalam Hubungan Business-To-Business di Pasar Swalayan Modern
(Tri Hendro Sigit Prakosa)**

**Tabel 1.
Beberapa Penelitian Tentang Kepercayaan**

| Penulis | Ruang Lingkup | Variabel Penelitian | Metode Analisis Data | Hasil Pengukuran |
|-------------------------------|--|---|--|---|
| Anderson dan Weitz (1989). | Hubungan antara 95 agen penjualan dengan 690 pabrik komponen elektronik (ditinjau dari perspektif agen penjualan). | Kepercayaan, persepsi terhadap kompetensi, dan kesamaan tujuan. | <i>Three-stage least squares</i> (3SLS); Kuesioner menggunakan 7 basis skala Likert | Cronbach alpha = 0,84. Koefisien korelasi antara kepercayaan dengan persepsi terhadap kompetensi dan kesamaan tujuan masing-masing sebesar 0,51 dan 0,69. |
| Anderson dan Narus (1990). | Hubungan antara 213 pabrik dengan 249 distributornya (ditinjau dari perspektif keduanya). | Kepercayaan, kerjasama, dan komunikasi. | <i>Structural equation modeling</i> (SEM) dengan <i>Lisrel</i> . | Dalam kedua sampel, baik pengukuran maupun SEM perlu diresponsifikasi kembali. |
| Ganessian (1994). | Hubungan antara 124 pembeli dari 6 jaringan <i>department store</i> dengan 52 pemasok aktif (ditinjau dari perspektif keduanya). | Kredibilitas, kebaikan, kepuasan, dan investasi khusus | <i>Structural equation modeling</i> (SEM) dengan <i>Lisrel</i> dan <i>Ordinary Least Square</i> (OLS). | Dua model dimensional dari kepercayaan yang mencakup kredibilitas dan kebaikan. |
| Morgan dan Hunt (1994). | Hubungan antara 204 pengecer ban mobil dengan pemasoknya (ditinjau dari perspektif pengecer). | Integritas, nilai-nilai bersama, komunikasi, perilaku oportunistik, dan investasi khusus. | <i>Structural equation modeling</i> (SEM) dengan <i>Lisrel</i> | Cronbach alpha = 0,95. Koefisien korelasi antara kepercayaan dengan perilaku oportunistik sebesar -0,759. |
| Geyskens <i>et al.</i> (1996) | Hubungan antara diler mobil dengan pabrik di AS (417) dan di Belanda (289) (ditinjau dari perspektif diler mobil). | Kejujuran, dan kebaikan | Analisis regresi dengan kuesioner menggunakan 7 basis skala Likert | Untuk Belanda, α kejujuran = 0,81, kebaikan = 0, sedangkan di AS, α kejujuran 0,85 dan kebaikan = 0,93. |
| Doney dan Cannon (1997). | Hubungan tenaga penjual industri dengan pemasok dan tenaga penjualan mereka (ditinjau dari perspektif pembeli). | Kepercayaan, kredibilitas, kebaikan, informasi bersama, durasi dan investasi khusus. | <i>Structural equation modeling</i> (SEM) dengan <i>Lisrel</i> . | Cronbach alpha = 0,94 (pemasok) dan 0,9 (tenaga penjual). Kepercayaan kepada perusahaan dan kepada tenaga penjual merupakan dua konstruk yang berbeda. |

| Penulis | Ruang Lingkup | Variabel Penelitian | Metode Analisis Data | Hasil Pengukuran |
|--------------------------|--|--|---|--|
| Smith dan Barclay (1997) | Hubungan kemitraan dalam kerjasama penjualan antarperusahaan komputer (ditinjau dari perspektif pihak-pihak yang bekerjasama). | <i>Mutual perceived trustworthiness</i> yang mencakup karakter, kompetensi, motivasi, dan pertimbangan, serta <i>mutual trusting behaviors</i> yang mencakup investasi dalam hubungan, penerimaan terhadap pengaruh, keterbukaan dalam berkomunikasi, pengurangan kontrol yang ketat, dan penghindaran dari tindakan oportunistik. | <i>Structural equation modeling</i> (SEM) dengan <i>Lisrel</i> dan <i>Partial Least Square</i> (PLS). kuesioner menggunakan 7 basis skala Likert. | Butir pernyataan “bertindak dengan tujuan yang baik” dalam subkonstruk motivasi telah dihilangkan, demikian juga subkonstruk penerimaan terhadap pengaruh dan pengurangan kontrol yang ketat juga telah dihilangkan. |
| Batt (2003) | Hubungan antara petani buah dan sayuran dengan pedagang (ditinjau dari perspektif pedagang). | Durasi, perilaku oportunistik, kesamaan tujuan, kepuasan, investasi khusus, dan kekuatan koersif. | <i>Principal Component Analysis</i> dengan KMO dan rotasi <i>varimax</i> . | Nilai beta yang besar menunjukkan bahwa faktor kepuasan berpengaruh paling signifikan terhadap upaya membangun kepercayaan antara petani dengan pedagang. |

Sumber: berbagai jurnal penelitian.

2.3. Hubungan Antara Kepercayaan dan Kerjasama Antarprodusen

Dalam lingkungan bisnis di Indonesia yang diwarnai dengan rasa saling tidak percaya (*distrust*) dan perselisihan, penelitian ini memusatkan perhatian kepada cara membangun kepercayaan antarperusahaan melalui replikasi penelitian Batt (2003). Dalam penelitiannya, Batt menemukan faktor kunci yang menyebabkan hubungan antara petani buah dan sayuran (*growers*) dengan para pedagang (*market agents*) dapat berlangsung lama, yaitu kepercayaan. Menurut Batt, ada keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak dalam hubungan yang kondusif seperti ini, seperti petani akan merasa lebih aman dan yakin dengan transaksi yang dilakukan dengan pedagang terpercaya, sedangkan bagi pedagang akan mengurangi biaya serta mempertahankan tingkat keuntungan dalam jangka panjang. Melalui penelitian ini penulis berharap akan memperoleh hasil atau kesimpulan yang sama dengan penelitian Batt meskipun waktu, lokasi, dan sampel yang dipergunakan berbeda.

2.4. Hubungan Antara Durasi dan Kepercayaan

Durasi adalah lamanya waktu berinteraksi yang menimbulkan pengalaman tertentu dengan pihak lain atau mitra bisnis (Anderson dan Weitz, 1989). Dalam kegiatan transaksi perdagangan, lamanya hubungan satu pihak dengan pihak lain dapat menjelaskan kuatnya kepercayaan antarpihak karena *pertama*, lamanya waktu yang telah dihabiskan untuk menjalin hubungan menunjukkan investasi waktu oleh masing-masing pihak, dan *kedua*,

lamanya waktu berhubungan di masa lampau dapat dijadikan landasan kuat untuk melanjutkan hubungan di masa datang (Doney dan Cannon, 1997).

2.5. Hubungan Antara Kepuasan dan Kepercayaan

Apabila kinerja nyata suatu mitra bisnis melebihi harapan sebuah perusahaan yang berhubungan dengan mitra tersebut, maka kepuasan perusahaan akan meningkat dari waktu ke waktu. Menurut Geykens *et al.* (1999), jika anggota suatu jaringan pemasaran merasa sangat puas terhadap imbalan ekonomis yang berasal dari hubungan di dalam jaringan tersebut, maka anggota itu akan mempersepsi mitra-mitra bisnis mereka sebagai mitra-mitra bisnis yang dapat dipercaya. Selain itu, kepuasan yang diperoleh dari transaksi di masa lalu menunjukkan kesetaraan atau keadilan dalam pertukaran (Anderson dan Narus, 1990). Perusahaan yang merasa tidak puas karena pengalaman bertransaksi masa lalu dengan perusahaan lain cenderung untuk memilih keuntungan jangka pendek dengan perusahaan yang sama. Namun sebaliknya, jika perusahaan tersebut merasa puas dengan seluruh transaksi yang telah terjadi di masa lampau, maka perusahaan akan memilih untuk melakukan hubungan jangka panjang dengan perusahaan yang sama.

2.6. Hubungan Antara Nilai-Nilai Bersama dan Kepercayaan

Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang (*survive and growth*). Maka perusahaan harus terus menghasilkan produk atau jasa bermutu dengan harga yang layak, sehingga keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari proposisi Dwyer *et al.* (1987) yang menyatakan bahwa tujuan yang diketahui bersama (*shared goals*) dalam suatu kemitraan bisnis memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tumbuh dan berkembangnya kepercayaan antarpihak dalam kemitraan tersebut. Proposisi Dwyer *et al.* (1987) ini diperkuat oleh Morgan dan Hunt (1994) yang menyatakan bahwa jika sebuah perusahaan dengan mitra bisnisnya tidak berbagi nilai-nilai yang diyakini bersama (*shared values*), maka mereka akan memperoleh sedikit manfaat dari hubungan kemitraan bisnis tersebut. Oleh karena itu, berbagi informasi penting antarpihak dalam suatu kemitraan menjadi faktor terpenting dalam menjaga kepercayaan bisnis.

2.7. Hubungan Antara Investasi Khusus dan Kepercayaan

Anderson dan Weitz (1992) mengistilahkan investasi khusus dengan *idiosyncratic investments*, yaitu investasi yang secara khusus dibangun untuk mendukung sebuah jaringan distribusi. Apabila sebuah perusahaan berharap untuk meningkatkan hubungan kemitraan dengan pihak lain guna mencapai manfaat ekonomis di masa mendatang, maka perusahaan tersebut memerlukan komitmen untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya ke dalam hubungan kemitraan itu, yang tercermin dalam bentuk waktu pengelolaan atau tenaga penjualan, pengembangan produk atau jasa, proses, serta pengadaptasian kegiatan finansial dan administrasi. Dengan melakukan investasi khusus, perusahaan menciptakan insentif untuk mempertahankan hubungan. Pemasok yang berhubungan dengan konsumen tertentu akan kesulitan untuk berganti konsumen sebelum hubungan dengan konsumen sebelumnya berakhir. Adanya investasi khusus juga memberikan sinyal positif kepada pihak lain, artinya anggota jaringan pemasaran akan lebih percaya terhadap komitmen pihak lain pada hubungan yang mereka jalankan, sehingga apabila hubungan ini dihentikan maka anggota jaringan tersebut akan mengalami kerugian ekonomis. Investasi khusus pada hubungan ini juga memberikan bukti nyata bahwa pemasok adalah pihak yang dapat dipercaya, yang peduli kepada keeratn hubungan serta bersedia untuk berkorban dalam mewujudkan keeratn hubungan tersebut (Ganesan, 1994). Saling melakukan investasi khusus inilah yang dapat mengubah *competitive relationship* menjadi *cooperative relationship*.

2.8. Hubungan Antara Perilaku Oportunistik dan Kepercayaan

Perilaku oportunistik muncul karena salah satu pihak memperoleh kesempatan untuk memperoleh keuntungan jika memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada pihak lain yang berhubungan dengannya (Gundlach *et al.*,

1995). Apabila perilaku ini terjadi, maka mitra yang mengalami kerugian akan bertindak secara emosional sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan kepada pihak lain. Dengan hilangnya kepercayaan dan keyakinan inilah, pihak yang merasa dirugikan akan berusaha mengurangi bahkan menghilangkan komitmennya terhadap pihak lain.

Secara umum perilaku oportunistik memiliki arti negatif yaitu perilaku untuk memperoleh keuntungan sendiri dengan menggunakan cara yang tidak etis. Menurut Murriss (1981), perilaku oportunistik meningkat bila salah satu pihak berperilaku berbeda dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Hal ini tidak terjadi pada kesepakatan yang eksplisit melainkan pada kesepakatan yang implisit sehingga memungkinkan munculnya perilaku oportunistik. Namun menurut Williamson (1985), mencari keuntungan sendiri merupakan dasar dari mekanisme pasar sehingga tidak termasuk perilaku oportunistik. Perilaku oportunistik merupakan tindakan yang sah secara hukum namun tindakan tersebut tidak beretika karena tindakan tersebut meliputi memberikan informasi dengan tidak lengkap, adanya motif tersembunyi dibalik kesepakatan bersama sehingga tindakan ini tidak sesuai dalam hubungan jangka panjang karena mekanisme sosial penting dalam pengelolaan.

2.9. Hubungan Antara Komunikasi dan Kepercayaan

Komunikasi merupakan ketrampilan yang selalu diperlukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan bisnis. Intensitas komunikasi yang rutin dan tepat waktu sangat penting untuk dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, sekaligus meluruskan persepsi dan harapan pembeli (Morgan dan Hunt, 1994). Menurut Dwyer *et al.* (1987), kepercayaan mempengaruhi komunikasi yang efektif, namun Anderson *et al.* (1997) berpendapat sebaliknya: kepercayaan terbentuk terlebih dulu karena adanya komunikasi, dan dalam jangka panjang kepercayaan akan membentuk komunikasi yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 : durasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan

H_2 : kepuasan pembeli berpengaruh positif terhadap kepercayaan

H_3 : nilai-nilai bersama berpengaruh positif terhadap kepercayaan

H_4 : investasi khusus berpengaruh positif terhadap kepercayaan

H_5 : perilaku oportunistik berpengaruh negatif terhadap kepercayaan

H_6 : komunikasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan

3. METODOLOGI

3.1. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah pasar swalayan modern di Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Menurut Sekaran (2000), jumlah sampel yang seharusnya dipakai dalam sebuah penelitian adalah sebesar tiga puluh hingga lima ratus sampel. Untuk *pilot test* (pra survei), penulis menyebarkan kuesioner ke 52 swalayan, dan setelah itu (tahap survei) ke beberapa swalayan lain sehingga total jumlah swalayan yang disurvei berjumlah 93 buah. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, artinya pemilihan sampel ini didasarkan atas beberapa kriteria tertentu (Zikmund, 2003). Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel swalayan adalah sebagai berikut: (1) telah beroperasi lebih dari satu tahun, sehingga diasumsikan swalayan tersebut berpengalaman dalam berhubungan atau bekerjasama dengan pemasok; (2) luas bangunan swalayan berkisar antara $\pm 200\text{m}^2$ (disebut *minimarket*) hingga $\pm 1.000\text{ m}^2$ (disebut *supermarket*).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berbentuk kuesioner yang dikirimkan langsung (tanpa melalui pos) kepada pemilik atau karyawan bagian pembelian swalayan untuk meningkatkan *response rate*. *Yellow Pages* Yogyakarta 2004 dan Direktori Perdagangan Indonesia 2001 digunakan oleh penulis untuk menemukan alamat swalayan di Yogyakarta. Kuesioner yang diajukan kepada responden penelitian berbentuk pertanyaan tertutup (*closequestions*) dengan menggunakan skala Likert. Pertanyaan yang diajukan berkonotasi positif sehingga menggunakan skala satu untuk jawaban sangat tidak setuju hingga skala lima untuk

jawaban sangat setuju. Khusus untuk variabel perilaku oportunistik jawaban responden dibalik, skala satu untuk jawaban sangat setuju dan skala lima untuk jawaban sangat tidak setuju.

3.3. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup durasi (DURASI), kepuasan (KPUASAN), nilai-nilai bersama (NILAI), investasi khusus (I.KHUSS), perilaku oportunistik (P.OPORT), dan komunikasi (KOMUN). Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen, yang dalam penelitian ini adalah kepercayaan (PRCAYA).

Kepercayaan (*trust*). Kepercayaan merupakan harapan atau keyakinan satu pihak kepada pihak lain bahwa kesediaan untuk menanggung risiko oleh satu pihak tersebut tidak dimanfaatkan secara negatif oleh pihak lain dalam hubungan antarkeduanya. Kepercayaan tidak hanya terbatas pada itikad baik masing-masing pihak namun juga mencakup kemampuan masing-masing untuk memenuhi perjanjian bersama, misal ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan dan kualitas barang atau jasa. Tujuan yang ingin dicapai dengan meneliti aspek kepercayaan ini adalah mengukur tindakan swalayan yang berhubungan dengan reliabilitas, integritas, dan keyakinannya kepada pemasok. Pengukuran atas variabel kepercayaan ini didasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada penelitian Morgan dan Hunt (1994), Ganesan (1994), serta Doney dan Cannon (1997).

Durasi (*duration*). Durasi adalah lamanya waktu berinteraksi yang menimbulkan pengalaman tertentu dengan pihak lain atau mitra bisnis (Anderson dan Weitz, 1989). Dalam jangka waktu berhubungan inilah, pengetahuan tentang mitra bisnis akan terakumulasi, baik yang diperoleh dari kontak langsung maupun tidak langsung (melalui pihak ketiga yang dipercayai). Tujuan yang ingin dicapai dengan meneliti variabel durasi adalah mengetahui lamanya waktu yang telah dihabiskan pengecer untuk melakukan kontak (bekerjasama) dengan pemasoknya. Pengukuran variabel durasi didasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada penelitian Anderson dan Weitz (1989).

Kepuasan (*satisfaction*). Kepuasan adalah hasil yang diperoleh dari proses membandingkan harapan sebuah perusahaan terhadap mitra bisnisnya dengan kinerja sesungguhnya yang telah ditunjukkan oleh mitra bisnis tersebut (Oliver, 1980). Dilihat dari perspektif pengecer, pengukuran bertujuan untuk mengetahui kewajaran dan kesamaan dalam membina hubungan kedua belah pihak. Pengukuran kepuasan bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di penelitian Batt (2003).

Nilai-nilai bersama (*shared values*). Nilai-nilai bersama menunjukkan seberapa jauh pihak-pihak yang terlibat berbagi keyakinan umum tentang perilaku, tujuan, dan kebijakan yang penting maupun tidak, yang layak maupun tidak layak serta yang benar maupun yang salah (Morgan and Hunt, 1994). Kedua belah pihak harus sepakat meskipun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga setiap pihak dapat mencapai tujuan masing-masing seiring dengan upaya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya untuk mengukur kesepakatan mengenai nilai-nilai bersama dan penyelesaian masalah yang terjadi pada kedua pihak (pengecer-pemasok). Pengukuran nilai-nilai bersama menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari penelitian Morgan dan Hunt (1994).

Investasi khusus (*specific investment*). Investasi khusus adalah proses yang dalam hal ini berbagai sumberdaya didayagunakan untuk menciptakan, membangun, atau memperoleh sumberdaya-sumberdaya lain yang mungkin dipakai di masa mendatang (Anderson dan Weitz, 1992). Investasi khusus dapat berbentuk investasi dalam sumberdaya manusia (misal: melatih tenaga penjual), investasi dalam teknologi informasi khusus, dan lain-lain. Tujuannya yang ingin dicapai melalui pengukuran variabel investasi khusus adalah untuk mengetahui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak guna menciptakan sumberdaya yang lain di masa mendatang secara bersama-sama. Pengukuran investasi khusus ini menggunakan beberapa pertanyaan yang berasal dari penelitian Anderson dan Weitz (1992).

Perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*). Perilaku oportunistik adalah perilaku salah satu pihak yang menyampaikan informasi secara tidak lengkap sehingga menyebabkan kesalahpahaman, distorsi, atau kebingungan yang dialami oleh pihak lain (Batt, 2003). Perilaku ini muncul karena salah satu pihak memperoleh kesempatan untuk memperoleh keuntungan jika memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada pihak lain yang

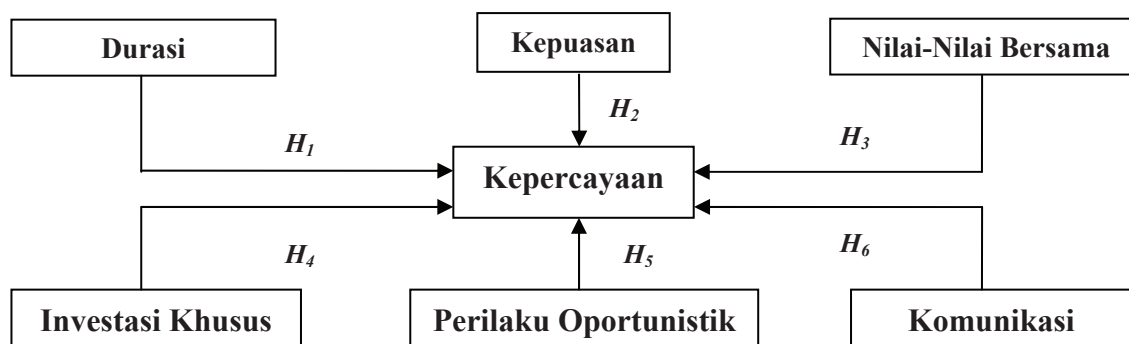
berhubungan dengannya (Gundlach *et al.*, 1995). Tujuan yang ingin dicapai melalui pengukuran variabel perilaku oportunistik adalah untuk menilai suatu sifat tidak baik yang mungkin dimiliki oleh pemasok (menguntungkan diri sendiri demi mencapai tujuannya) dalam menjalin hubungan dengan pengecer. Pengukuran variabel perilaku oportunistik didasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian Morgan dan Hunt (1994) dan Gundlach *et al.* (1995).

Komunikasi (*communication*). Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi yang berguna dan tepat waktu, baik secara formal maupun informal, yang terjadi antarpihak maupun antarperusahaan (Anderson dan Narus, 1990). Komunikasi yang efektif bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dengan harapan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Tujuan yang ingin dicapai melalui pengukuran variabel komunikasi adalah mengukur proses penyampaian informasi yang terjadi antara perusahaan retail dan pemasok. Pengukuran variabel komunikasi didasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada penelitian Anderson dan Weitz (1992), Morgan dan Hunt (1994), serta Fynes *et al.* (2005).

3.4. Model Pengujian Hipotesis

Kepercayaan bisnis yang begitu mendalam dalam hubungan antarperusahaan jarang terjadi begitu saja, namun melalui proses dan waktu yang panjang yang telah dilalui oleh masing-masing pihak (Dwyer *et al.*, 1987). Dalam kurun waktu panjang, pemahaman tentang karakteristik mitra bisnis dipelajari baik melalui pertemuan-pertemuan aktif maupun melalui konsultasi dengan pihak ketiga yang dianggap mengenal mitra bisnis tersebut. Pembeli secara umum juga lebih menyukai membeli dari penjual yang sama apabila penjual tersebut dipersepsikan memiliki risiko terendah yang berdampak bagi pembeli (Anderson *et al.*, 1987). Kecenderungan ini akan semakin kuat apabila pengalaman membeli selama ini selalu berada dalam kondisi menyenangkan, sehingga pemasok atau penjual memiliki kesempatan besar untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan (Dwyer *et al.*, 1987). Morgan dan Hunt (1994) menguji hipotesis atas lima faktor pendukung pembentukan kepercayaan yaitu: (1) biaya pemutusan hubungan dan manfaat yang diterima dari hubungan berpengaruh secara langsung terhadap komitmen; (2) nilai-nilai bersama secara langsung berpengaruh terhadap komitmen dan kepercayaan; dan (3) komunikasi serta perilaku oportunistik berpengaruh secara langsung terhadap kepercayaan (kepercayaan ini dianggap berpengaruh tidak langsung terhadap komitmen). Penelitian Morgan dan Hunt dilanjutkan oleh Batt (2003) dalam *setting* yang berbeda, yaitu dengan obyek petani buah dan sayuran serta pedagang di Perth, Australia. Variabel yang diukur dalam penelitian Batt adalah durasi, perilaku oportunistik, kesamaan tujuan, kepuasan, investasi khusus, dan kekuatan koersif. Mengingat obyek penelitian penulis adalah dua pihak interdependen seperti halnya petani dan pedagang dalam penelitian Batt, atau pengecer ban mobil dengan pemasoknya dalam penelitian Morgan dan Hunt, maka penulis mereplikasi dan memodifikasi model penelitian Batt (2003) serta Morgan dan Hunt (1994).

Gambar 1 berikut menyajikan model penelitian kepercayaan yang dilakukan penulis dengan mengadaptasi model penelitian P. J. Batt (2003), serta Morgan dan Hunt (1994).



Gambar 1.
Model Penelitian Kepercayaan

4. HASIL ANALISIS DATA

4.1. Pengujian Validitas

Uji validitas menunjukkan kemampuan alat ukur untuk mengukur *construct* yang akan diukur (Zikmund, 2003). Uji validitas diklasifikasi menjadi tiga bagian: (1) *face or content validity*, menunjukkan seberapa jauh aras sebuah konsep yang diuji dapat melalui sebuah pengukuran; (2) *construct validity* yang terdiri atas *convergent validity* (seberapa jauh sebuah pengukuran berhubungan dengan pengukuran-pengukuran lain pada konsep yang sama) dan *discriminant validity* (seberapa jauh sebuah pengukuran berbeda dari pengukuran-pengukuran untuk berbagai konsep yang berbeda), dan (3) *nomological validity*, menghubungkan pengukuran sebuah konsep dengan model teoritis yang menyusun konsep tersebut sehingga menunjukkan hubungan berbagai hipotesis yang terdapat di dalam suatu penelitian (Carmines dan Zeller, 1979). Dalam penelitian ini, teknik uji validitas yang digunakan adalah analisis faktor berupa *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (K-M-O MSA) yang menunjukkan suatu pengukuran homogenitas dari variabel-variabel penelitian. Nilai KMO-MSA setidaknya 0,5 agar dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Tabel 2 berikut menyajikan hasil pengujian validitas dari butir instrumen yang terdapat dalam kuesioner pada tahap pra survei.

Tabel 2.
Pengujian Validitas Butir Instrumen Kuesioner Tahap Pra Survei

| Butir Instrumen | Nilai MSA | Valid/ Tidak |
|-----------------|-----------|--------------|
| PRCAYA1 | 0,826 | Valid |
| PRCAYA2 | 0,838 | Valid |
| PRCAYA3 | 0,627 | Valid |
| PRCAYA4 | 0,727 | Valid |
| PRCAYA5 | 0,831 | Valid |
| PRCAYA6 | 0,861 | Valid |
| PRCAYA7 | 0,790 | Valid |
| PRCAYA8 | 0,810 | Valid |
| DURASI1 | 0,797 | Valid |
| DURASI2 | 0,707 | Valid |
| KPUASAN1 | 0,739 | Valid |
| KPUASAN2 | 0,838 | Valid |
| KPUASAN3 | 0,820 | Valid |
| KPUASAN4 | 0,812 | Valid |
| KPUASAN5 | 0,864 | Valid |
| KPUASAN6 | 0,787 | Valid |
| NILAI1 | 0,422 | Tidak |
| NILAI2 | 0,434 | Tidak |
| I.KHUSS1 | 0,540 | Valid |
| I.KHUSS2 | 0,455 | Tidak |
| I.KHUSS3 | 0,729 | Valid |
| I.KHUSS4 | 0,519 | Valid |
| I.KHUSS5 | 0,433 | Tidak |
| P.OPORT1 | 0,742 | Valid |
| P.OPORT2 | 0,809 | Valid |
| P.OPORT3 | 0,833 | Valid |
| P.OPORT4 | 0,843 | Valid |

| Butir Instrumen | Nilai MSA | Valid/ Tidak |
|-----------------|-----------|--------------|
| P.OPORT5 | 0,919 | Valid |
| P.OPORT6 | 0,798 | Valid |
| KOMUN1 | 0,837 | Valid |
| KOMUN2 | 0,750 | Valid |
| KOMUN3 | 0,752 | Valid |
| KOMUN4 | 0,876 | Valid |
| KOMUN5 | 0,595 | Valid |
| KOMUN6 | 0,742 | Valid |
| KOMUN7 | 0,688 | Valid |
| KOMUN8 | 0,737 | Valid |

Sumber: data primer, diolah.

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa dari tiga puluh tujuh butir instrumen penelitian, tiga puluh tiga butir dinyatakan *valid* dan empat butir instrumen dinyatakan tidak *valid*. Hasil pengujian pra survei diulangi kembali pada pengujian survei tanpa menghilangkan butir instrumen dan variabel yang tidak memenuhi kriteria validitas, namun disertai dengan jumlah responden lebih banyak, seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Pengujian Validitas Butir Instrumen Kuesioner Tahap Survei

| Butir Instrumen | Nilai MSA | Valid/ Tidak |
|-----------------|-----------|--------------|
| PRCAYA1 | 0,826 | Valid |
| PRCAYA2 | 0,838 | Valid |
| PRCAYA3 | 0,627 | Valid |
| PRCAYA4 | 0,727 | Valid |
| PRCAYA5 | 0,831 | Valid |
| PRCAYA6 | 0,861 | Valid |
| PRCAYA7 | 0,790 | Valid |
| PRCAYA8 | 0,810 | Valid |
| DURASI1 | 0,797 | Valid |
| DURASI2 | 0,707 | Valid |
| KPUASAN1 | 0,739 | Valid |
| KPUASAN2 | 0,838 | Valid |
| KPUASAN3 | 0,820 | Valid |
| KPUASAN4 | 0,812 | Valid |
| KPUASAN5 | 0,864 | Valid |
| KPUASAN6 | 0,787 | Valid |
| NILAI1 | 0,422 | Tidak |
| NILAI2 | 0,434 | Tidak |
| I.KHUSS1 | 0,540 | Valid |
| I.KHUSS2 | 0,455 | Tidak |
| I.KHUSS3 | 0,729 | Valid |
| I.KHUSS4 | 0,519 | Valid |
| I.KHUSS5 | 0,433 | Tidak |
| P.OPORT1 | 0,742 | Valid |
| P.OPORT2 | 0,809 | Valid |
| P.OPORT3 | 0,833 | Valid |

**Determinan Kepercayaan dalam Hubungan Business-To-Business di Pasar Swalayan Modern
(Tri Hendro Sigit Prakosa)**

| Butir Instrumen | Nilai MSA | Valid/ Tidak |
|-----------------|-----------|--------------|
| P.OPORT4 | 0,843 | Valid |
| P.OPORT5 | 0,919 | Valid |
| P.OPORT6 | 0,798 | Valid |
| KOMUN1 | 0,837 | Valid |
| KOMUN2 | 0,750 | Valid |
| KOMUN3 | 0,752 | Valid |
| KOMUN4 | 0,876 | Valid |
| KOMUN5 | 0,595 | Valid |
| KOMUN6 | 0,742 | Valid |
| KOMUN7 | 0,688 | Valid |
| KOMUN8 | 0,737 | Valid |

Sumber: data primer, diolah

Hasil pengujian validitas pada tahap survei menunjukkan bahwa dari tiga puluh tujuh butir instrumen penelitian, tiga puluh tiga butir dinyatakan *valid* dan empat butir instrumen dinyatakan tidak *valid*.

4.2. Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa suatu pengukuran telah terbebas dari kesalahan (*error*) sehingga memberi hasil pengukuran yang konsisten pada kondisi yang berbeda untuk masing-masing butir dalam instrumen penelitian (Sekaran, 2000). Ada dua hal penting yang terkait dalam konteks reliabilitas, yaitu konsistensi internal (*internal consistency*)—tingkatan kesamaan antara dua atau lebih pengukuran dari konsep teoritis yang sama yang diperoleh pada waktu bersamaan, dan stabilitas (*stability*)—konsistensi dari pengukuran berulang yang berasal dari konsep yang sama (Bagozzi, 1994). Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dari beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Menurut Hair *et al.* (1998), suatu instrumen dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* sebesar 0,6 atau lebih. Untuk hasil pengujian reliabilitas pada tahap survei menunjukkan bahwa ketujuh variabel dinyatakan reliabel karena koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

Tabel 4.
Pengujian Reliabilitas Butir Instrumen Kuesioner Tahap Survei

| Instrumen | <i>Cronbach Alpha</i> |
|-----------|-----------------------|
| PRCAYA | 0,8082 |
| DURASI | 0,8363 |
| KPUASAN | 0,8010 |
| NILAI | 0,8097 |
| I.KHUSS | 0,7496 |
| P.OPORT | 0,8218 |
| KOMUN | 0,8270 |

Sumber: data primer, diolah

Untuk hasil pengujian reliabilitas pada tahap survei menunjukkan bahwa ketujuh variabel dinyatakan reliabel karena koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6. Untuk proses selanjutnya, butir instrumen dan variabel yang tidak memenuhi kriteria akan dihilangkan dari pengukuran. Selanjutnya, analisis pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis faktor (*factoranalysis*) dan analisis regresi berganda (*multiple regression equation analysis*).

4.3. Analisis Faktor

Secara prinsip, analisis faktor digunakan untuk mengurangi data, yang bermakna variabel-variabel yang terdapat dalam sebuah penelitian direduksi sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit dari sebelumnya dan dinamai faktor. Analisis faktor dilakukan terhadap semua butir instrumen dalam kuesioner yang telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas, yaitu sejumlah tigapuluh tiga butir instrumen. Melalui *rotated component matrix* diperoleh hasil pengelompokan butir-butir instrumen penelitian dari enam faktor yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Santoso (2003) menjelaskan bahwa sebuah butir instrumen dapat dikelompokkan ke dalam faktor tertentu apabila memiliki *loading factor* sebesar 0,5. Hasil dari pengelompokkan ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Rotated Component Matrix

| Instrumen | Faktor1 | Faktor2 | Faktor3 | Faktor4 | Faktor5 | Faktor6 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PRCAYA5 | | 0,662 | | | | |
| PRCAYA6 | | 0,647 | | | | |
| PRCAYA7 | | 0,795 | | | | |
| PRCAYA8 | | 0,668 | | | | |
| DURASI1 | | | | 0,884 | | |
| DURASI2 | | | | 0,874 | | |
| KPUASAN1 | | | | | 0,646 | |
| KPUASAN2 | | | | | 0,741 | |
| KPUASAN4 | | | | | 0,746 | |
| I.KHUSS1 | | | | | | 0,554 |
| I.KHUSS3 | | | | | | 0,783 |
| I.KHUSS4 | | | | | | 0,784 |
| P.OPORT1 | | | 0,746 | | | |
| P.OPORT3 | | | 0,809 | | | |
| P.OPORT5 | | | 0,609 | | | |
| KOMUN3 | 0,731 | | | | | |
| KOMUN4 | 0,633 | | | | | |
| KOMUN6 | 0,719 | | | | | |
| KOMUN7 | 0,734 | | | | | |
| KOMUN8 | 0,688 | | | | | |

Sumber: data primer, diolah.

Tahapan selanjutnya dari proses rotasi adalah penghitungan skor faktor, yaitu data yang digunakan sebagai dasar untuk proses regresi berganda dan uji *t* sampel independen. Hair *et al.* (1998) menekankan pentingnya data skor faktor karena data skor faktor dianggap mampu mencerminkan kondisi responden yang sesungguhnya.

4.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung pengaruh setiap variabel independen yang digunakan, baik secara parsial maupun bersama-sama. Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Fleksibilitas dan adaptibilitas metode ini mempermudah penulis untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel independen terhadap variabel dependen (Hair *et al.*, 1998). Dengan program SPSS versi 10 dihasilkan persamaan regresi seperti yang ditampilkan pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi**

| Variabel Independen | Unstandardized Coefficients | t | Sig. |
|---------------------|-----------------------------|--------|-------|
| Konstanta | 2,439 | 5,103 | 0,000 |
| DURASI | -0,14 | -0,261 | 0,795 |
| KPUASAN | 0,234 | 3,288 | 0,001 |
| I.KHUSS | 0,130 | 1,962 | 0,053 |
| P.OPORT | -0,163 | -2,079 | 0,041 |
| KOMUN | 0,187 | 2,273 | 0,026 |

Sumber: data primer, diolah.

Persamaan regresi:

$$\hat{Y} = 2,439 - 0,14DURASI + 0,234KPUASAN + 0,130 I.KHUSS - 0,163P.OPORT + 0,187 KOMUN + \varepsilon$$

Keterangan:

\hat{Y} = kepercayaan

DURASI = durasi

KPUASAN = kepuasan pembeli

I. KHUSS = investasi khusus

P. OPORT = perilaku oportunistik

KOMUN = komunikasi

ε = error

4.5. Pengujian H_1 : durasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan

Pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. $H_0: \beta_1 = 0$ (durasi tidak berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan)
 $H_a: \beta_1 \neq 0$ (durasi berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan)
2. Nilai t hitung = $-0,261 < -1,96$, bermakna H_0 diterima (durasi tidak berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan).
3. Nilai signifikansi = $0,795 > 0,05$, sehingga H_0 diterima.

4.6. Pengujian H_2 : kepuasan pembeli berpengaruh positif terhadap kepercayaan

Pengujian pada hipotesis yang kedua menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. $H_0: \beta_1 = 0$ (kepuasan pembeli tidak berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan)
 $H_a: \beta_1 \neq 0$ (kepuasan pembeli berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan)
2. Nilai t hitung = $3,288 > 1,96$, bermakna H_0 ditolak (kepuasan pembeli berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan).
3. Nilai signifikansi = $0,001 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak.

4.7. Pengujian H_3 : nilai-nilai bersama berpengaruh positif terhadap kepercayaan

Variabel nilai-nilai bersama tidak memenuhi syarat dalam uji validitas sehingga variabel ini dikeluarkan dari analisis regresi.

4.8. Pengujian H_4 : investasi khusus berpengaruh positif terhadap kepercayaan

Pengujian pada hipotesis yang keempat menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. $H_0: \beta_1 = 0$ (investasi khusus tidak berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan)
 $H_a: \beta_1 \neq 0$ (investasi khusus berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan)
2. Nilai t hitung = 1,962 > 1,96, bermakna H_0 ditolak (investasi khusus berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan).
3. Nilai signifikansi = 0,053 > 0,05 sehingga H_0 ditolak.

4.9. Pengujian H_5 : perilaku oportunistik berpengaruh negatif terhadap kepercayaan

Pengujian pada hipotesis yang kelima menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. $H_0: \beta_1 = 0$ (perilaku oportunistik tidak berpengaruh secara negatif terhadap kepercayaan)
 $H_a: \beta_1 \neq 0$ (perilaku oportunistik berpengaruh secara negatif terhadap kepercayaan)
2. Nilai t hitung = - 2,079 > -1,96, bermakna H_0 ditolak (perilaku oportunistik berpengaruh secara negatif terhadap kepercayaan).
3. Nilai signifikansi = 0,041 < 0,05 sehingga H_0 ditolak.

4.10. Pengujian H_6 : komunikasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan

Pengujian pada hipotesis yang keenam menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. $H_0: \beta_1 = 0$ (komunikasi tidak berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan)
 $H_a: \beta_1 \neq 0$ (komunikasi berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan)
2. Nilai t hitung = 2,273 > 1,96, bermakna H_0 ditolak (komunikasi berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan).
3. Nilai signifikansi = 0,026 < 0,05 sehingga H_0 ditolak.

Secara menyeluruh, hasil pengujian berbagai hipotesis disajikan pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7.
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

| Variabel Independen | <i>Unstandardized Coefficients</i> | <i>t</i> | <i>Sig.</i> | H_0 | Pengaruh Variabel Independen Terhadap Kepercayaan |
|---------------------|------------------------------------|----------|-------------|----------|---|
| KONSTANTA | 2,439 | 5,103 | 0,000 | — | — |
| DURASI | -0,14 | -0,261 | 0,795 | Diterima | Negatif |
| KPUASAN | 0,234 | 3,288 | 0,001 | Ditolak | Positif |
| I.KHUSS | 0,130 | 1,962 | 0,053 | Ditolak | Positif |
| P.OPORT | -0,163 | -2,079 | 0,041 | Ditolak | Negatif |
| KOMUN | 0,187 | 2,273 | 0,026 | Ditolak | Positif |

Sumber: data primer, diolah.

4.11. Pengujian Multikolinearitas

Dari korelasi tersebut, model ini tidak mengalami masalah multikolinearitas (korelasi antarvariabel yang tinggi sehingga mempengaruhi independensi mereka terhadap kepercayaan). Apabila koefisien korelasi antarvariabel independen mencapai 0,8 atau lebih, maka hal tersebut menunjukkan adanya gejala multikolinearitas.

Tabel 8.
Matriks Korelasi Antarvariabel

| Variabel | PRCAYA | DURASI | KPUASAN | I.KHUSS | P.OPORT | KOMUN |
|----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| PRCAYA | 1,000 | 0,249 | 0,529 | 0,329 | -0,450 | 0,463 |
| LAMA | 0,249 | 1,000 | 0,271 | 0,263 | -0,367 | 0,302 |
| KPUASAN | 0,529 | 0,271 | 1,000 | 0,203 | -0,404 | 0,428 |
| I.KHUSS | 0,329 | 0,263 | 0,203 | 1,000 | -0,232 | 0,194 |
| P.OPORT | -0,450 | -0,367 | -0,404 | -0,232 | 1,000 | -0,389 |
| KOMUN | 0,463 | 0,302 | 0,428 | 0,194 | -0,389 | 1,000 |

Sumber: data primer, diolah.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan

Untuk variabel durasi, berbeda dengan harapan penulis, ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara lamanya seseorang menjalin hubungan dengan orang lain terhadap tingkat kepercayaan yang tumbuh atau berkembang diantara keduanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Batt (2003) yang memproposisi bahwa semakin lama satu pihak berhubungan dengan pihak lain, maka semakin turun kualitas kepercayaan diantara mereka. Batt (2003) menduga bahwa semakin dekat hubungan satu pihak dengan pihak lain, ada kemungkinan pihak lain mengambil keuntungan dari hubungan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan kata lain, semakin lama sebuah swalayan berdiri, kepercayaan swalayan terhadap pemasoknya semakin menurun karena kedua belah pihak sudah semakin mengenal satu sama lain, masing-masing telah mengetahui kelebihan dan kelemahan *partnernya*. Menurut cerita salahsatu pemilik swalayan yang ditemui oleh penulis, ada saat tertentu pemasok justru mengambil keuntungan dari mereka melalui perubahan harga produk, perubahan kemasan, dan lain-lain yang tidak pernah didiskusikan terlebih dahulu dengan pemilik swalayan tersebut.

Batt (2003) menyatakan bahwa kepuasan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi proses pembangunan kepercayaan antara petani dengan pemasok sayuran di Australia. Hal ini sejalan dengan hasil analisis hipotesis kedua, kepuasan pembeli berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan. Kepuasan merupakan akumulasi pengalaman yang terbentuk dalam sebuah hubungan jangka panjang, yang pada umumnya didasarkan atas evaluasi terhadap pengalaman membeli atau mengkonsumsi sesuatu dalam kurun waktu lama (Fornell, 1992). Perusahaan retail atau swalayan akan merasa puas apabila pemasok mereka cepat dalam menangani keluhan sehingga meminimalkan konflik diantara kedua belah pihak. Geykens *et al.* (1998) serta Mackenzie dan Hardy (1996) juga telah memproposisi bahwa semakin meningkatnya kepuasan seseorang atau satu pihak terhadap orang lain atau pihak lain, maka semakin tinggi kepercayaan yang melekat pada hubungan mereka. Artinya, akumulasi kepuasan mendorong pihak-pihak yang bertransaksi untuk menjalankan hubungan lebih lama sebagai hasil dari kepuasan yang diperoleh di masa lalu, saat ini, dan pengharapan akan adanya hasil yang serupa di masa mendatang (Anderson *et al.*, 1994).

Variabel investasi khusus berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Barton dan Weitz (1992) meskipun dalam ruang lingkup industri yang berbeda. Dalam penelitian Barton dan Weitz (1992), investasi khusus yang telah dijalankan akan menunjukkan sinyal kekuatan komitmen masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Dalam hal ini, penelitian mereka berfokus kepada hubungan pabrikan dengan distributor, pabrikan akan mempercayai sepenuhnya distributor mereka pada saat distributor tersebut mampu menerjemahkan selera pasar dan menentukan kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh pabrikan. Begitu juga, distributor akan tergerak untuk meningkatkan kepercayaan mereka lebih tinggi kepada pabrikan apabila pabrikan bersedia untuk mengikuti keinginan spesifik distributor bagi kemajuan bersama. Walaupun dari sisi lokasi kedua belah pihak berdekatan atau keduanya menggunakan sistem pelaporan yang sama, namun penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak menjamin

bahwa perusahaan retail atau swalayan dapat mempercayai pemasoknya, sehingga walaupun pemasok melakukan investasi bersama, belum tentu kepercayaan terhadap pemasok meningkat. Investasi khusus dilakukan semata-mata demi kepuasan konsumen akhir, yang dapat berbentuk: perusahaan retail atau swalayan membina pemasoknya agar mampu menyediakan produk-produk yang memenuhi standar kualitas tertentu, menentukan *trend* kebutuhan konsumen sehingga produk-produk pemasok mampu mengikuti perubahan selera konsumen setiap waktu, dan mengkoordinasi sebagian atau seluruh kegiatan pemasok agar pasokan dapat berjalan tepat waktu serta akurat.

Dari hasil analisis tampak bahwa perilaku oportunistik berpengaruh secara negatif terhadap kepercayaan. Perusahaan retail atau swalayan menyadari bahwa pemasok yang melakukan tindakan oportunistik tidak dapat dijadikan mitra dalam waktu yang lebih lama. Apabila hubungan dipertahankan, maka kerjasama mereka hanya dapat dilaksanakan dalam lingkup yang terbatas. Dalam konteks hubungan perusahaan retail dengan pemasok, perilaku oportunistik juga dapat dilihat dari sisi perusahaan retail apabila perusahaan ini terus menekan pemasok untuk memberikan harga terendah. Hal ini menunjukkan ketidakadilan yang diperoleh pemasok karena perusahaan retail lebih mengedepankan kepentingannya sendiri dibandingkankomitmen jangka panjang. Lebih jauh dijelaskan oleh Batt (2003), perilaku oportunistik yang sering dilakukan salahsatu pihak akan berdampak penarikan diri pihak lain dari hubungan atau putusnya komitmen hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Bahkan, salahsatu pihak yang merasa dirugikan akan terus menghindar dari hubungan transaksional dengan pihak lain yang dianggap bertindak tidak jujur. Pada hasil akhir penelitiannya, Batt menyarankan perlunya tingkatan kepercayaan minimum untuk pemasok atau perusahaan retail agar hubungan mereka tetap terjalin.

Komunikasi dua arah yang lancar antarpihak dapat meningkatkan kepercayaan diantara mereka, sehingga seiring dengan berjalannya waktu, kedua belah pihak dapat saling memahami satu sama lain. Anderson dan Weitz (1989) juga mengemukakan bahwa komunikasi mempengaruhi aspek kepercayaan dalam jaringan pemasaran. Komunikasi yang dilandasi kepercayaan tidak terbatas hanya pada transaksi jual beli, namun juga kerjasama untuk memperoleh keuntungan bersama di masa mendatang. Hal ini juga sesuai dengan proposisi Stern dan El-Ansary (1988) serta Anderson dan Narus (1990) yang menyatakan komunikasi dalam konteks distribusi bermanfaat untuk mengurangi konflik, meningkatkan kepercayaan, dan memperbaiki koordinasi antarpihak. Dengan kata lain, waktu, upaya, dan berbagai masalah yang muncul dari suatu proses pertukaran informasi dan komunikasi mampu mengikat kedua belah pihak ke arah aliansi bisnis yang lebih mendalam dan berjangka panjang.

5.2. Implikasi Manajerial

Hasil penelitian replikasi ini tidak jauh berbeda dari hasil yang diperoleh Batt (2003), yaitu kepuasan, investasi khusus, perilaku oportunistik dan komunikasi menentukan tingkatan kepercayaan yang muncul dan terjalin antara swalayan dengan pemasoknya, sedangkan durasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan dalam sebuah hubungan bisnis.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan swalayan untuk membangun jaringan informasi dalam rantai pasokan (*supply chain information system and networks*) yang memungkinkan pemasok mengakses serta memperoleh data-data (dengan batasan tertentu) di perusahaan retail seperti jenis kebutuhan, jumlah, tingkatan kualitas, dan sistem pembayaran pada produk-produk agar tercipta sistem pemesanan persediaan yang efisien dan efektif. Bentuk investasi khusus seperti ini dapat memperpanjang siklus hubungan perusahaan retail-pemasok, sekaligus meningkatkan kepercayaan antarmereka lebih tinggi dari waktu ke waktu.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tidak adanya identifikasi perbedaan antara kepercayaan yang muncul di *minimarket* atau *supermarket*. Selain itu, sumber kepercayaan ini sesungguhnya berasal dari swalayan atau perorangan juga tidak dieksplorasi dalam penelitian ini. Moorman *et al.* (1993) dan Swan *et al.* (1985) telah mendeskripsikan berbagai faktor interpersonal yang berpengaruh terhadap kepercayaan. Selain itu, Morgan dan Hunt (1994) telah menjelaskan cara-cara yang ditempuh seseorang untuk membangun

**Determinan Kepercayaan dalam Hubungan Business-To-Business di Pasar Swalayan Modern
(Tri Hendro Sigit Prakosa)**

kepercayaan terhadap dirinya dalam suatu organisasi. Doney dan Cannon (1997) menyatakan seorang konsumen dapat mempercayai sebuah perusahaan, para tenaga penjualnya, atau keduanya pada saat melakukan pembelian. Penulis sependapat dengan pernyataan terakhir bahwa sumber kepercayaan berasal dari swalayan atau orang-orang yang bekerja di swalayan tersebut.

Untuk kelanjutan penelitian ini, penulis menyarankan untuk memasukkan lebih banyak variabel independen yang diduga mempengaruhi kepercayaan, misal: komitmen hubungan, kredibilitas, kemampuan adaptasi, kemampuan untuk bekerjasama, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan mengingat besaran *coefficient of determination* (r^2) dari penelitian ini hanya sebesar 41,4%, yang bermakna hubungan variabel independen dengan kepercayaan bersifat lemah (*weak relationship*). Setiap dimensi yang mempengaruhi kepercayaan bersifat saling melengkapi sehingga munculnya kepercayaan merupakan kontribusi dari banyak faktor independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E., Leonard L., and Barton, W., (1987), "Resource Allocation Behavior Conventional Channels." *Journal of Marketing Research*, No. 23, pp. 254-262.
- Anderson, E., Fornell, C., and Lehmann, D., (1994), "Customer Satisfaction, Market Share, and Profitability: Findings from Sweden." *Journal of Marketing*, Vol. 58, pp. 53-66.
- Anderson, J., and Narus, J., (1990), "A Model of Distributor's Perspective of Distributor-Manufacturer Working Relationships." *Journal of Marketing*, Vol. 48, pp. 62-74.
- Anderson, E., and Weitz, A., (1989), "Determinants of Continuity in Conventional Industrial Channel Dyads." *Marketing Science*, Vol. 8., pp. 310.
- Anderson, E., and Weitz, B., (1992), "The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels." *Journal of Marketing Research*, Vol. 29, pp. 18-34.
- Bagozzi, R., (1994), *Principles of Marketing Research*. Cambridge: Blackwell.
- Batt, P., (2003), "Building Trust Between Growers and Market Agents." *International Journal of Supply Chain Management*, Vol 8 (1), pp. 66.
- Carmines, E., and Zeller, R., (1979), *Reliability and Validity Assessment*. Sage: Newbury Park.
- Doney, P.M., and Cannon, J., (1997), "An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationships." *Journal of Marketing*, Vol. 61, pp. 35-51.
- Dyer, J.H., Cho, D., and Chu, W., (1998), "Strategic Supplier Segmentation: The Next Best Practice in Supply Chain Management." *California Management Review*, Vol. 40 (2), pp. 57-77.
- Dwyer, F, P. Schurr, and S. Oh., (1987), "Developing Buyer-Seller Relationships." *Journal of Marketing*, No. 51.
- Fornell, C., (1992), "A National Customer Service Barometer: the Swedish Experience." *Journal of Marketing*, Vol. 55, pp. 15-21.
- Fynes, B., Chris Voss, and Seán de Búrca, (2005), "The Impact of Supply Chain Relationship Dynamics on Manufacturing Performance." *International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 25, pp. 6.
- Ganessan, S., (1994), "Determinants of Long-term Orientation in Buyer-Seller Relationships." *Journal of Marketing*, Vol. 58, pp. 223-248.
- Geykens, I., Steenkamp, J., and Kumar, N., (1998), "Generalizations About Trust in Marketing Channel Relationships Using Meta-Analysis." *International Journal of Research in Marketing*, Vol. 15, pp. 245-248.
- Geykens, I., Steenkamp, J., and Kumar, N., (1999), "Generalizations About Trust in Marketing Channel Relationships." *International Journal of Research in Marketing*, Vol. 15 (3), pp. 237.
- Gundlach, G., Achrol, R., and Mentzer, J., (1995), "The Structure of Commitment in Exchange." *Journal of Marketing*, Vol. 59, pp. 78.
- Hair, Joseph F., R. E. Anderson, R. L. Tathan and W. C. Black, (1998), *Multivariate Data Analysis*, 5th edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc. pp. 118.

- Low, B., (1996), "Long-Term Relationships in Industrial Marketing: Reality or Rhetoric?" *Industrial Marketing Management*, No. 25, pp 25.
- Mackenzie, H., and Hardy, K., (1996), "Manage Your Offering or Manage Your Relationship?" *Journal of Business and Industrial Marketing*, Vol. 11, pp. 20-37.
- Moorman, C., Desphande, R., and Zaltman, G., (1993), "Factors Affecting Trust in Market Research Relationships." *Journal of Marketing*, pp. 91-101.
- Morgan, R., and Hunt, S., (1994), "The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing." *Journal of Marketing*, July, pp. 29-38.
- Morris, T.J., (1981), "Opportunistic Behavior and the Law of Contract." *Minnesota Law Review*, hal. 570-590.
- Oliver. R.L., (1980), "A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions." *Journal of Marketing Research*, Vol. 17, pp. 460-469.
- Santoso, S., (2003), *SPSS Statistik Multivariat*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sekaran, U., (2000), *Research Methods for Business*. 3rd edition, New York: John Wiley & Sons.
- Stern, L., and El-Ansary, A., (1988), "Power Measurement in the Distribution Channel." *Journal of Marketing Research*, Vol. 9, pp. 47-52.
- Swan, J., Trawick, I., and Silva, D., (1985), "How Industrial Salespeople Gain Customer Trust." *IndustrialMarketing Management*, pp. 207-211.
- Williamson, O., (1985), *The Economic Institutions of Capitalism*. New York: The Free Press.
- Zikmund, G., (2003), *Business Research Methods*. Thomson South-Western.

**EFFECTS OF TRI HITA KARANA TRADITION AND GROSS REGIONAL
DOMESTIC INCOME ON THE ECONOMIC GROWTH OF BADUNG REGENCY,
GIANYAR, AND DENPASAR CITY OF BALI PROVINCE 1985-2010**

I Ketut Nama

Lecturer at Faculty of Economic UPN "Veteran" Yogyakarta

Purwiyanta

Lecturer at Faculty of Economic UPN "Veteran" Yogyakarta

Abstract

This study is trying to describe the effect of the Tri Hita Karana tradition as the Balinese's specific culture and Gross Regional Domestic Income on the economic growth of Badung Regency, Gianyar and Denpasar City of Bali Province.

Data used in the study were secondary data consisting of data on the Gross Regional Domestic Income of three regencies/municipalities, data on the expense of traditional ceremony and fiesta as the variable proxies of the tri hita karana culture, and data of the mid-year population since 1985-2010, and were analyzed using regression model of panel data.

The findings showed that: (1) the tri hita karana variable as a specific culture of the people of Bali has negative and significant effect on the regional economic growth of the three regencies/municipality. The negative effect of this variable was due to any tendencies such as: (a) that the ceremonies require a huge amount of costs like ngaben ceremony, teeth cutting, wedding, and other major ceremonies, all of which are carried out in mass; (b) there tends to be a practical profit sharing of incomes from the tourist objects for the traditional villages (pakraman) used for various traditional rites. Consequently, this will decrease the per capita expenditure for the ceremonies and fiesta as the proxies of the tri hita karana variable. (2) The per capita Gross Regional Domestic Product has positive and significant effect on the regional economic growth of the three regions. This finding was in accordance with other researches' findings, which in principally states that there is a positive relationship between the increase of per capita income and the economic growth of a region/country.

Keywords : *tri hita karana tradition, per-capita Gross Regional Domestic Product and economic growth.*

1. BACKGROUND

As a main icon of Indonesia tourism, Bali attracts at least two million tourists from overseas every year. Many factors contribute to the increase visit of the tourists to the island. They are beautiful beaches as Kuta, Sanur, Legian, Nusa Dua, Tanah Lot and other beaches. Besides these beautiful beaches, Bali also has other non-beach tourism objects, also beautiful, such as Kintamani natural views: Bedugul Lake, Ubud, and other uncountable tourist objects.

Other than the beautiful panorama as stated above, one of the major interesting factors attracting the tourist to come to Bali is the culture of the region, which is unique called the *tri hita karana*.

The main characteristics of the *tri hita karana* tradition are its ceremonial rites. This tradition is the life goal of the Balinese in reaching their welfare and happiness. *Tri* means three, *hita* means happiness, welfare, and *karana* is the cause. Therefore, the *tri hita karana* is meant the three causing happiness and welfare. In order to reach the happiness and welfare, the Balinese should create a balanced relationship with God (*Parhyangan*), other human beings (*pawongan*) and the environment (*palemahan*) (Triguna, 1997) .

The efforts dedicated by the Balinese in making such relationship are implemented in numerous forms of ceremonies (*yadnya*), such as *Dewa Yadnya* and *Pitra Yadnya*. Their efforts in creating a balanced relationship with others are also manifested in many kinds of traditional ceremonies (*yadnya*) such as *Resi yadnya* and *Manusa Yadnya*. While, in establishing the balance with the environment, they practice a ceremony named *Bhuta Yadnya*. These abundant number of ceremonies in the region result in a popular call for the Balinese as *man of ceremonies*. They hold ceremonies for themselves, environment, nature, trees, cattle, and things. Offerings and arts performance in those ceremonies have lived up Bali as full of joy and brightly. It is these various kinds of traditional rites that promote the increased number of tourists coming to the island.

In Bali, every minute and every hour, days to weeks and months, years, centuries, at any time the Balinese live their life without leaving behind aroma of incense, myrrh smoke and offerings. The ceremonies are the goal, they are more important than children's education and should be put in the first place compared to the daily needs of food and clothes (Sukarsa, 2008).

The Balinese have a belief that the ceremonies are the most important thing, which taking them to the peak of welfare and highest happiness (Sudira, 2010).

Geriya (2000) argued that during the three past decades the expenditure spent for the ceremonies among the people of Bali has sharply increased as with their increased per capita income. This means that the high expenditure for cultural customs has important role in promoting the visit of the foreign tourists.

Similar opinion was also given by Sukarsa (2008) as stating that the consumptive expenditure for the ceremonies and cultural festivals continuously increases as with the ongoing transformation process among the Balinese from the agricultural sector to tourism industry. The transformation has influenced the consumption, distribution, and other expenses patterns, consequently bringing about the economic growth of the province.

The increased Gross Regional Domestic Product impacted by tourism development influences the increase of per capita income (Gross Regional Domestic Product) of the three regencies/municipality. Chenery (1975), argued that there is a positive relationship between the increased per capita income and the economic growth of a country. Similar argument is also expressed by Kuznet and Balwin (1986), as saying that when per capita income improves, the consumption pattern of the community will also be affected, which will, in turn, encourage the economic growth of a country.

Griffin (126;1999) stated that there is a positive relationship between culture and economic growth. When a culture penetrates into a region, it will firstly interact with the local culture and then gradually will affect the local people's life pattern. The changing life pattern of the community will be manifested through the improved quality of education, healthy life, information and communication, which will gradually increase the human resources' quality of the local people and subsequently give positive effect on the economic growth. Nolland (2010) said that there is a positive relationship between religion and culture with the economic performance. When one's belief in a religion is becoming stronger, this will promote better work culture, therefore will eventually improve the economic performance and promote the growth. The findings by Barro (2003) demonstrated that a better belief in a religion will affect the individual characteristics like increased participation in the church's activities, which of course improve the economic performance and promote the growth.

1.1. Problem Formulation

Do the *tri hita karana* tradition as a local wisdom of the Balinese and Gross Regional Domestic Product have effect on the regional economic growth of the three regencies/municipality in Bali Province of 1985-2010?;

1.2. Objectives

To analyze whether the *tri hita karana* culture as a local wisdom of the Balinese and Gross Regional Domestic Product affect the regional economic growth of Badung and Gianyar Regencies and Denpasar Municipality of Bali Province since 1985-2010 ?;

2. REVIEW OF LITERATURE

Economic Growth and Development

At the early stage of a country or a region's economic development, the economic development strategy is in general oriented more to the growth. This is because the Western economists assume that the major issue facing the developing countries is lack of capital resulting from the poor per capita income. For this reason, the development strategy in the developing countries focuses more on the improvement of per capita income. This is called the economic *growth-oriented strategy*). When the per capita income is lower, the domestic saving will also be decreased, which finally impede the investment flow-in, while investment is a important factor in increasing a country's income and development.

On the other hand, the developing countries will face the relatively high population growth. Such condition will force them to speed-up their economic growth above the population growth level and then the per capita income will improve. It is expected that any economic growth will settle the unemployment, poverty and the gap of income distribution.

However, the development focusing on the economic growth does not give great impact on the economic growth of the developing countries. This statement is based on the experience many developing countries have faced during the 1950s and 1960s, where despite of their high economic growth, they could not improve the wealthy of the people. It means that, while the people per capita income increase, the increased income is only enjoyed by a small number of people.

In fact, the economic development cannot be independently managed from the economic growth. The economic development encourages the economic growth, and on the contrary, the economic growth will make the economic development working well. But, the term *growth* is not identical with the definition of *development*. The economic growth means output improvement, whereas the economic development refers not only to the output increase, but also to the improved number of outputs that can be produced, and also to the changing production technology, institution and the distribution. The economic growth is not just to enlarge the input that will result in the increased output, but the increment of the input should be followed by greater production efficiency or increased productivity (Kindleberger, 1977).

The economic development does not merely mean the economic improvement, but indeed it is more than that, where the roles of other factors such as politic, cultural, technologic advancement, education and so forth contribute to give a value to the development, so that it will be multidimensional. Therefore, the economists begin to provide a new paradigm to the meaning of the economic development.

In principal, it constitutes an effort by the community to develop the economic activities and improve wealthy. This means that the economic development is a process resulting in the increasing per capita income of the people in a certain country in the long term.

Todaro (2006) defined the economic development as a multidimensional process involving the basic changes of social structure, people behavior, and national institutions, other than to accelerate the economic growth, dealing with the gap, and poverty reduction. Thus, in principal, the development should reflect the total transformation of the people or social adaptation as a whole without disregarding multiple basic needs and individual and social groups interests to move forward to better life, both material and spiritual.

Considering the meaning of development as described above, there are three key elements inherently existing in the economic development, i.e. firstly, the economic development describes a process of a continuous transformation; secondly, it indicates the successful achievement in increasing per capita income; and *thirdly*, the increase per capita income will last for longer period of time.

The economic development is qualitative in nature and does not only include production and per capita improvement, it also encompasses the changes in production structure and input allotment in various economic sectors such as in institutions, education, and technology. The concept of economic development and modernization involves value systems relating the national or community goal to be achieved in the economic growth, evenly distribution of income, poverty eradication, education for the community, economic and political participations, and many others (Kamaluddin, 1999).

In the meantime, what is meant by the economic growth is a process of increasing the production capacity of a economy that is manifested in form of national income increase. A region is deemed high in its economic growth when it experiences increased real Gross Regional Domestic Product.

The term economic growth is used to indicate or measure a country's economic achievement. It describes the physical development of goods and service production applicable to a country such as the increased number of industrial goods production, infrastructure, increased schools, improved number of service production and increased production of capital goods.

The economic growth is a long-term increase of a country's capacity for the provision of more products for its people and this capacity is increasing in accordance with the technologic progress and institutional adaptation and needed ideology (Kuznet in Sirojusilam, 2003). In the implementation of government policies, particularly those in economic sector, will be shown in the economic growth. The economic growth implies the growth rate of various economic sectors.

Economic growth can be best described by real national income. The growth rate of real national income is indicated by Gross Domestic Product to the constant price. If the economic growth is negative, it is an indication that the economic activities is decreasing, and otherwise, if it is positive, it means that the economic activities are increasing.

The economic growth shows the changing value of economic activities per year. The calculation of economic growth per year can be done by comparing the change of the national income in the year minus the previous year national income divided by the previous year national income or, in summary, it may be described in the following equation :

$$gt = \frac{\Delta PDB}{PDB} \quad gt = \frac{\Delta PDB}{PDB} \quad \text{or} \quad gt = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \quad gt = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}}$$

where:

- gt = Economic growth
- PDB = Gross Domestic Product
- ΔPDB = Modification of Gross Domestic Product
- PDB_t = Gross Domestic Product of year t
- PDB_{t-1} = Gross Domestic Product before the year t

And to calculate the average growth rate per year, the following equation is then applied:

$$r = \left[n - 1 \sqrt{\left(\frac{tn}{t0} - 1 \right)} \right] \cdot 100\%$$

where:

- r = Average economic growth rate per year
- n = number of years (counted from ...up to...)

Effects of Tri Hita Karana Tradition and Gross Regional Domestic Income on the Economic (I Ketut Nama)

tn = period of end year

t0 = period of initial year

The growth should go hand in hand and be planned, create more evenly distribution of opportunity and results of development. As such, the poor, underdeveloped, unproductive regions will be productive, resulting in the acceleration of the growth (Sirojuzilam : 2003).

Tri Hita Karana as an Ideology/Culture of the Balinese

Another finding from an empirical study by Chenery (1960) indicates that other factors contributing to the economic growth of a country are government policies, climate, and cultural influence.

The Balinese culture is in principle based on the values having their original sources in the Hinduism teachings. It is called an unique culture given birth to the blending of the spirituality, religion, tradition, arts, aptitude and environment of Bali that are *me-taksu*. The people of Bali acknowledge the difference (*rwa bhineda*) frequently determined by space (*desa*), time (*kala*) and real condition at field (*patra*). These concepts of space (*desa*), time (*kala*) and *patra* make the Balinese culture flexible and selective in accepting and adopting the influences of external cultures. This basic feature grants enduring strength to the Balinese culture to keep on developing.

The Balinese culture highly appreciates the principles of balance and harmony in the relationship between human being with God (*parhyangan*), with others (*pawongan*), and with the natural environment (*palemahan*), as reflected in the ideology of *Tri Hita Karana* (THK). Lexically, *Tri Hita Karana* means three causes of wealthy and happiness. *Tri* means three; *Hita* is life, wealthy, happiness, eternality, prosperity,; and *karana* means a cause. Thus, *Tri Hita Karana* contains a meaning of three causes of wealthy and happiness originating in the harmonious relationship between (1) man and God, (2) man with other human beings, and (3) man and natural environment. Harmony means doing things containing goodness and purity starting from the thought, verbally spoken in utterances and visually shown in behavior /deed.

How human beings develop harmonious life, according to Titib (2003), is by way of the following: God creates the universe with all its contents. God is a real source of bliss. When every person can establish a harmonious relationship with God the Creator of the universe by complying with His teachings, then indeed God will bestow love upon all humans and other living creatures. Harmony is a system of value that should inherently be planted in every individual and externally expressed in form of appreciating or tolerating others. The harmony between human beings and natural environment is similar in value with other two harmonies. Bliss and peace immediately disappear when the environment is disordered.

Tri Hita Karana places the harmony teaching between two things, namely *bhuwana agung* (macro-cosmos) and *bhuwana alit* (micro-cosmos). In a perspective of *bhuwana agung*, human beings are *bhuwana alit* being part of *bhuwana agung* who has similar creator elements (Dwijendra, 2003; Waskita, 2005). The *Tri Hita Karana* ideology says that life has its original sources in three major elements: soul (*atma*), physics (*angga*) and power (*prana*). These three elements are called *Tri Hita Karana*. Bliss or harmony (*hita*) will be manifested when there are three causes (*tri karana*), namely soul, physics, and power. When one of the three causes of bliss disappears, the happiness will disappear too. Physical body and power without soul are like a corpse who will never be happy. Soul without physics is a shadow that can do nothing.

Traditionally, a traditional village in Bali is a whole and integrated place of community that is built upon the ideology of THK consisting of three elements such as: *kahyangan tiga* (*pura desa*); *krama desa* (people); and village area (*karang desa*). In the eyes of the Balinese the territory concept is an area unit where the villagers collectively perform the ceremonies and other social activities organized by a culture called *desa adat* (traditional village). Village is an area unit of administration with the names of *desa dinas/kelurahan/perbekelan*. In a village area, there are two organizations, i.e. *desa dinas* and *desa adat*. The social system of the village is a binding agent of the villagers managed in the *awig-awig desa*, customs and belief (Dwijendra, 2003).

The formation of traditional village (*desa adat*) should comply with such conditions as: (1) having a area with particular borders called *palemahan desa*, (2) having the villagers called *pawongan desa*, (3) having a *pura* or temple as a center of worship (ceremony) for the villagers that is called *kahyangan tiga*, and (4) having a traditional administration (*pemerintahan adat*) that is based on the *awig-awig* (traditional custom rules) of village.

How do the Balinese maintain a balanced relationship with God? They make it by performing various kinds of ceremonial rites (with all their offerings). How do they preserve the harmonious relationship with other humans. This is done not only by common activities mostly relating to how the people preserve the relationship with God and environment such as having *gotong-royong* in the temple, *sangkep* at *banjar* and having *gotong-royong* in cleaning the surrounding environment, but also reflected by the ceremonies relating to the human ceremony, which is *yadnya*. There are numerous ceremonies closely relating to the *yadnya* man, such as (1) the *magedong-gedongan* (7-month pregnancy), (2) baby birth, (3) the *kepus puser*, (4) the *ngelepas hawon* (when a baby is 12 days old) relating the naming of a baby, the *kambuhan* (of 42 days age), the *nelu bulanin* (a baby of 3 months old based on Bali calendar), the *satu oton* (6 months), the teeth growing (*ngempugin*), the ceremony of first tooth loose (*makupak*), the *menek deha* (*rajaswala*), the teeth cutting and so on. While how the people preserve the harmonious relation with the surrounding environment is reflected by many ceremonies such as *tumpek landep*, which is specially performed to appreciate (to keep balance) the existence of animals and plants.

Therefore, the Balinese culture with its ideology of *Tri Hita Karana*-nya cannot be taken apart from the life of the people through their various unique ceremonial rites. All these attract the foreign tourists to visit the island. The question is that whether this ideology affects the economic growth of Bali Province.

3. METHOD

This study focused on the effects of the *tri hita karana* as a traditional culture of the Balinese and Gross Regional Domestic Product on the economic growth of three regencies/municipality: Badung, Gianyar, and Denpasar City during the time periods of 1985 – 2010. These three regions were selected because of their unique characteristics compared to other regions in which they are centers of tourism development in Bali.

It was conducted using quantitative approach for the analysis of the effects of the *tri hita karana* and Gross Regional Domestic Product on the economic growth of the three regions: Badung, Gianyar and City of Denpasar.

Data of the study were fully secondary ones consisting of: (1) data of gross regional domestic product of Badung and Gianyar Regencies and Denpasar City during the periods of 1985 – 2010 on the basis of constant prices of 2000 obtained from the Gross Regional Domestic Product data of the three regions from the Statistical Bureau office of Bali Province; (2) data of ceremonial and festival expenditures spent by the Balinese in the three regions as proxies of the *tri hita karana* variable.

Given the observed data were *time series* and *cross sections*, then the statistical analysis used the *pooled regressions* model. The *time series* data encompassed those from periods of 1985-2010, while *cross sections* ones were taken from the three regions in Bali.

There are some advantages obtained by using the panel data. Firstly, the panel data as combination of time series and cross section data were capable of providing more data so that they will result in greater degree of freedom. Secondly, combining the information from the *time series* and *cross section* data will deal with the problem emerging in case of the variables was omitted.

In general, using two panels we could produce the different intercept and coefficient slope in every regency/ municipality and every period of time. For this reason, the estimation of the regression of the panel data highly depended on the assumption we have made regarding intercept, slope coefficient and its distracting variables. There were some possibilities to emerge, including: (1) it was assumed that the intercept and slope were constant all the time long and individual (regencies/municipality) and the difference of intercept and slope were made clear by the distracting variables; (2) it was assumed that the slope was constant but the intercept was different among the individual; (3) it was assumed that the slope was constant but the intercept was different both inter-individual and between individual; (4) it was assumed that the intercept and slope were different between individuals; and (5)

**Effects of Tri Hita Karana Tradition and Gross Regional Domestic Income on the Economic
(I Ketut Nama)**

it was assumed that the intercept and slope were different between times and individuals.

There were some methods commonly used in estimating the regression model of the panel data, one of which was the assumption that the slope was constant but the intercept was different between individuals (*Fixed Effect*).

Based on the predetermined variables, the specification of the model in this study was:

$$Gr_{it} = b_0 + b_1 LnTHK_{it} + \beta_{109} \quad Gr_{it} = b_0 + b_1 LnTHK_{it} + \beta_{109}$$

where:

- i = regency/municipality (1,2,3)
- t = years (1985, 1986, ..., 2010)
- THK_{it} = *tri hita karana* proxy from the ceremonial and festival expenditures in the three regencies: Badung, Gianyar and Denpasar City.
- $PDRBPK_{it}$ = Per Capita Gross Regional Domestic Product of the regencies/municipality
- Gr_i = the regional economic growth of Badung, Gianyar and Denpasar City
- b_p = elasticity coefficient

4. RESULTS

The panel data regression using a *fixed effect* mode resulted in the following equation:

$$Gr_{it} = -5,634 - 0,138 Ln THK_{it} + 1,420 Ln PDRBPK_{it}$$

$$t = (-9,862) \quad (-2,137) \quad (19,860)$$

$$R^2 = 0,95 \quad F = 353,22$$

From the equation above, it can be described that there is negative and significant effect between the *tri hita karana* variable proxied with the per capita expenditures for the ceremonies and festivals with the economic growth of Badung and Gianyar Regencies and Denpasar City. This means that if the per capita expenditures for the culture increase, the regional economic growth of the three regencies/municipalities will decrease. Otherwise, if the per capita expenditures for the cultural variables decrease, the economic growth of the three regions will increase.

At a glance, the negative sign in the cultural variables indicates that if expecting high economic growth in the regions, the expenses for the cultural activities should be reduced. This is contradictory to the intention and purpose of the overseas tourists visiting Bali (Regencies of Badung, Gianyar and Denpasar City) who are in general eager to watch the unique cultural processes only existing in Bali. In other words, the more the cultural ceremonies both relating to the relationship between human beings with God, human with others and with the environment, all of which are the *Tri Hita Karana* culture for the Balinese, the more interesting they are for the tourists to come to Bali and the more increasing the economic growth of the three regions. On the contrary, the less the ceremonies are (relating to the relationship between human beings with God, human with others and with the environment), the more decreasing the attraction they have for the tourists coming to the three regions, and the more decreasing the economic growth of the regions will be.

As we know, the culture of the Balinese people is reflected by the *Tri Hita Karana* ideology, which is how the Balinese establish the balanced relations with God, other people and environment in order to get to their happiness and prosperity. Their effort for a harmony with God is shown by various kinds of ceremonial rites, particularly those closely relating to the ceremonies of *Dewa Yadnya* and *Pitra Yadnya*. Similarly, they establish a harmony with other human beings by performing numerous ceremonies in relation to the rites of *Yadnya* and *Rsi Yadnya*, and with environment by appreciation through many forms of rites, particularly the *Bhuta Yadnya* rite such as the nyepi-relating *tawur agung kesange*, *mecaru*, *tumpek landep*, all of which describing how the Balinese give their appreciation to animals, plants and things existing in the environment. Therefore, the *Tri Hita Karana* as an ideology of the Balinese is reflected by a range of ceremonial activities, then it is not surprised that almost every day the people give offerings as the main tools in such ceremonies.

Then, a question arises should the negative sign of the *tri hita karana* proxy from the ceremonial and festival costs be reduced to boost the economic growth? The findings demonstrated that the negative sign of the variable *tri hita karana* (THK) does not necessarily mean that if the ceremonial activities are reduced, the economic growth will be increasing, and vice versa. Where during the past years there has been a tendency, not applied to Bali only, but also to other regions in Indonesia, that the ceremonial rites, particularly those requiring a significant high amount of funds such as *ngaben*, teeth cutting, wedding and other major ceremonies, are performed in mass. Therefore, in the past years in Bali and other regions in Indonesia there are what so called mass *ngaben*, mass teeth cutting, mass wedding, and many others. The main purpose of such mass ceremonies is to help the people (the Balinese) who are economically poor (with middle and low incomes) to perform their religious duty without decreasing the actual meaning and nature of the ceremonies, since those ceremonies are very costly. The experience the author has had when performing the *ngaben* in 2000, the total cost spent for this rite was at least Rp 30 million. On the other hand, there was once a *ngaben* at the author's village (Gobleg village) and those people who participated in the mass *ngaben* were only charged an amount of Rp 350.000 per household. So that, by performing mass ceremonies as such, the per capita expenditure for the rites can be reduced, since in this way the total cost is taken together. Besides, this will help the poor to run their duty without reducing the meaning and nature of the ceremony. Furthermore, the mass participation will liven up the ceremonies because of a large number of people involved in the ceremonies, thus the positive impact is that it will attract more tourists coming to the region.

Another example to explain how the cost of the ceremonies will be minimized in such a way that the poor can participate is found in the mass teeth cutting rite at Tanjung Bungkak of Sanur Badung, which was held on 27 June 2011 and sponsored by Ide Pedanda Manuabe, where the poor people was only charged Rp 750 as a prerequisite. The program of mass teeth cutting was planned by the man to be held once in every six month during the school holiday so that it can be followed by all Balinese from everywhere.

By performing such mass ceremonies, besides to reduce the per capita expenditure, the purpose to reach is to make them more living up because of a large number of people involved.

As such, various kinds of ceremonial activities done in mass will reduce the per capita expenditure for the activities, so that with similar quantity, the expenditure for those ceremonies will be minimized. Thus, it is not surprised that the cultural variables proxied by the ceremonial expenditure are signed negatively.

Furthermore, there has been awareness of some local governments through the use of revenues resulting from the tourism objects management to support the operation of various ceremonies as experienced by those people around *Tanah Lot*. One third of total revenues from the operation of the tourist object of *Pura Tanah Lot* go into Pakraman village's (traditional village) cash, which is then used for supporting many ceremonial rites and festivals. Consequently, though there are many traditional ceremonies held at the village, the people do not need to pay the cost because it has been paid from the revenues of the tourism object. Therefore, the per capita expenditures for the ceremonies will be decreasing in some past years, but it is by no means that various traditional ceremonies as proxies of the cultural variable will decrease too.

Meanwhile, the Gross Regional Domestic Product variable has positive and significant effect on the regional economic growth at the three regions with the elasticity coefficient value being 1.42, meaning that every increase of 1 percent of Gross Regional Domestic Product of the three areas will increase the economic growth of 1.42 percent. The positive effect of the per capita Gross Regional Domestic Product variable is in accordance with the opinions of previous researchers.. Chenery stated that there is positive correlation between the increase of per capita income with the economic growth. Kuznet and Balwin (1986) argued that the higher the per capita income of a country, the more rapidly the process of economic growth of the country will be.

The increase of Gross Regional Domestic Product logically will influence the people's consumption pattern on the basis of Engel's law. When the people's income increases, the percentage of income used to buy industrial and service products will relatively be increasing, although the percentage of income used to buy agricultural products relative decreases. The changing consumption pattern as stated above will in principle encourage the industrial and service sectors to better condition, therefore it will increase the Gross Regional Domestic Product of

Effects of Tri Hita Karana Tradition and Gross Regional Domestic Income on the Economic (I Ketut Nama)

the region, which subsequently will boost the regional economic growth of the three regions. As the main icon of Bali tourism, the three regions since beginning have never depended on the agricultural sector to boost the economy. They rely on service sector, in this case tourism, and the tourism supporting sector such creative industry as a basis for economic growth. Thus, it is not surprising that both sectors are not only machines of economic growth, but also the largest employment providers in those regions. For example, in 2010 of total the Gross Regional Domestic Product of Badung Regency, 81.3 percent came from the tertiary sector, while that of Denpasar City and Gianyar Regency Gianyar, both sectors contributed to the Gross Regional Domestic Product of 71.8 percent and 57.9 percent, respectively.

5. CONCLUSION

In the past few years, many kinds of ceremonies (yadnya) requiring a huge amount of funds like *ngaben*, teeth cutting, wedding and other major ceremonies have practiced in mass. Similarly, there has been a tendency that the revenues from some tourism objects in Bali have in part entered into the *pakraman*/traditional village's cash to be used for financing the ceremonies. This will give impact on the decreased per capita expenditures for the ceremonies and festivals (as proxies of the *tri hita karana* variable). Then, it is not surprising that the cultural variable has positive and significant effect on the regional economic growth of the following three regions: Badung, Gianyar and Denpasar City.

Whereas, there has been a positive and significant relationship between the per capita Gross Regional Domestic Product variable with the regional economic growth of the three regions. This is in accordance with the findings of previous study that there was positive relation between the increasing per capita incomes with a country/region's economic growth.

REFERENCES

- Acwin Dwijendra, Ngakan Ketut, (2003), " Perumahan dan Pemukiman Tradisional Bali", *Jurnal Permukiman "NATAH"* 11, hlm. 8-24.
- Adisasmita H.R., (2005), "Dasar-dasar Ekonomi Wilayah", Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ardika. I.W., (2007), "Kebudayaan Lokal, Multikultural, dan Politik Identitas dalam Refleksi Hubungan Antar Etnis Antara Kearifan Lokal dengan Warga Cina di Bali Adat dan Budaya", [Http://okanila.brinkster.net/mediaFull.asp?ID=1289](http://okanila.brinkster.net/mediaFull.asp?ID=1289), didownload tanggal 10 Agustus 2011.
- Badan Pusat Statistik, (1985-2010), " Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Bali", BPS, Jakarta.
- Barro, Robert J. dan Sala-i Martin X, (2004), " Economic Growth, Second Editions, Mc-Grow-Hill, New York.
- Barth, Fredrik, (1993), " Balinese World. Chicago, The University of Chicago Press.
- Boediono, (2009), " Teori Pertumbuhan Ekonomi", Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi", BPFE, Yogyakarta.
- Chenery H.B dan Syrquin, Moises, (1975), *Patterns of Development, 1950-1970*, London: Oxford University Press.
- Creswell. John W., (2003), " Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", Second Edition, Sage Publications, London.
- Diwakar, R.R., (2007), "Taittiriya Upanishad Paraphrased-simplified-abridged, Mumbai:Vedanta Life Institute.
- Geriya, I.W., (2000), " Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI", Dinas Kebudayaan Bali.
- Granger, C.W.J. dan P. Newbold, (1986), " Forecasting Economic Time Series, Academic Press.
- Gujarati, Damodar N., (2005), " Basic Econometrics, *International Edition*", Edisi ke-4, McGraw-Hill Higher Education, New York.
- , (2006), " Essential of Econometrics", Edisi ke-3, McGraw-Hill, Boston.
- Gunawan Sumodiningrat, (2004), " Ekonometrika Pengantar", Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Herrick, Bruce & Kindleberger, Charles P., (1983), " Economic Development. 4-th Edition. McGraw-Hill. Singapore.
- Juan Luis E – Martin "Tourism and Economic Growth Latin American Countries: A Panel Data Approach", University of York Environment Departement.

- Kerlinger, F. N., (2006), "Asas-asas Penelitian Behavioral" Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, (1989), "Metode Penelitian Survei", Edisi Revisi, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Moh. Nazir, (1988), "Metode Penelitian", Lembaga Penerbit, Ghalia Indonesia.
- Mudrajad Kuncoro, (2001), "Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi", Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- , (2003), "Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi", Penerbit, Erlangga, Jakarta.
- Ratna, Nyoman Kutha., (2010), "Metodologi Penelitian : kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya," Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sadono Sukirno, (1985), "Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan", Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudira. P.P., (2010), "Pola Pembudayaan Kompetensi Berbasis Idiologi Tri Hita Karana" Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sukarsa Made, (2008), "Biaya Uacara Manusia Bali", Penerbit, Arti Foundation, Denpasar, Bali.
- Tambunan, Tulus, (2001), "Transformasi Ekonomi di Indonesia" Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Titib, I Made, (2003), "Aktualisasi Ajaran Tri Hita Karana dalam Konsep Desa Adat di Bali, Makalah Seminar.
- Todaro, P. Michael & Smith S.C., (2006) "Pembangunan Ekonomi" Ninth Edition is Published by arrangement with Pearson Education Limited, United Kingdom.
- Triguna, Yuda I.B., (1994), "Pergeseran Dalam Pelaksanaan Agama: Menuju Tattwa", Penerbit BP, Denpasar..
- , (1997), " Mobilitas Kelas, Konflik dan Penapsiran Kembali Symbolisme Masyarakat Hindu di Bali" Unpad Bandung, 1997.
- Waskita, D.N., (2005), " Penerapan Konsep Tri Hita Karana Dalam Perencanaan Perumahan di Bali". *Jurnal Pemukiman NATAH* Vol. 3, No. 2, hlm. 62 -105.
- Widarjono, Agus, (2009), "Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya", Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Wijaya, G., (1982), "Upacara Yadnya Agama Hindu", Denpasar : Setia Kawan.

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BANK MERGER PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Ruddy Tri Santoso
Program Doktor Ilmu Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email : ruddytri@gmail.com

Guntur Riyanto
Fakultas Ekonomi UNS
Email: gun_riyan@yahoo.com

Abstract

This research aims to test the influence of corporate governance to bank's efficiency after merger in Indonesia during year 1998-2010. Corporate governance mechanism proxied by; board of commissioner members amount, audit committee members amount, proportion of independent auditor in audit committee, frequency of board of commissioner meeting, back-ground educations of audit committee, frequency of audit committee meeting and ultimate ownership.

Banks efficiency is measured using frontier efficiency of DEA (Data Envelopment Analysis. Research is done by statistic descriptive method with regression analysis. Classical assumption test to prove data normality is conducted prior to panel data test. The result is assessed by panel data GLS (General Least Square) method by Eviews program. Panel data in Eviews program is selected because its ability to asses time series, cross-section data, and to reduce bias.

Data sample are taken from 8 (eight) merged banks public in Indonesia from 1998-2010 by 48 (fourty-eight) observations. The result shows that there are some significant variables contribute to efficiency (EFI). These variables are; board of commissioner members amount (DEKOM), audit committee members amount (KOMA), frequency of board of commissioner meeting (RAKOM), back-ground educations of audit committee (LBPKA), frequency of audit committee meeting (RAKA) and the other variables tested in this research are not significantly contributing to banks efficiency.

Keywords: *Corporate governance, bank merger, bank efficiency.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar bank publik yang melakukan merger memberi dampak positif bagi peningkatan kinerjanya, peningkatan efisiensi dan *cost savings* (Srinivasan, 1992: 27). Hal ini berlaku juga pada kinerja bank merger di Bursa Efek Indonesia dimana kinerja Bank Mandiri, Tbk. yang merupakan hasil merger dari empat bank pemerintah yang

semula tidak sehat menjadi sebuah bank merger milk publik yang sehat. Kinerja Bank Mandiri yang diukur dengan menggunakan ROA dan ROE menunjukkan hasil yang positif. Kesuksesan Bank mandiri, Tbk. Juga dibuktikan dengan memperoleh penghargaan 'over all the best company in Indonesia for Corporate Governance' (third place) pada tahun 2009 (Annual Report Bank Mandiri, 2010).

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *Corporate Governance* untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berjalan efektif.

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi (OECD, 2004). Struktur *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung-jawab masing-masing *stakeholder*. Ho dan Wong (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* merupakan cara yang efektif untuk menggambarkan hak dan tanggung-jawab masing-masing kelompok *stakeholder* dalam sebuah perusahaan dimana transparansi merupakan indikator utama standard *Corporate Governance* dalam sebuah sistem mekanisme organisasi bisnis. *Corporate Governance* didefinisikan sebagai serangkaian praktek dan tanggung-jawab yang dilakukan oleh dewan (komisaris) dan eksekutif manajemen dengan tujuan: 1) memberi arah strategis, 2) memastikan bahwa tujuan tercapai, 3) memastikan bahwa risiko dikelola dengan tepat, dan 4) memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara bertanggung-jawab (IFAC, 2009). Dalam definisi ini harus mencerminkan aspek-aspek *performance* dan *conformance*.

Pengaruh mekanisme *Corporate Governance* berpotensi mempengaruhi *outcome* organisasi. *Outcome* organisasi dapat dilihat pada kinerja perusahaan dan tingkat kesehatan bank. Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) mendefinisikan bahwa *corporate governance* sebagai sebuah cara yang efektif untuk menggambarkan hak dan tanggungjawab masing-masing kelompok *stakeholder* dalam sebuah perusahaan dimana transparansi merupakan indikator utama standar *corporate governance* dalam sebuah ekonomi.

Bukti menunjukkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia mengarah ada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo, dkk., 2004). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, dkk., 2005).

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggung-jawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (*Improving Audit Committee Performance: What Works Best - A Research Report prepared by Pricewaterhouse Coopers, the Institute of Internal Auditors Research Foundation*).

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate Governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan (*adequacy*) *corporate governance*. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu adalah suatu hal yang wajar

Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Merger Publik (Ruddy Tri Santoso dan Guntur Riyanto)

dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing pengawas perusahaan dalam proses penyusunan tersebut.

Ada beberapa peraturan terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* baik yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), maupun Keputusan Menteri BUMN. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sudah mensyaratkan keberadaan komisaris independen dan komite audit bagi semua perusahaan publik; ditambah Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/2002 sudah mensyaratkan hal yang sama untuk BUMN. Rujukan-rujukan tentang praktik-praktik terbaik sudah tersedia luas. Misalnya, melalui FCGI untuk rujukan praktik terbaik penerapan manajemen risiko dan komite audit serta melalui *Indonesian Society of Independent Commissioners* (ISICOM) untuk praktik terbaik fungsi dan peran komisaris independen. *Pilot Project Self Assessment* merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat GCG perbankan di Indonesia.

Oleh karena itu dalam riset ini akan mekanisme *corporate governance* dalam mengukur kinerja bank publik yang melakukan merger di Indonesia pada periode tahun 1998 – 2010.

Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kinerja bank yang dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance*. Proksi *outcome* organisasi digunakan untuk menghubungkan antara kinerja organisasi yang dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance*.

Penelitian ini menarik dan penting dilakukan karena: 1) Phenomena merger bank signifikan dengan pembentukan efisiensi sistem perbankan (Srinivasan and Wall, 1992), Riset tentang pengaruh mekanisme *Corporate governance* akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Hal ini penting bagi pengembangan literatur manajemen stratejik perbankan untuk membuktikan bahwa aspek organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja efisiensi, 3) Riset yang mengkaji pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja bank merger publik diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai tingkat profesionalisme manajemen yang dilakukan oleh pemegang saham, 4) Riset dilakukan terhadap bank-bank publik yang melakukan merger dan mempunyai validitas data yang akurat karena bank merupakan entitas bisnis yang sangat ketat dengan peraturan (*high regulated*).

1.2. Perumusan Masalah

Beberapa riset sebelumnya membuktikan bahwa bank-bank merger di Indonesia terkonsentrasi dan dikendalikan oleh keluarga dan rendahnya implementasi *corporate governance* (Asian development Bank, 2000) dan terkonsentrasinya kredit kepada pihak grup terkait. Bagaimana pola pengendalian manajemen industri perbankan di Indonesia? Apakah profesionalisme manajemen masih terkalahkan oleh kultur kepemilikan? Apakah mekanisme *corporate governance* dalam proses merger bank merupakan faktor yang memoderasi terbentuknya sebuah kinerja bank yang efisien?

Apakah mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dengan variabel jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah komite audit, proporsi komite audit independen, latar belakang pendidikan komite audit dan jumlah rapat komite audit, berpengaruh terhadap kinerja bank merger yang diprosikan dengan efisiensi yang diprosikan dengan rasio DEA (*Data Envelopment Anlysis*) sehingga pengaruh faktor mekanisme *corporate governance* bersifat sebagai faktor intervening yang memoderasi/memediasi tingkat kinerja bank merger? *Setting* yang berbeda dengan riset sebelumnya ini memungkinkan temuan yang secara spesifik berbeda dengan riset sebelumnya sehingga riset mengenai hal tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja bank merger yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 1998 – 2010.

1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Kontribusi teoritis berupa : 1) menambah literatur tentang pengukuran kinerja efisiensi perbankan di Indonesia yang disebabkan oleh faktor pengaruh mekanisme *corporate governance*, 2) bukti ini penting karena dalam menentukan proses sebuah merger pengendalian tingkat keberhasilan merger tersebut sangat dipengaruhi oleh kriteria penerapan mekanisme *corporate governance* didalam manajemen bank tersebut dan bukan demi kepentingan pemilik perusahaan dalam ekspropriasi menggunakan sumber daya bank tersebut untuk menutup kekurangan permodalannya.

Kontribusi praktis berupa : 1) membantu memetakan pola merger perbankan publik di Indonesia dan menemukan sebuah model merger bank yang sehat dengan memperhatikan faktor pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diterapkan didalam organisasi bank tersebut, 2) memberikan bukti terhadap bahwa apakah sebuah merger bank sudah memenuhi penerapan mekanisme *corporate governance* untuk menciptakan kinerja efisiensi perusahaan tersebut dalam melakukan merger, 3) mendorong Bank Indonesia untuk membuat peraturan tentang merger bank terutama dalam kaitannya dengan penerapan mekanisme *corporate governance*, dimana bank yang melakukan merger dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama, mengingat selama ini proses merger dilakukan oleh pemilik bank yang sama sehingga banyak benturan konflik kepentingan didalamnya terutama dalam memenuhi kebutuhan modal minimum bank hasil penggabungan tersebut. Peraturan baku tentang merger bank tersebut akan mengurangi benturan kepentingan pemegang saham pengendali dalam hal ekspropriasi untuk menutup kekurangan permodalan bank miliknya tersebut.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori *Corporate Governance* dan Kinerja Efisiensi

Kerangka konseptual riset ini berlandaskan teori *corporate governance* yang menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi pihak-pihak yang melakukan konflik (Jensen dan Meckling, 1976). Isu utama penerapan *corporate governance* di negara-negara dengan kepemilikan menyebar adalah konflik keagenan antara prinsipal dan agen/manager, sedangkan pada kepemilikan terkonsentrasi dikendalikan oleh keluarga sebagai pemegang saham pengendali.

Dalam kepemilikan menyebar maka pemegang saham tidak terorganisir dan *powerless* secara individual tidak signifikan mempengaruhi kebijakan dan strategi perusahaan (Morck dan Steier, 2007). Dalam kasus ini maka pemegang saham mendelegasikan wewenang pengelolaan perusahaan kepada para agen (manager). Konflik keagenan akan timbul karena benturan kepentingan bahwa para agen tersebut ingin memaksimalkan utilitasnya sedangkan para prinsipal memaksimalkan kepentingan *private*-nya.

Dalam kasus tersebut diatas maka fungsi pengawasan dalam menentukan peningkatan kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh para agen dan kultur kepemilikan dalam kepentingan perusahaan. Untuk itu pentingnya penerapan pengaruh mekanisme *corporate governance* dalam fungsi pengawasan perusahaan merupakan faktor yang memoderasi kinerja perusahaan tersebut.

Cadbury Committee menyatakan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Peran penting dalam melaksanakan *corporate governance* berada pada dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja bank serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI, 2001).

Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Merger Publik (Ruddy Tri Santoso dan Guntur Riyanto)

Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Menurut Egon Zehnder (FCGI, 2001), dewan komisaris merupakan inti *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Menurut Herwidayatmo (2000), Indonesia menganut *two tier boards system*, artinya bahwa komposisi dewan pengurus perseroan terdiri dari fungsi eksekutif yaitu dewan direksi dan fungsi pengendalian yaitu dewan komisaris. Berdasarkan kerangka hukum yang ada, fungsi *independent (non-executive) directors* pada *single-board system* dapat direpresentasikan dengan fungsi dewan komisaris pada *two tier board system*. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang ada pada perusahaan di Indonesia terletak pada dewan komisaris.

Jumlah anggota dewan komisaris yang optimum akan lebih efektif daripada jumlah yang kecil (Dalton et al, 1999). Selain itu, menurut Andres, Azofra dan Lopez (2005) jumlah anggota dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan. Kusumawati dan LS (2005) dalam penelitiannya membuktikan bahwa variabel karakteristik dewan yang berupa jumlah komisaris terbukti berhubungan dengan nilai perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Hasil penelitian yang dilakukan Vafeas (2003) menunjukkan bahwa jumlah rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian Vafeas (2003), penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007) menunjukkan semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Komisaris independen ditetapkan sebagai seseorang yang independen dari posisi manajemen eksekutif atau fungsi manajemen lainnya dalam perusahaan dan bebas dari hubungan apapun yang dapat mempengaruhi keputusan mereka (Hegazy dan Hegazy, 2010). Untuk lebih memantapkan efektifitas komisaris independen, keberadaan komisaris independen telah diatur dalam PBI Nomor: 8/14/PBI/2006 pasal 5 yang menetapkan bahwa komposisi komisaris independen sekurang-kurangnya berjumlah 50% dari jumlah anggota dewan komisaris.

Menurut Ho dan Wang (2001) memasukkan anggota independen dalam dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah manajer membuat keputusan yang tidak efisien. Siallagan dan Machfoedz (2006) menggunakan proporsi komisaris independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan.

Komponen penting lain yang mendukung terlaksananya *corporate governance* yang baik, yaitu komite audit (FCGI, 2001). Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Menurut Herwidayatmo (2000), syarat untuk menjadi anggota komite audit adalah independen atau tidak memiliki hubungan usaha maupun afiliasi dengan perusahaan, direktur, komisaris, maupun pemegang saham utama. Berdasarkan PBI Nomor: 8/4/PBI/2006, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana satu diantaranya memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan yang lainnya memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Abeysekera (2008) menyatakan bahwa komite audit merupakan mekanisme untuk memastikan tidak ada tindakan manajemen yang merugikan *stakeholder*. Komite audit dibentuk oleh komisaris dan bertanggungjawab

kepada komisaris. Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: 1) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, 2) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, 3) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, 4) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Menurut pasal 43, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006 tugas dan tanggung jawab komite audit adalah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan perbankan. Menurut Herwidayatmo (2000) tugas komite audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi. Agar tugas dan fungsi komite audit dalam membantu dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, komite audit minimal mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (FCGI, 2001).

Berger dan Mester (1997), dan juga seperti pada Hadad et.al (2003b), menjelaskan bahwa perilaku lembaga keuangan dapat melalui beberapa pendekatan, antara lain: (i) Pendekatan produksi (*production approach*), yaitu dengan melihat bahwa institusi keuangan sebagai produsen simpanan (*deposit account*) dan juga pinjaman kredit (*loans*). Pendekatan ini mendefinisikan *output* adalah penjumlahan dari keduanya dari berbagai transaksi-transaksi terkait, sedangkan input-inputnya adalah biaya tenaga kerja, pengeluaran modal dan asset-asset tetap (*fixed assets*), serta pengeluaran-pengeluaran lainnya yang bersifat material; (ii) Pendekatan intermediasi (*intermediation approach*), yaitu memperlakukan institusi keuangan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, dengan mengubah dan mentransfer berbagai asset finansial dari unit-unit surplus menjadi unit-unit defisit. Dalam pendekatan ini, biaya tenaga kerja, pengeluaran modal, dan pembayaran bunga simpanan dikategorikan sebagai *input-input*, sedangkan pinjaman kredit dan investasi pada instrumen keuangan (*financial investment*) sebagai *output-outputnya*; dan (iii) Pendekatan aset (*asset approach*), pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan intermediasi, namun dengan lebih memperlakukan institusi keuangan adalah lembaga yang menjalankan fungsi utama sebagai pencipta pinjaman kredit (*loans*). Berbeda dengan Berger dan Humprey (1991), yang mengklasifikasikan pinjaman kredit (*loans*), *demand deposit*, *time deposit*, dan *saving deposit* sebagai *output* utama, sedangkan Efisiensi menurut Hadad, et.al (2003) merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu ukuran kinerja yang mendasari seluruh kinerja organisasi. Efisiensi dalam dunia perbankan merupakan salah satu parameter kinerja yang cukup populer sehingga lazim digunakan karena dapat memberikan jawaban atas berbagai kesulitan dalam menghitung berbagai ukuran kinerja seperti yang disebutkan di atas.

Menurut Hadad, et.al (2003) pengukuran efisiensi bank dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan parametrik yaitu *SFA (Stochastic Frontier Approach)* dan *DFA (Distribution Frontier Approach)*. Pendekatan kedua, menggunakan pendekatan non parametrik yaitu *DEA (Data Envelopment Analysis)*.

Penelitian awal mengenai *DEA* dimulai oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978), dimana di dalam teknik *DEA* diakomodasi terdapatnya berbagai unit pembuat keputusan yang berbeda (*DMU/ different decision-making unit*) yang melakukan kegiatan atau tugas yang sama. Namun demikian, setiap *DMU* tersebut meliputi beragam *input* yang pada akhirnya juga diharapkan mampu menghasilkan beragam *output*.

Keuntungan dari penggunaan teknik non parametrik *DEA* selain mampu berhadapan dengan kasus input yang beragam (seperti faktor yang berada di luar kendali manajemen) juga mampu mengurangi kesulitan yang muncul dari penggunaan metode parametrik dalam menganalisis rasio keuangan. Aplikasi teknik *DEA* juga memudahkan perbandingan efisiensi dengan menggunakan kriteria yang seragam, melalui penggunaan bentuk rasio yang sederhana untuk mengetahui efisiensi setiap organisasi, termasuk lembaga perbankan.

Hal yang mendasar pada teknik *DEA* adalah skor efisiensi teknis dari setiap *DMU*, sehingga *DEA* mempunyai hasil yang relatif, bukan absolut, dimana ukuran mengenai teknis efisiensi untuk setiap *DMU* selalu dipertimbangkan. Sehingga dari sini efisiensi teknis memegang peranan penting, karena dengan memiliki rasio

yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional kebijakan Governance) tahun 2006 tentang pedoman umum *good corporate governance* Indonesia dan KNKG tahun 2008 tentang konsep pedoman *good public governance* yang diwajibkan oleh Pemerintah RI dan Bapepam RI.

Riset tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja ditemukan oleh Ibrahim dan Samad (2011), Giovannini (2010) dan Filatotcheve, et.al. (2005). Ibrahim dan Samad (2011) mengemukakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan dan independensi dewan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Giovannini (2010) mengindikasikan bahwa keberadaan dewan independen mempengaruhi kinerja secara positif meskipun dengan tingkat signifikansi yang kecil.

Biswas dan Bhuiyan (2008) menyatakan bahwa dari berbagai hasil studi empiris seringkali sulit ditarik kesimpulan apakah *corporate governance* berhubungan dengan kinerja perusahaan, sehingga apakah *corporate governance* yang baik akan menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan masih merupakan pertanyaan penelitian yang valid karena ambiguitas tentang kausalitas antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Untuk itu, didalam riset ini pertanyaan tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja masih merupakan sebuah dugaan.

Corporate governance adalah sebuah mekanisme tata kelola perusahaan, dimana terdapat dua bagian penting dalam *corporate governance* yaitu dewan komisaris dan komite audit. Lipton dan Lorchs (1993) menyatakan bahwa *good corporate governance* dapat menghasilkan *good corporate performance*.

Ukuran dewan komisaris semakin besar jumlah, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif (Collier dan Gregory, 1999). Pengawasan yang baik terhadap CEO berdampak kepada keputusan yang diambil oleh CEO yang kemudian berdampak pada kinerja perusahaan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dewan komisaris melakukan rapat dan pertemuan. Jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris menggambarkan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dimana pengawasan yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian dari Brick dan Chidambaram (2007) menyimpulkan bahwa semakin banyak rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Jumlah komite audit, rapat komite audit dan latar belakang pendidikan merupakan faktor-faktor dalam komite audit. Dimana jumlah komite audit akan berpengaruh pada besarnya pengaruh yang dapat diberikan. Kinerja komite audit yang baik tercermin dari rapat yang dilakukan, dimana kinerja komite audit yang baik akan memberikan dampak pada kualitas audit yang kemudian akan meningkatkan kinerja perusahaan. Latar belakang pendidikan komite audit menunjukkan kualitas yang dimilikinya dimana kualitas itu akan berdampak pula pada kemampuannya dalam melaksanakan pengawasan.

Dalam penelitian ini dewan komisaris diprosikan menjadi empat, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1) Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI, 2000). Jumlah komisaris mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan (Andres, Azofra, dan Lopez, 2005). Dari penjelasan diatas disusun hipotesis sebagai berikut:

H1_a : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2) Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi (Ayuso dan Argondana, 2007). Dari penjelasan tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H1_b : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja Bank.

3) Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris secara rutin melakukan rapat. Rapat tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap operasi perusahaan, dimana secara berkala dewan komisaris melakukan evaluasi dan pengecekan. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan

**Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Merger Publik
(Ruddy Tri Santoso dan Guntur Riyanto)**

komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Dari penjelasan tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H1_c : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja Bank.

4) Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama

Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra (2007) menyatakan meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi seseorang yang beraktivitas di dunia bisnis untuk berpendidikan bisnis, akan lebih baik jika anggota dewan memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi. Hipotesis berikutnya adalah:

H1_d : Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh positif terhadap kinerja Bank.

Komite Audit

Komponen penting lain yang mendukung terlaksananya *corporate governance* yang baik, yaitu komite audit (FCGI, 2001). Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini di proksikan menjadi 4, sebagai berikut:

1) Ukuran Komite Audit

Penelitian yang dilakukan oleh Xie, Davidson dan DaDalt (2003) menemukan bahwa komite audit merupakan faktor penting dalam pengawasan terhadap manajemen. Dalam penelitian tersebut rata-rata komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah 5 orang anggota dalam rentang 2 hingga 12 anggota. Dari uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2_a : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja Bank.

2) Proporsi Komite Audit Independen

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2001). Dengan adanya komite audit independen diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dari pernyataan tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H2_b : Proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap kinerja Bank.

3) Jumlah Rapat Komite Audit

Komite audit harus transparan, dimulai dengan keharusan adanya *audit charter* dan agenda program kerja tahunan tertulis dari komite audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat komite audit (Alijoyo, 2003). Dari uraian tersebut maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H2_c : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja Bank.

4) Latar Belakang Pendidikan Komite Audit

Menurut Dezoort dan Salterio (2001) anggota komite audit yang memiliki pengetahuan tentang pelaporan audit dan keuangan memberikan dukungan terhadap auditor eksternal dalam perselisihan yang terjadi dengan pihak manajemen. Adanya perselisihan antara pihak manajemen dengan auditor eksternal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya komite audit yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka diharapkan perusahaan memiliki kinerja yang baik. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2_d : Latar belakang pendidikan anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja Bank.

Proporsi Kepemilikan

Salah satu masalah yang dihadapi perusahaan adalah pendanaan. Dana tersebut dibutuhkan oleh perusahaan dalam operasi usahanya. Salah satu bentuk pendanaan yaitu pendanaan eksternal. Masalah pendanaan ini berpengaruh terhadap tingkat kapitalisasi modal (Purba, 2004). Purba (2004) menemukan bahwa proporsi kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dari penjelasan di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Proporsi kepemilikan saham berpengaruh terhadap kinerja Bank.

Faktor-faktor mekanisme *corporate governance* tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja efisiensi bank sehingga hipotesis berikutnya adalah:

H4 : Variabel-variabel ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah komite audit, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, latar belakang pendidikan komite audit dan proporsi kepemilikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja bank setelah merger yang diprosikan dengan kinerja efisiensi relatif yang diukur dengan rasio DEA (*Data nvelopment Analysis*).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data bank publik yang melakukan merger dalam periode tahun 1998-2010 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data sekunder berupa laporan keuangan publikasi dan rasio keuangannya diperoleh dari Direktori Perbankan Indonesia dan informasi tentang *corporate governance* berasal dari *annual report*. Hasil seleksi terhadap data sekunder bank merger publik sebanyak 8 (delapan) buah bank yang memenuhi persyaratan penelitian ini.

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen terdiri dari pengaruh *corporate governance* yang diukur dengan pengaruh variabel dewan komisaris, komite audit dan struktur kepemilikan dalam kinerja efisiensi perbankan berdasarkan aktivitas riil dan variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja efisiensi yang diukur dengan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*).

Model penelitian kinerja efisiensi relatif perbankan diturunkan dengan menggunakan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*) yang dipergunakan berdasarkan penelitian Hadad, et. al. (2003).

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi non parametrik, dengan metodologi yang dikenal dengan istilah *Data Envelopment Analisis* (DEA). DEA menghitung efisiensi teknis untuk seluruh unit. Skor efisiensi untuk setiap unit adalah relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit lainnya di dalam sample. Setiap unit dalam sample dianggap memiliki tingkat efisiensi yang tidak negatif, dan nilainya antara 0 hingga 1, dimana satu menunjukkan efisiensi yang sempurna. Kemudian unit-unit yang memiliki nilai satu ini digunakan dalam membuat *envelope* untuk *frontier* efisiensi. Unit-unit lainnya yang ada di dalam *envelope* menunjukkan tingkat inefisiensi (Hadad, et.al, 2003).

Persamaan regresi berganda pengaruh mekanisme *corporate governance* yang menjadi variabel intervening yang memoderasi/mediasi kinerja efisiensi perbankan diturunkan dengan rumus:

| | Keterangan |
|------------|---|
| EFI | Efisiensi kinerja bank merger |
| DEKOM | Jumlah dewan komisaris |
| KOMIND | Proporsi komisaris independen |
| LBPDK | Latar belakang pendidikan dewan komisaris |
| RAKOM | Jumlah rapat dewan komisaris |
| KOMA | Jumlah komite audit |
| KAI | Proporsi komite audit independen |
| LBPKA | Latar belakang pendidikan komite audit |
| RAKA | Jumlah rapat komite audit |
| OWN | Struktur kepemilikan |
| α | Konstanta |
| β | Koefisien Regresi |
| ϵ | Error |
| i | Observasi |

**Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Merger Publik
(Ruddy Tri Santoso dan Guntur Riyanto)**

Uji data pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja efisiensi bank dilakukan dengan metode *panel data* dari program *eviews 7*, dengan jumlah observasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) items pengamatan untuk kedelapan buah bank merger yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari pengolahan data diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Uji Data Panel dengan Pendekatan GLS (*General Least Square*)

| Variabel | Koefisien | t | Sig. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| (Constant) | -0,5151 | -1,451 | 0,154 |
| DEKOM | -0,0850 | -3,252 | 0,002 |
| KOMIND | 0,1457 | 0,418 | 0,678 |
| LBPDK | -0,1457 | -0,679 | 0,501 |
| RAKOM | 0,0113 | 2,809 | 0,007 |
| KOMA | 0,1238 | 2,577 | 0,013 |
| KAI | 0,4204 | 1,536 | 0,132 |
| LBPKA | 0,4804 | 2,588 | 0,013 |
| RAKA | 0,0157 | 2,594 | 0,013 |
| OWN | -0,0159 | 0,777 | 0,4420 |
| R Square | 0,641072 | | |
| <i>Adjusted R Square</i> | 0,556063 | | |
| F | 7,541200 | | |
| Sig | 0,05 | | |

*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

Dari tabel 2. di atas menunjukkan bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,641072 dan nilai *adjusted R Square* (*Adjusted R²*) sebesar 0,556063. Berdasarkan nilai *Adjusted R²* tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 44,40% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen serta variabel kontrol dan sisanya sebanyak 55,60% dijelaskan oleh faktor lain.

Dalam tabel tersebut juga menunjukkan nilai F hitung sebesar 7,541200 dengan probabilitas 0,000003 ($p\text{-value} < 0,050$). Karena nilai F lebih besar dari 4 dan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,050 maka model regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik (*good overall model fit*) sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja efisiensi atau dapat dikatakan bahwa jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, proporsi komite audit independen, latar belakang pendidikan komite audit, jumlah rapat komite audit dan struktur kepemilikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja efisiensi perbankan (Ghozali, 2006).

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris (DEKOM), jumlah rapat dewan komisaris (RAKOM), proporsi komite audit independen (KAI), latar belakang pendidikan komite audit (LBPKA) dan jumlah rapat komite audit ((RAKA) berpengaruh terhadap kinerja efisiensi (EFI), sedangkan proporsi komisaris independen (KOMIND), latar belakang pendidikan dewan komisaris (LBPDK), proporsi komite audit independen (KAI) dan struktur kepemilikan (OWN) tidak berpengaruh terhadap kinerja efisiensi perbankan (EFI). Sehingga dengan demikian H1a, H1c, H2a, H2c dan H2d diterima; sedangkan H1b, H1d, H2b dan H3 ditolak.

5. PENUTUP

Hasil penelitian tersebut diatas memperoleh kesimpulan hasil penelitian, implikasi dan keterbatasan sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

Persamaan regresi berganda dari hasil pengujian data panel data-data bank merger di Indonesia pada tahun 2004 – 2010 adalah sebagai berikut:

$$EFI = -0,5151 - 0,8506 DEKOM + 0,0113 RAKOM + 0,1238 KOMA + 0,0115 RAKA + 0,4804 LBPKA + \varepsilon_{it-1}$$

Dimana : EFI - Efisiensi kinerja bank merger
DEKOM - Jumlah dewan komisaris
RAKOM - Jumlah rapat dewan komisaris
KOMA - Jumlah komite audit
RAKA - Jumlah rapat komite audit
LBPKA - Latar belakang pendidikan komite audit

5.2. Implikasi

Implikasi penelitian ini adalah dengan penerapan pengukuran kinerja efisiensi perbankan diharapkan bahwa bank akan lebih mampu melihat tingkat kinerjanya disamping tingkat kesehatannya. Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah perlu diadakan penelitian lebih mendalam mengenai pengukuran kinerja bank menurut indikator alternatif berdasarkan rasio keuangan perbankan yang meliputi rasio BOPO, ROA dan ROE serta klasifikasi tingkat sehat atau tidaknya sebuah bank berdasarkan rasio-rasio keuangan serta kaitannya dengan kinerja efisiensi relatif yang diukur melalui DEA (*Data Envelopment Analysis*).

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan ukuran kinerja efisiensi perbankan menggunakan skala efisiensi relatif dengan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*) yang merupakan metode non-parametrik dan belum mengukur efisiensi matematis/finansial dengan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia untuk menentukan tingkat sehat atau tidaknya sebuah bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I., (2008), The role of corporate governance in intellectual capital disclosure in Kenyan listed firms. www.ssrn.com. 30 Agustus 2011.
- Akhtaruddin, et.al., (2010), Board ownership, audit committees' effectiveness and corporate voluntary disclosures. *Asian Review of Accounting*. Vol. 18 Iss: 1, pp.68 – 82.
- Alijoyo, F. Antonius, (2003), Keberadaan & peran komite audit dalam rangka implementasi GCG. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional GCG–FKSPI BUMN/BUMD wilayah Jawa Timur, Surabaya-Indonesia tanggal 7 Mei 2003.
- Andres, P., Azofra, V., Lopez, F., (2005), Corporate boards in OECD countries: size, composition, functioning and effectiveness. *Journal of Corporate Governance*, 13 (2): 197-210.
- Annual Report PT. Bank Mandiri, Tbk. 2010.
- Ayuso, Silvia, Antonio Argandona, (2007), Responsible corporate governance: towards a stakeholder board of directors. working paper. IESE Business School, University of Navarra.

**Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Merger Publik
(Ruddy Tri Santoso dan Guntur Riyanto)**

- Asian Development Bank, (2000), *Corporate Governance and Finance in East Asia: A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand: A Consolidated Report*, Manila, Volume 1, Asian Development Bank.
- Badan Pengawas Keuangan RI, (2009), Laporan Audit Investigasi Bank Century, Tbk. Laporan tanggal 20 November 2008.
- Badan Pengawas Pasar Modal, (2004), Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Badan Pengawas Pasar Modal, (2003), Peraturan nomor VIII.G.11, Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-40/PM/2004 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, (2006), Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-136/BI/2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
- Bank Indonesia, (2006), Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/Pbi/2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia, (2007), Surat Edaran BI no. 9/12/DPNP, tentang analisis *self assessment good corporate governance*. Bank Indonesia.
- Berger, N. Allen dan D.B Humphrey, (1992), *Measurement and Efficiency issue in Commercial Banking*. National bureau of Economic Research, University of Chicago Press.
- Biswas, Pallab Kumar and Bhuiyan, Hamid Ullah, (2008), Corporate Governance and Firm Performance: Theory and Evidence from Literature. Working Paper (<http://papers.ssrn.com/abstract:1257617>).
- Brick E, Ivan dan Chidambaran N.K., (2007), Board Meetings, Committee Structure and Firm Performance. <http://ssrn.com>. 21 Agustus 2011.
- Chan, Kam. C., and Joanne Li., (2008), Audit Committee and Firm Value: Evidence on Outside Top Executive as Expert-Independent Directors. *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 16. Issue 1, pp. 16-31.
- Chidambaran, N. K., Palia, D. Zheny, Y., (2008), Corporate Governance & Firm Performance: Evidence From Large Governance Changes. Working Paper, Rutgers Business School.
- Collier, P. dan A. Gregory, (1999), Audit committee activity and agency cost. *Journal of Accounting and Public Policy*, 18(4-5): 311-332.
- Dalton, et. Al., (1999), Number of directors and financial performance: A meta-analysis. *Academy of Management Journal*, 42(6): 674-687.
- Darmawati, D, Khomsyah & Karayu, (2005), 'Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan'. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, vol.8. No. 1, pp. 65-81.
- Dezort & Salterio, (2001), The effects of corporate governance experience and financial reporting and audit knowledge on audit committee members' judgments. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 20 (2): 31-47.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, (2001), Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan *corporate governance*. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, Jilid II. Edisi ke-2. Jakarta. <http://fcgi.org.id>. 14 agustus 2010.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, (2002), *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. <http://fcgi.or.id>. 15 September 2010.
- Ghozali, I., (2006), *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giovannini, R., (2010), Corporate governance, family ownership and performance. *Journal Management Governance* 14: 145-166
- Green, (1994), Canadian audit committees and their contribution to corporate governance. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 3, 135-151.
- Hadad, M. D. W. Santoso, D. Ilyas, dan E. Mardanugraha, (2003), *Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Non-parametrik DEA (Data Envelopment Analysis)*. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E5610BE0-6CC1-4161-AFE9-F8116800B44B/7829/PenggunaanmetodeparametrikDEA.pdf>. 31 Oktober 2011.

- Hadad, Muliaman D., (2003), Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia Penggunaan Metode Non-parametrik DEA (Data Envelopment Analysis), *Jurnal Bank Indonesia*.
- Hadad, Muliaman D., Agus Sugiarto, Wini Purwanti, M. Jony Hermanto, dan Bambang Arianto, (2003), Kajian mengenai struktur kepemilikan bank di Indonesia. <http://bi.go.id>. 22 Februari 2012.
- Hegazy, M., dan Hegazy, K., (2010), Corporate governance in the U.K: Audit committees and disclosure arrangements—A web-based analysis. *Journal of Business Studies Quarterly*, 1 (2): 32-55.
- Herwidayatmo, (2000), Implementasi *good corporate governance* untuk perusahaan publik Indonesia. Artikel pada majalah Usahawan No. 10 Th XXIX, Oktober 2000.
- Ho, Simon S.M. dan Wong, Kar Shun, (2001), A study of relationship between corporate governance structure and extent of voluntary disclosure. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, (10): 139-156.
- Ibrahim, H dan F.A. Samad, (2011), Corporate Governance Mechanisms and Performance of Public-Listed Family-Ownership in Malaysia. *International Journal of Economics and Finance* 3 (1): 105-115.
- IFAC (International Federation of Accountants), (2009), International Good Practice Guidance, Evaluating and Improving Governance in Organization (<http://ifac.org/eds/>).
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling, (1976), Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal of Financial economics*, 3(4): 305-360, *Ssrn id-94043*.
- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. <http://www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/IX/IX.I.5.pdf>. 9 November 2010.
- Khanchel, I., (2007), Corporate Governance Measurement and Determinant Analysis, *Managerial Auditing Jurnal*, vol.22. no 5: 607-621.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006), Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. <http://governance-indonesia.com>. 9 November 2010.
- Kusumastuti, Sari Supatmi, dan Sastran Perdana, (2007), Pengaruh *Board Diversity* Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif *Corporate Governance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9 (2): 88-98.
- Lin, et.al., (2006), The effect of audit committee performance on earnings quality. *Managerial Auditing Journal*, 21(9): 921–933.
- Lipton, Martin, dan Jay W. Lorsch, (1993), A modest proposal for improved corporate governance. *Law and Economic Journal* 59: 48-59.
- Morck, R. K., dan L. Steier, (2007), The Global History of Corporate governance, An Introduction, A History Of Corporate Governance Around The world, *National Bureau of Economic Research Conference Report. The University of Chicago Press*.
- Nasution, MARIHOT dan Setiawan, DODDY, (2007), Pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Organization for Economic Corporation and Development (OECD), (2004), Principles of corporate governance. <http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf>. 9 November 2010.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. <http://bi.go.id>. 5 September 2010.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- Purba, Darwis, (2004), Mengkaji Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan Industri Manufaktur pada BUMN. Indonesian Production and Operations Management Society (IPOMS). (<http://www.ipoms.or.id/>).
- Setiaatmaja, Y. Lukas, (2009), Governance Mechanism and Firm Value: The Impact of Ownership Concentration and Dividends. *Blackwell Publishing. Ltd, An International Review*, 2009, 17 (6) : 694 -709.

***Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Merger Publik
(Ruddy Tri Santoso dan Guntur Riyanto)***

- Siallagan, Hamonangan dan Mas'ud Machfoedz, (2006), *Mekanisme corporate governance*, kualitas laba dan nilai perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Srinivasan, Aruna, and Larry D. Wall. "Cost Savings Associated with Bank Mergers". Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 92-2, February 1992.
- Srinivasan, Aruna, (1992), Are There Cost Savings from Bank Mergers? *Journal Economic Review-Federal Reserve Bank of Atlanta*; Mar/Apr 1992; 77,2; ABI/INFORM Research.
- Vafeas, Nikos, (2003), Futher Evidence on Compensation Committee Composition As A Determinant of CEO Compensation, *Financial Management*, 32: 53-77.
- Xie, Biao, Wallace N. Davidson, Peter J. DaDalt, (2003), Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance* 9 : 295– 316.

